



Menjaga Indonesia

Pikiran-pikiran Konstruktif untuk Bangsa

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Menjaga Indonesia

Pikiran-pikiran Konstruktif untuk Bangsa

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

*Untukmu Indonesiaku,
Menjagamu, lebih dari apapun...*

Menjaga Indonesia: Pikiran-pikiran Konstruktif untuk Bangsa
Copyrights @2019 oleh Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Editor: M.R. Muchlis

Desain Sampul: M.R. Muchlis

x + 190 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-52507-8-1

PT Pencerah Generasi Antarbangsa
Eightyeight@Kasablanka Lantai 35
Jalan Casablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870
Telepon 021.80640526
Email: info@enlights.co
www.enlights.co

Indonesia Political Review (IPR)
De Salim Town House
Jalan H. Salim No.132 Cimanggis, Depok, Jawa Barat
Email: ipoliticalreview@gmail.com
Website: www.ipr-indonesia.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi	vii
Sambutan Penulis	ix
BAB 1 MENGGAGAS INDONESIA EMAS	
Menggagas Indonesia Emas 2045	2
Pileg Yes Pilpres No	7
Pilpres yang Membuat Stres	12
Siapakah Pemenang Pileg 2019?	17
Ulama, Rakyat, dan Demokrasi Lima Tahunan	22
Adu Kuat Jokowi versus Prabowo	27
BAB 2 HOAKS PENGHANCUR SENDI-SENDI BANGSA	
Isu PKI Serang Jokowi	32
Politik Poligami PSI	36
Gaya Baru Kampanye Pilpres	41
Pilpres Pasca Reuni 212	45
Politisasi Ngaji Menebar Politik Identitas	50
Republik Darurat Hoaks	54
BAB 3 KAMPANYE TANPA MORALITAS	
Hantu Debat Perdana	60
Kritik JK dan Nasib Bangsa	65
Jebakan Demokrasi	70
Kampanye Ofensif	75

Menanti Kejutan Debat Kedua	80
Saling Serang Pasca Debat	85

BAB 4 DEMOKRASI DALAM ANCAMAN

Kartu Sakti Jokowi	92
Narkoba Menyasar Andi Arief	97
Menanti Debat Ketiga	102
Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas	107
Beban Ideologi Debat Keempat	112
Demokrasi dalam Ancaman	117

BAB 5 REKONSILIASI DEMI PERSATUAN BANGSA

Menanti Debat Pamungkas Capres dan Cawapres	124
Pilpres Kita	129
Saatnya Rekonsiliasi	133
Ulama Terpecah, Umat Terbelah	138
Menjaga Indonesia	142
Menolak Hasil Pemilu	147

BAB 6 PILPRES DAN MASA DEPAN INDONESIA

Indonesia Terluka	154
Menunggu Rekonsiliasi Pasca Pilpres	158
Bersatu Pasca Pilpres	162
Mencari Pimpinan KPK yang Ideal	167
MK dan Narasi Kecurangan	172
Mari Kita Bersatu	177

BAB 7 PENUTUP

Penutup	182
---------	-----

Daftar Pustaka	184
-----------------------	------------

Tentang Penulis	189
------------------------	------------

Sambutan Penulis

Subhanallah. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Atas karunia, hidayah, dan inayah-Nya, tak terasa buku ke-18 saya ini hadir.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Rasulallah, Nabi Besar Muhammad Saw, manusia mulia sepanjang masa.

Buku referensi ini, merupakan buku ilmiah yang ditulis secara populer untuk kepentingan akademik dan non-akademik, agar bisa dibaca dengan enak dan renyah oleh para akademisi dan rakyat biasa. Semoga bermanfaat, mencerahkan, dan menginspirasi.

Buku referensi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Masukan dan kritik, dari para pembaca sangat saya harapkan.

Semoga buku ini menjadi amal jariah bagi penulis, yang pahalanya terus mengalir, hingga akhirat nanti. Aamiin.

Depok, 14 Mei 2019

Ujang Komarudin

BAB 1

MENGGAGAS

INDONESIA EMAS

Menggagas Indonesia Emas 2045

Tujuh puluh tiga tahun kita sudah merdeka. Tujuh puluh tiga tahun pula kita masih belum berdaya. Kebodohan dan kemiskinan sebagai musuh bangsa, masih menggelayuti tubuh republik ini. Pembangunan memang terjadi di mana-mana, namun wajah bopeng nusantara masih terlihat.

Tujuh puluh tiga tahun kita sudah merdeka. Tujuh puluh tiga tahun pula kita masih belum berdaya. Kebodohan dan kemiskinan sebagai musuh bangsa, masih menggelayuti tubuh republik ini. Pembangunan memang terjadi di mana-mana, namun wajah bopeng nusantara masih terlihat.

Kita tentu bangga, bangsa ini sudah bebas dari penjajahan. Dan harus disyukuri. Namun kita belum bebas dari penderitaan yang mendera rakyat miskin. Pembangunan seolah berpihak kepada mereka yang kaya. Namun tidak memihak kepada mereka yang papa. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin, seperti itulah kritikan Bang Rhoma Irama, dalam salah satu bait lagunya.

Tak lama lagi, sekitar dua puluh tujuh tahun lagi, usia republik ini akan masuk satu abad kemerdekaan. Tahun 2045

merupakan seratus tahun Indonesia merdeka. Dan sejatinya tahun 2045 harus menjadi tahun penuh keemasan bagi bangsa yang sedang tertatih dan masih mencari jati diri ini.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara biasa. Tidak boleh hanya menjadi negara pinggiran. Tidak boleh hanya menjadi negara penonton. Di tengah persaingan dunia. Tidak boleh hanya menjadi negara, yang dikelola secara amatiran dan asal-asalan. Dan tidak boleh menjadi negara dan bangsa yang munafik.

Namun bangsa ini, harus menjadi bangsa besar dan kuat. Menjadi negara yang disegani, bukan hanya di Asia tetapi juga di dunia. Menjadi republik yang menarik, bukan hanya untuk rakyatnya, tetapi juga bagi siapapun yang menginjakkan kaki di Indonesia. Menjadi negara yang eksotik, bukan hanya untuk warganya, tetapi juga bagi mereka yang datang ke Indonesia. Menjadi negara yang ramah, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Menjadi negara yang memiliki karya besar yang bereputasi dunia. Menjadi negara yang diasporanya mewarnai dan diperhitungkan dunia. Menjadi negara tempat bangsa lain menimba ilmu dan belajar pada peradaban Indonesia. Menjadi bangsa yang menghasilkan tokoh-tokoh kelas dunia. Dan menjadi negara yang beradab.

Menjadi negara yang cinta damai, adil, makmur, dan sejahtera. Bukan menjadi bangsa sengsara, miskin, gagal, hancur, dan hilang ditelan jaman. Bangsa ini perlu lompatan, butuh lompatan besar. Ya, lompatan besar. Agar tidak ketinggalan jauh dari negara-negara lain. Seperti kata Rostow, negara harus bisa tinggal landas. Terbang tinggi, seperti pesawat terbang.

Bukan menjadi negara yang bablas. Kebablasan dalam kesalahan mengelola negara. Ugal-ugalan dalam menjalankan

pemerintahan. Apalagi membiarkan negara menjadi rapuh dan lemah. Negara ini harus melaju kencang dalam pembangunan. Jika tidak, maka akan ketinggalan.

Layaknya emas yang melambangkan kesejahteraan, kemuliaan, keagungan, kemasyhuran, ketinggian derajat, dan kemakmuran. Indonesia sangat mungkin, dan sangat bisa menjadi Indonesia emas di 2045. Biarkan dan tinggalkan bagi yang pesimistis. Lupakan bagi yang selalu nyinyir. Hempaskan bagi yang selalu berprasangka buruk dan negatif. Karena Indonesia emas 2045 adalah keniscayaan. Ya, keniscayaan. Kita akan meraihnya bersama-sama. Apapun risikonya. Dan apapun tantangan dan hambatannya.

Namun keniscayaan tersebut, tidak akan datang dengan sendirinya. Butuh perjuangan dan kerja keras kita semua, untuk bahu-membahu dan bergotong-royong, untuk menjadikan republik ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Tahun 2045, hanya tinggal dua puluh tujuh tahun lagi. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang, dan saat ini, maka peluang tersebut akan hilang.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam satu kesempatan mengatakan, bahwa ada empat hal yang harus disiapkan untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Pertama, kualitas manusianya. Kedua, infrastruktur. Ketiga, kualitas kelembagaan, agar profesional dan tidak korup. Keempat, kebijakan pemerintah.

Namun kita perlu tambahkan, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah untuk rakyat. Untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan segelintir orang. Atau elit politik rakus, yang tak berkesudahan. Negeri kaya SDA ini, jangan hanya kaya dalam imaginasi, namun kaya dalam kenyataan. Bukan hanya kaya dalam kata-kata. Tapi harus dinikmati rakyat Indonesia.

Indonesia tahun 2045, bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini, akan menentukan

maju mundur nya bangsa di masa yang akan datang. Momentum Indonesia emas di tahun 2045, jangan dilewatkan begitu saja. Sekali lewat, sulit kita untuk meraihnya.

Partai Golkar memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045. Partai Gerindra memiliki konsep gerakan revolusi putih. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggagas Indonesia hebat. Lalu bagaimana dengan partai-partai lain. Gagasan PDIP tentang Indonesia hebat, harus selaras paralel, dan sejalan dengan Indonesia emas tahun 2045.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi untuk Pemilu 2019. PDIP memiliki peran yang signifikan untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Tentu PDIP tidak bisa sendirian. Harus juga berkoalisi, dan dibantu oleh partai-partai lain, yang memiliki visi yang sama dalam pembangunan Indonesia.

Gagasan Indonesia hebat, sejatinya harus bertransformasi menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah menjatuhkan pilihannya kepada PDIP, jangan disia-siakan begitu saja. Buatlah rakyat bangga. Buatlah rakyat sejahtera. Buatlah rakyat menjadi tuan di negerinya sendiri.

Sebagai partai yang mendeklarasikan diri sebagai partai wong cilik (Komarudin, 2016: 205). Mengangkat harkat dan martabat rakyat miskin adalah keharusan. Menjadikan Indonesia hebat, adalah salah satu jalannya. Menjadikan Indonesia emas di tahun 2045, harus menjadi perjuangannya. Dan menjadikan Indonesia berperadaban adalah niat baiknya. Niat itu harus kita dukung. Termasuk niat partai-partai lain yang ingin menjadikan Indonesia besar dan jaya.

Partai-partai lain juga harus sudah mempersiapkan konsep, ide, dan gagasan, untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Partai

yang diam, tak bergerak, akan mati terkubur. Partai yang progresif, kreatif, dan inovatif, serta mempersiapkan gagasan terbaiknya, akan menjadi partai yang unggul.

Partai-partai politik harus menjadi garda terdepan, dalam mempersiapkan diri menuju Indonesia emas 2045. Dengan cara mempersiapkan kader-kader terbaiknya, untuk menempati jabatan-jabatan strategis, baik di eksekutif maupun legislatif. Jika partainya loyo, maka loyolah bangsa ini. Jika partainya rusak, maka rusaklah bangsa ini. Dan jika partainya hebat, maka hebatlah bangsa ini.

Bukan sesuatu yang mustahil menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Asalkan kita mau. Pasti kita mampu. Semua bergantung kepada kita, sebagai rakyat Indonesia. Kuncinya kerja keras. Ya, kerja keras. Tak mungkin bangsa ini dibangun dengan malas-malasan dan kecurangan. Indonesia emas 2045 akan menemukan jalannya. Ya, akan menemukan jalannya. Jalan bagi kita yang sungguh-sungguh untuk meraihnya.

Pileg Yes Pilpres No

Bagi sebagian partai politik. Partai lama atau baru. Pemilu 2019 merupakan Pemilu terberat. Karena Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan secara serentak, pada 17 April 2019. Pemilu yang dilaksanakan bersamaan, membuat partai politik harus memilih. Apakah ingin menang di Pileg. Atau berkonsentrasi di Pilpres.

Pileg dan Pilpres sama pentingnya bagi semua partai politik. Menang di Pileg ya harus. Dan menang di Pilpres juga wajib. Namun jika kalah di kedua ajang tersebut, maka partai politik bisa terkubur. Mati akibat ulahnya sendiri, yang tidak siap bertarung di pesta demokrasi tahunan terbesar di nusantara ini.

Bagi partai politik tertentu, mereka akan berkata: Pileg yes. Dan Pilpres no. Sebab Pileg adalah hidup mati partai-partai politik. Kalah di Pileg dan tidak lolos *Parliamentary Threshold* (PT) 4% berarti kiamat. Karena tidak lolos ke Senayan dan tidak akan bisa ikut kontestasi politik di Pemilu berikutnya. Partai yang terlalu fokus di Pilpres, dan melupakan Pileg, bisa ter-delete dalam percaturan politik Indonesia.

Karena tidak mau kalah di Pileg. Dan tidak mau partainya hancur lebur. Pilpres menjadi “no”, selain karena tidak berdampak

elektoral, terhadap partai-partai politik tertentu. Pilpres juga memecah perhatian dan konsentrasi partai politik. Jika sibuk di Pilpres, maka Pileg akan terbengkalai dan kalah. Oleh karena itu, pilihan Pileg “yes” adalah pilihan rasional dan wajar. Dan menjadikan Pilpres “no” adalah bukan merupakan perbuatan kurang ajar.

Partai-partai yang galau, biasanya datang dari partai-partai yang tergabung di kubu oposisi (Prabowo-Sandi). Galau karena selain logistik yang kurang, juga kerena akses kekuasaan juga hilang. Sebut saja seperti Demokrat yang main dua kaki, PAN yang ingin berfokus di Pileg, dan PKS yang mengancam akan mematikan mesin partainya di Pilpres, jika kadernya tidak dijadikan wakil gubernur DKI Jakarta, pengganti Sandiaga Uno.

Cenderung hanya Gerindra, partai di kubu oposisi yang semangat di Pilpres. Namun juga oke di Pileg. Bagi Gerindra, baik Pileg, ataupun Pilpres. Keduanya sangat penting. Karena jika pun di Pilpres kalah, maka Gerindra sudah masuk dan menerobos masuk dua besar teratas calon partai pemenang Pemilu legislatif 2019.

Namun bagi Demokrat dan PAN, Pilpres tidak menguntungkan. Pilpres hanya akan menguntungkan Gerindra. Capresnya dari Gerindra, Cawapresnya dari Gerindra. Tim suksesnya banyak dari Gerindra. Otomatis Demokrat dan PAN tidak mendapat efek apa-apa dari pengusungan Prabowo-Sandi di Pilpres.

Jika Demokrat dan PAN tidak fokus dan konsentrasi penuh di Pileg, maka bisa saja dikalahkan oleh partai-partai baru. Oleh karena itu, bagi Demokrat dan PAN, Pileg adalah harga mati. Pileg adalah wajib, sedangkan Pilpres itu sunnah. PKS main di tengah, Pileg yes, Pilpres juga masih oke.

Di koalisi Jokowi-Ma'ruf juga hampir sama. Partai seperti PPP dan Hanura, menjadi partai yang harap-harap cemas menanti hasil Pemilu 2019. Begitu juga partai-partai baru yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. PPP dan Hanura sesungguhnya sedang gelisah. Namun kegelisan tersebut tidak muncul ke permukaan.

Gelisah karena konflik terus menerus muncul. Dan gelisah karena hasil survey lembaga-lembaga survey yang kredibel, menempatkannya masuk jajaran partai yang disebut "Nasakom", nasib satu koma. Artinya hasil survey beberapa lembaga menempatkan PPP dan Hanura mendapat suara di bawah 4%. Artinya PPP dan Hanura bisa terancam tidak masuk Senayan. Nasdem yang walaupun surveynya masih di bawah. Nasdem berpeluang lolos ke Senayan. Logistik banyak, artis bejibun, dan didorong kekuatan kekuasaan.

Bagi PPP dan Hanura, masih tetap memadukan Pileg dan Pilpres sebagai kekuatan untuk memenangkan partai dan calon persidennya. Masih berjargon, Pileg yes dan Pilpres yes. Namun dengan hati galau. Galau jika di Pilpres menang, namun di Pileg kalah. Karena akan menjadi partai yang dilupakan dalam sejarah. Percuma Pilpres menang, jika partainya kalah dan tidak lolos ke Senayan.

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai bergambar banteng milenial dengan mulut moncong putih, pimpinan Megawati tersebut, sangat optimis menatap Pileg dan Pilpres serentak 2019. Bagi PDIP, Pileg yes dan Pilpres juga yes. Menang di Pileg menjadi wajib. Dan menang di Pilpres juga menjadi keharusan. Namun seperti yang dibahas Cornelis Lay, yang mengutip Magenda, menegaskan keharusan PDIP untuk menuntaskan tiga masalah utama: kejelasan orientasi partai, regenerasi, dan penataan partai (Lay, 2010: 256).

Tak ada kata “sunnah” bagi PDIP dalam Pemilu 2019 kali ini. Baik Pileg ataupun Pilpres wajib dimenangkan. Kalah di salah satunya merupakan kerugian. Jadi harus menang di kedua-duanya. Menang di Pileg menjadi enak. Dan menang di Pilpres juga menjadi asyik. Kemenangan di Pileg dan Pilpres harus diperjuangkan dan diusahakan.

PDIP harus belajar dari Pileg 2014 yang lalu. Walaupun PDIP berhasil menjadikan kadernya Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 dan pemenang Pemilu di 2014, namun PDIP tidak mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Kursi Ketua DPR RI diambil oleh Partai Golkar yang suaranya berada di bawahnya.

PDIP tentu tidak mau hal tersebut terjadi lagi di Pemilu 2019 nanti. Menang di Pileg. Artinya harus menguasai dan menduduki, bahkan harus merebut kursi Ketua DPR RI. Dan menang di Pilpres. Artinya akan semakin banyak lagi kader-kadernya yang akan mengisi kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Jadi menang di Pileg yes. Dan menang di Pilpres juga yes. Kemenangan di Pileg dan Pilpres akan mengokohkan PDIP, sebagai partai yang mendapat amanah dan mandat rakyat Indonesia, untuk memimpin dan mengurus negara hingga lima tahun ke depan. Dan jangan sampai disia-siakan amanah yang sedang, telah, dan akan diberikan.

PDIP merupakan partai yang konsen terhadap nasib wong cilik. Jika di 2019 menang lagi, tentu jangan sampai melupakan wong cilik tersebut. Realisasikan dan implementasikan janji yang sudah dan sedang diberikan. Jaga kepercayaan rakyat, niscaya kemenangan akan datang dan menghampiri.

Jika dilihat dari hasil survey terbaru, PDIP patut berbangga. Namun juga harus tetap rendah hati. Karena PDIP akan menjadi juara. Selalu nomor satu. Selalu teratas dalam hasil survey di

beberapa lembaga survey. Artinya rakyat masih menginginkan PDIP menang. Rakyat masih menginginkan PDIP berkuasa. Namun jika berkuasa, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa kepada rakyat yang sudah memilihnya.

Bagi PDIP, Pileg yes dan Pilpres no tidak berlaku. Bagi PDIP, Pileg yes dan Pilpres juga yes. Pileg dan Pilpres harus diperjuangkan. Harus ditaklukan. Dan harus dimenangkan. Menang keduanya merupakan keniscayaan. Dan berjuang untuk salah satunya adalah pengkhianatan. Kemenangan akan memuluskan PDIP, dalam merealisasikan dan mengimplementasikan Indonesia hebat. Indonesia jaya, Dan Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Akankah PDIP menang Pemilu 2019.

Pilpres yang Membuat Stres

Pemilihan presiden (Pilpres), sejatinya menjadi ajang kompetisi demokrasi yang menyenangkan, membahagiakan, dan mencerahkan. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut, hari demi hari, malah membuat kita stres, tertekan, unhappy, was-was, saling curiga, dan memakan korban. Esensi demokrasi menjadi hilang. Yang muncul ke permukaan adalah kekejaman.

Warga Sampang adalah korbannya. Subaidi tewas ditembak oleh Idris, hanya gara-gara beda dukungan dalam Pilpres. Ya, hanya karena beda dukungan. Nyawa jadi melayang. Demi dukung mendukung salah satu kubu, Subaidi diterjang timah panas oleh sesama warga Madura lainnya. Dimulai dari saling sindir di dunia maya, dilanjutkan di dunia nyata, sekali dor nyawa Subaidi tak tertolong.

Pilpres bukanlah ajang adu jotos, sindiran, nyinyiran, hinaan, dan pembunuhan antar sesama pendukung. Namun Pilpres harus mencerahkan, memberdayakan, mempersatukan, mengasihi, menyayangi, dan saling mencintai. Pilpres merupakan momentum untuk memperbaiki bangsa ke depan.

Kejadian pembunuhan karena beda dukungan, harus menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Jangan dipolitisir. Jangan

korbankan rakyat, hanya karena persaingan dalam Pilpres. Kita ini bersaudara. Bersaudara sesama anak bangsa. Menjaga *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan bangsa), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan umat manusia), jauh lebih penting dari sekedar adu otot yang berujung hilangnya nyawa.

Lantas, serendah itukah nilai kita sebagai manusia yang bersaudara. Sekejam itukah kita sebagai warga negara. Sebiadab itukah kita sebagai rakyat biasa. Dan sesadis itukah kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Walaupun bukan kita yang melakukan kekejian tersebut. Namun semua itu adalah pembelajaran bagi kita dalam berdemokrasi. Agar jangan mudah tersinggung. Berbeda pendapat itu hal biasa. Dan yang terpenting adalah, menjaga persaudaraan lebih penting dari apapun.

Demokrasi bukan untuk saling kecam, dan berargumen yang tanpa dasar. Bukan berdebat yang tak sesuai fakta. Bukan adu nyinyiran yang bisa menghilangkan nyawa. Bukan saling fitnah, yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Bukan saling menyakiti antar sesama warga negara. Dan bukan untuk menunjukkan siapa kita dengan segala keangkuhan. Lalu menafikan dan menghinakan yang lain.

Demokrasi merupakan jalan. Jalan untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Jalan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Jalan untuk sama-sama berjuang, untuk saling menghormati dalam perbedaan. Baik dalam perbedaan warna kulit, suku, ras, golongan, bahasa, agama, maupun soal perbedaan dukungan dan pilihan dalam Pilpres.

Perbedaan itu rahmat. Dan perbedaan juga merupakan *sunnatullah*. Kita diciptakan oleh Allah SWT dengan konstruksi masyarakat yang berbeda-beda dan heterogen. Dan sejatinya,

perbedaan dalam alam demokrasi harus menjadi perekat dalam persatuan, persaudaraan, dan keyakinan.

Jangan hanya gara-gara beda kubu, beda dukungan dan pilihan dalam Pilpres, kita saling menyakiti, tak bertegur sapa, saling fitnah, saling dendam, saling provokasi, saling melukai, hingga saling bunuh. Kemanakah karakter asli kita sebagai bagian dari bangsa Timur dan bangsa yang agamis.

Apakah karakter sisi baik bangsa ini telah luntur. Kita bangsa Timur, yang selalu mengedepankan budaya kesopanan, kesantunan, saling tegur, salam, sapa, saling menghargai, menghormati, saling mengingatkan, membantu, menolong, menguatkan, gotong-royong, dan bersama saat suka maupun duka. Bukan pengikut budaya vandalisme.

Jangan hanya gara-gara Pilpres, korban nyawa berjatuhan. Pilpres jangan membuat kita stres. Tapi Pilpres harus membuat kita *fresh* (segar). *Fresh* dalam ide, gagasan, pemikiran, visi, dan misi, sehingga Pilpres diisi, diwarnai, dan dihiasai dengan hal-hal yang positif, demi perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Persatuan dan kesatuan lebih penting dari sekedar Pilpres. Pilpres penting karena untuk mencari pemimpin yang terbaik. Namun Persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan lebih penting dari apapun. Ya lebih penting dari apapun. Untuk apa ada Pilpres, jika kita saling mendendam dan terpecah belah. Pilpres merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk mempersatukan. Untuk mengubah keadaan. Untuk saling membangun. Dan untuk saling memberdayakan.

Partai-partai pengusung dan pendukung dalam Pilpres juga jangan berdiam diri. Jangan sibuk soal hiruk pikuk perebutan kekuasaan semata. Namun lupa berbuat untuk rakyat. Partai-partai harus berbuat, agar kejadian pembunuhan di Sampang yang

disebabkan beda dukungan jangan terulang. Kejadian di Sampang Madura tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa sekeras apapun pertentangan. Harus diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan diselesaikan dengan pistol.

Visi kesejahteraan Partai Golkar 2045 tak akan terlaksana, jika persatuan tak dijaga. Karena kesejahteraan akan terealisasi, jika kita bersatu (Tim Golkar, 2014). Restorasi Partai Nasdem, juga tak akan berarti dan bermakna, jika tanpa kesatuan. Revolusi putih Partai Gerindra juga tak akan terimplementasi, jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Dan gagasan Indonesia hebat yang diusung PDIP bisa terlaksana, jika kita bergotong royong dan bahu membahu untuk meraihnya.

Kirab kebangsaan yang di-*launching* oleh PDIP, sepertinya merupakan bagian dari salah satu ikhtiar untuk merealisasikan Indonesia hebat itu. Partai politik memang harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan gagasan itu, sudah dimulai oleh PDIP sebagai partai berkuasa saat ini (*the ruling party*). Partai harus mengingatkan warga negara tentang keutuhan kolektif, dan partai harus menyesuaikan keinginannya dengan kebutuhan masyarakat, dan jika perlu meminta pengorbanan demi kepentingan masyarakat (Budiardjo, 1982: 62).

Semangat kebangsaan memang harus tetap dijaga. Agar setajam apapun perbedaan, sehebat apapun pertentangan, dan sekuat apapun loyalitas dukungan terhadap capres dan cawares, tidak membuat kita untuk saling menyakiti. Apalagi sampai membunuh sesama anak bangsa.

Sebagai partai yang berjiwa kebangsaan. Berrohkan nasionalisme. Bernafaskan gotong royong. Dan pendukung wong cilik. Bukan wong licik. PDIP sejatinya harus menjadi partai terdepan dalam menyuarkan keadilan, kebersamaan, persatuan,

persaudaraan, dan keakraban. Agar kasus pembunuhan yang disebabkan beda dukungan di Pilpres, tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Partai-partai lain pun sama, jangan mau ketinggalan. Jangan hanya sibuk mengurus Pileg dan Pilpres. Kasus berdarah yang mengakibatkan kematian di Sampang tersebut, luput dari perhatian. Jika ingin mendapat simpati rakyat, maka partai-partai juga harus simpati terhadap penderitaan rakyat. Partai yang tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat, akan dijauhi dan tidak akan dipilih.

Kematian warga Sampang, harus menjadi momentum membangun kesadaran bersama. Bahwa apa yang dilakukan di tingkat elit, akan pula ditiru dan diikuti oleh masyarakat kelas bawah. Jika elitnya saling serang, menyalahkan, memfitnah, memprovokasi, mengadu domba, maka tingkah-polah rakyat kelas bawah pun akan sama.

Oleh karena itu, stop kampanye hitam. Stop saling memfitnah. Stop saling menyalahkan. Dan stop saling menjatuhkan. Mari bangun kesadaran bersama, untuk membangun bangsa ke depan. Sehingga apapun pilihan kita dalam Pilpres, tidak membuat kita saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga perpecahan dan pembunuhan akan terhindarkan.

Pilpres jangan membuat kita sampai stres. Nikmati kontestasi Pilpres dengan santai. Tak perlu buang waktu, tenaga, dan biaya untuk menjatuhkan pihak lawan. Bukan kah Pilpres, merupakan ritual rutin pesta demokrasi lima tahunan, yang harus dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Layaknya sebuah pesta, pesta demokrasi Pilpres juga harus dirayakan dengan penuh keceriaan, kesenangan dan kebahagiaan.

Siapakah Pemenang Pileg 2019?

Pemilu 2019 merupakan salah satu Pemilu terkompleks di dunia. Pada Pemilu 2019 nanti, akan dilaksanakan serentak, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ya, Pileg dan Pilpres akan dilakukan secara bersama-sama, pada 17 April 2019. Pilpres lebih gegap-gempita, hiruk-pikuk, dan rame, dengan persaingan dua kubu, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Namun Pilpres terkesan adem ayem, sepi, seolah tak ada bunyinya. Pileg nyaris tak terdengar.

Pilpres penting. Namun Pileg juga tidak kalah pentingnya. Pileg yang sepi publisitas, terkesan menyimpan bara persaingan di belakang layar. Pileg yang seolah tak bernyawa, sesungguhnya sedang menyimpan bara. Pileg yang terkesan diam. Namun mencekam. Karena Pileg bisa menjadi kuburan, bagi partai-partai yang malas berjuang dan tidak lolos *Parliamentary Threshold* (PT) 4%.

Sesungguhnya, baik partai lama, maupun partai baru. Yang sedang menghuni Senayan. Ataupun pendatang baru. Sedang gelisah menunggu nasib. Nasib, apakah akan bisa tetap eksis dan narsis. Atau mati terhempas ganasnya persaingan dalam Pemilu.

Bagi partai-partai yang sudah mapan pun, Pemilu 2019 bisa menjadi neraka. Apalagi bagi partai-partai *new comer*.

Partai lama yang masih eksis, yang diprediksi beberapa lembaga survey, akan lolos ke Senayan, jumlahnya tidak banyak. Sebut saja, ada PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB. Sedangkan PKS, Partai Nasdem, PPP, Hanura, PAN harus berjuang mengamankan agar bisa lolos PT. PKS, Nasdem, dan PAN bisa saja lolos. PKS memiliki kader yang solid. Nasdem memiliki banyak artis dan kepala daerah. Dan PAN, berbasis akar rumput warga Muhammadiyah.

Sedangkan partai baru, yang selalu eksis di media adalah Perindo. Dan Perindo bisa saja lolos ke Senayan. Asalkan seluruh caleg-calegnya maksimal berjuang di lapangan. Serangan udara Perindo, harus didukung dengan serangan darat. PSI menjadi partai yang sedikit kontroversi. Namun selalu aktif di media sosial. Partai yang diisi oleh anak-anak muda tersebut, bisa saja tidak lolos ke Senayan. Kecuali jika didorong oleh kekuasaan.

PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya akan sulit menembus PT 4%. Sangat berat bagi PBB untuk lolos PT. Namun di politik tidak ada yang tidak mungkin. Jika para kadernya solid, maksimal berjuang, dan penuh semangat untuk bisa lolos ke Senayan, maka bukan sesuatu yang mustahil, jika PBB bisa menduduki Senayan lagi.

Partai Berkarya, walaupun diisi oleh keluarga besar cendana. Akan berat dan sulit untuk menembus dan lolos ke Senayan. Menjual kesuksesan Orde Baru (Orba) adalah jargonnya. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun kesuksesan Orba “ala” Partai Berkarya, tidak akan terlalu laku untuk dijual kepada masyarakat masa kini.

Telah terjadi proses pertumbuhan partai politik. Dan seperti dikatakan oleh (Huntington, 2004: 489-499). Proses perkembangan dan pertumbuhan partai politik melalui empat cara, yaitu faksionalisme, polarisasi, ekspansi, dan institusionalisasi.

Pilpres 2014 dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan sepertinya arah angin kemenangan Pileg 2019, juga akan tertuju dan menuju ke PDIP lagi. Dari hasil survey beberapa lembaga, menempatkan PDIP selalu yang teratas. Number one. Menjadi juara. Dan tertinggi hasilnya surveynya, jika dibandingkan dengan partai peserta Pemilu 2019 lainnya.

Hasil survey memang sifat hanya prediksi. Namun prediksi tersebut, akan benar apa adanya jika dilakukan dengan objektif. Dan bisa dipertanggung jawabkan. Tingginya hasil survey PDIP, jangan membuat kader partai terlena. Lalu diam, tidak mau bergerak, dan berjuang menyapa dan mendekati masyarakat.

Survey yang tinggi, jangan membuat PDIP, sombong dan besar kepala. Namun harus lebih rendah hati, dalam menjalankan amanah rakyat. Kemenangan yang sudah di depan mata, jangan sampai lepas, hilang, dan menjauh, apalagi sampai dikalahkan oleh partai-partai lainnya.

Partai politik didirikan, memang untuk mendapat dan mengejar kekuasaan, dengan cara konstitusional. Begitu juga dengan PDIP. Sah dan wajar bagi PDIP, jika ingin menang lagi di Pemilu 2019. Karena dengan kemenangan, akan membuka jalan bagi kontinuitas pembangunan yang sedang dijalankan.

Hanya dengan kemenangan, PDIP akan dengan mudah untuk membangun bangsa. Hanya dengan kemenangan, PDIP bisa menjadi leader untuk menjaga NKRI. Hanya dengan kemenangan, bangsa ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik.

Dan hanya dengan kemenangan, PDIP dapat melaksanakan janji-janjinya, yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Dengan kemenangan, PDIP juga akan menjadi sejarah. Sejarah panjang partai, yang berjuang untuk rakyat. Sehingga rakyat memilihnya. Rakyat tak akan memilih PDIP, jika PDIP jauh darinya. Rakyat tak akan simpati kepada PDIP, jika PDIP tak pernah memperjuangkan nasibnya. Dan rakyat tak akan suka kepada PDIP, jika PDIP mengingkarinya.

Kemenangan berturut-turut di Pileg (2014 dan 2019), sangat penting bagi PDIP. Bukan hanya akan mentahbiskan PDIP sebagai partai yang dicintai, disayangi, dan mendapat simpati rakyat. Tetapi juga akan mengokohkan PDIP menjadi partai besar di Indonesia. Namun kemenangan yang diperoleh PDIP, harus membawa kebaikan bersama.

Perjuangan dan kerja keras kader di bawah. Akan menentukan apakah PDIP, akan memenangkan pertarungan di Pemilu 2019 atau tidak. Karena sejatinya, tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Dan tak ada kemenangan tanpa soliditas.

Kemenangan akan didapatkan, bagi mereka yang mau mengusahakannya. Pemilu 2019 yang hanya menyisakan waktu, kurang lebih lima bulan lagi. Jangan membuat PDIP kendor dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Dan jangan sampai berhenti bergerak, sampai kemenangan itu didapatkan di hari pencoblosan. Sekali saja lengah, maka kemenangan bisa hilang.

PDIP merupakan salah satu partai, yang menatap Pemilu 2019 dengan optimistis. Di saat partai-partai lain, suaranya turun dan terancam tidak lolos ke Senayan. PDIP suaranya naik. Bisa karena efek Jokowi yang menjadi capres. Dan bisa juga karena hasil kerja keras, para kadernya, dalam membesarkan dan memenangkan partai.

Hasil survey tertinggi dan teratas, merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh seluruh kader PDIP. Besarnya dukungan rakyat, akan juga menuntut tanggung jawab. Kemenangan memang nikmat. Karena akan mendapat kekuasaan. Namun bagaimana kemenangan yang akan diraih PDIP di 2019 nanti, bisa membawa maslahat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Ulama, Rakyat, dan Demokrasi Lima Tahunan

Ada yang menarik dari hasil survey LSI Denny JA, tentang ulama dan efek elektoralnya. Seperti kita ketahui, ulama merupakan figur atau tokoh agama yang dihormati, dikagumi, dicintai, dan petuahnya diikuti dan dituruti oleh masyarakat Indonesia. Ucapan, perilaku, dan telunjuknya ditaati, bukan hanya oleh santrinya. Tetapi juga oleh masyarakat luas.

Ada lima ulama di republik ini, versi LSI Denny JA yang popularitas, tingkat kesukaan, dan kemampuan mempengaruhi atau himbauannya didengarkan oleh masyarakat. Mereka adalah Ustad Abdul Somad (UAS), Ustad Arifin Ilham (UAI), Ustad Yusuf Mansur (UYM), Ustad Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), dan Ustad Habib Rizieq Shihab (HRS).

Popularitas, tingkat kesukaan, dan himbauan kelima ulama tersebut, merata di hampir semua segmen masyarakat yang memiliki hak pilih; yang berpendidikan tinggi dan rendah, yang berpendapatan tinggi dan rendah, milenial dan lansia, segmen pemilih partai, dan capres. Karena pengaruhnya yang besar, terkadang ulama menjadi rebutan. Rebutan bagi capres dan juga partai politik.

Ulama memang bukan sembarang manusia. Walau bukan manusia suci. Tapi mereka pewaris para Nabi. Ya, pewaris para Nabi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “Al-Ulamu Waratsatul Anbiya”. Dan “sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah Ulama” (QS. Fathir: 28). Keilmuannya mumpuni. Perkataan dan perilakunya diikuti. Dan ketokohnya teruji dan diakui.

Ulama seperti Amien Rais, Salahuddin Wahid, Ustad Al-Khaththath, Din Syamsudin, dan ulama-ulama lainnya, bukan berarti mereka tidak hebat. Mereka adalah ulama-ulama hebat yang dimiliki bangsa ini. Mereka yang tidak masuk lima besar, versi survey Denny JA, karena tingkat pengenalan, kesukaan, dan tingkat pengaruhnya kurang dari yang telah ditentukan.

Seperti tingkat pengenalan harus di atas 40%, tingkat kesukaan di atas 50%, dan kemampuan mempengaruhi dan didengar harus di atas 15%. Amien Rais tidak masuk lima besar, hanya kurang di tingkat mempengaruhi 9.4%, sedangkan untuk tingkat popularitas tinggi 83.1%, dan tingkat kesukaan 57.2%. Begitu juga dengan ulama-ulama lainnya. Kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh LSI Denny JA.

Rakyat atau pemilih, suka dan cinta pada ulama yang ‘alim, berwawasan luas, dalam ilmu agama dan pengetahuan umum, memiliki pesantren, memiliki jaringan bisnis untuk membangun ekonomi ummat, bisa memberi solusi atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, dan tentu bersikap dan berperilaku baik. Bisa menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah.

Dari kelima ulama di atas, UAS memiliki tingkat pengaruh yang paling tinggi dengan 30.2%, kemudian UAI 25.9%, UYM 24.9%, Aa Gym 23.5%, dan HRS 17.0%. Jika digabungkan pengaruh mereka mencapai 51.7%. Sedangkan tokoh lain hanya

mencapai 23.6%. Jika berkaca dan mengacu pada hasil survey tersebut, maka pengaruh kelima tokoh tersebut akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat.

Masyarakat Indonesia sangat agamis, tidak aneh jika petuah ulama diikuti dan dituruti. Dan sebagian masyarakat, terutama kaum santri, apa yang diucapkan ulama akan didengar dan ditaati. “Samina wa athona”, kami mendengar dan kami taat. Ulama panutan akan digugu dan ditiru. Kalamnya menjadi pencerahan. Tindakannya menjadi acuan. Dan ilmunya menjadi rujukan.

Ulama yang menjadi rujukan masyarakat bukan sembarang ulama. Tetapi ulama yang hebat secara pemikiran, halus dalam bertutur kata, sopan dalam berperilaku, ikhlas dalam berdakwah, objektif dalam menilai, dan membumi dalam bergaul.

Jika kita petakan dari pengaruh kelima ulama tersebut. Pemilih atau masyarakat yang manut kepada petuah UAS dan HRS akan memilih Prabowo-Sandi. Dan pemilih yang taat kepada perintah UAI, UYM, dan Aa Gym akan memilih Jokowi-Ma’ruf. Wajar jika pemilih Prabowo-Sandi datang dari pemilih yang terpengaruh UAS dan HRS. Karena kita tahu, UAS sempat diusulkan menjadi cawapresnya Prabowo. Namun tidak jadi. Dan HRS juga merupakan ulama oposan Jokowi.

Hal yang tidak aneh juga, jika pemilih yang mengikuti perintah UAI, UYM, dan Aa Gym akan memilih Jokowi-Ma’ruf. Karena ketiga ulama tersebut ada di tengah, dan berada di jalur dakwah. Lebih mementingkan kesatuan umat, bangsa, dan negara. Lebih dari soal dukung mendukung capres dan cawapres. Posisi netral ketiga ulama tersebut, membuat umat nyaman mendukung Jokowi.

Perintah atau telunjuk ulama, akan turut menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di 2019

nanti. Jika pemilih loyal, manut terhadap UAS dan HRS akan memilih Prabowo-Sandi. Dan petuah dan kalam UAI, UMY, dan Aa Gym akan memilih Jokowi-Ma'ruf. Maka 58.7% akan didapat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi 29.3%. Artinya Jokowi-Ma'ruf masih unggul dari Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf juga unggul di pemilih yang menyatakan dan mendasarkan himbuan tokoh lain (seperti politisi, pengamat, pengusaha, akademisi kampus, aktivis LSM, artis terkenal, dll) sebesar 57.3%. Sedangkan Prabowo-Sandi akan dipilih oleh sebanyak 31.6% pemilih.

Jika kita tarik kewilayah Pileg, maka hanya PDIP dan Partai Gerindra yang akan mendapatkan keuntungan elektoral dari persaingan kedua kubu tersebut. PDIP diuntungkan karena masyarakat, tahunya Jokowi adalah kader PDIP. Dan wajar juga jika PDIP menempati hasil survey teratas, dan diprediksi akan menang Pileg 2019 nanti.

Keberhasilan Jokowi dalam memimpin pemerintahan akan membawa keuntungan bagi PDIP. Begitu juga sebaliknya. Jika Jokowi dianggap gagal dalam memerintah, maka PDIP bisa disalip oleh partai lain. Keberhasilan Jokowi dalam memimpin negara, akan berkorelasi positif dengan kemenangan PDIP di Pileg.

Kelima ulama hebat tersebut dan ulama-ulama yang lainnya, tentu akan jadi incaran dan rebutan para kandidat capres dan cawapres. Begitu juga dengan ulama, yang tidak masuk lima besar, politisi, pengamat, pengusaha, akademisi kampus, aktivis LSM, akan turut serta ambil bagian dalam mempengaruhi pemilih, dengan pernyataan-pernyataan dan keahliannya masing-masing.

Sepertinya Jokowi dan PDIP, lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi kontestasi pesta demokrasi lima tahunan, jika dibandingkan Prabowo-Sandi. Pilpres 2014 yang ketika itu,

pasangan Jokowi-JK, di mana Jokowi hanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, mampu mengalahkan Prabowo-Hatta yang didukung banyak partai. Apalagi saat ini, Jokowi sebagai petahana. Tentu lebih siap dan lebih kuat. Namun di politik apapun bisa terjadi. Prabowo-Sandi bisa saja membalikan keadaan.

Adu Kuat Jokowi versus Prabowo

Pemilu hanya tinggal 133 hari lagi. Hari pencoblosan, yang menentukan Indonesia lima tahun ke depan, itu semakin dekat. Persaingan antar sesama kandidat capres dan cawapres pun semakin seru, panas, dan mendebarkan. Masing-masing ingin menang, walaupun harus sikut-sikutan, melakukan hujatan, kebencian, dan dendam.

Panasnya Pilpres, bukan hanya karena dua pasang capres dan cawapres yang berhadap-hadapan, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Tetapi Pilpres 2019 adalah rematch. Pertandingan ulang, Pilpres 2014, yang mempertemukan Jokowi versus Prabowo. Jokowi-Ma'ruf akan bertahan untuk menjaga singgasana kekuasaannya. Dan untuk menang lagi. Sedangkan Prabowo akan bermain habis-habisan dan ofensif, layaknya gelandang serang, yang siap menjebol gawang lawan.

Reuni alumni 212 kemarin, merupakan bukti betapa kerasnya persaingan itu. Aksi reuni yang damai, tertib, dan aman tersebut, memberi pesan kepada petahana, bahwa Prabowo siap untuk menantang, berjuang, dan menang di Pilpres 2019 mendatang. Perdebatan apakah reuni akbar 212 tersebut, kampanye atau

bukan, ditunggangi atau tidak, yang pasti dan jelas reuni akbar alumni 212, telah menjadi panggung bagi Prabowo.

Prabowo ingin membuktikan, bahwa dia masih kuat, pengikutnya banyak, pemilihnya loyal, pendukungnya solid, dan siap untuk mengambil alih, tongkat kepemimpinan nasional di 2019 secara konstitusional. Karena pra-reuni akbar alumni 212 kemarin. Wacana dan narasi Prabowo dalam berkampanye, selalu mendapat sorotan negatif dari lawan politik. Ucapan tampang Boyolali yang menjadi viral salah satu contohnya. Prabowo merasa sering menjadi korban, dari ganasnya persaingan Pilpres.

Pasca reuni akbar alumni 212, bisa saja istana gelisah dan khawatir. Karena yang dihadapi adalah kekuatan umat Islam. Dan umat Islam tersebut telah menunjukkan, bahwa mereka membawa Islam yang damai, menyejukkan, aman, damai, dan tertib. Massa tersebut ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya bagi Indonesia. Tetapi juga bagi dunia.

Kubu Jokowi-Ma'ruf, tentu menghitung betul kekuatan pertemuan reuni akbar 212 tersebut. Karena bagaimanapun, secara historis, gerakan 212 telah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta. Dan memasukannya ke dalam penjara. Gerakan yang awalnya, menuntut keadilan bagi Ahok untuk dihukum, karena telah menista agama Islam. Bisa saja menjadi gerakan yang mengancam kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Yang hadir di reuni akbar 212 itu, bisa saja merupakan massa yang kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi. Dan simpati terhadap Prabowo-Sandi. Namun yang pasti, kita sebagai anak bangsa jangan terprovokasi. Islam yang damai harus tetap dikedepankan. Dan menjaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan hukumnya wajib dalam Islam.

Seratus tiga puluh hari (133) hari, merupakan waktu yang cukup untuk unjuk adu kekuatan. Adu ide dan gagasan. Adu visi, misi, dan program-program terbaik. Narasi yang dikembangkan capres dan cawapres juga harus mencerahkan, mendidik, memberdayakan, produktif, membawa kebaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Jangan lagi melakukan kampanye-kampanye yang kontra produktif. Di saat bangsa-bangsa lain, telah menjelajah ke luar angkasa. Menikmati kemakmuran sebagai bangsa. Dua kubu capres dan cawapres, masih saling serang, adu nyinyiran, merasa paling benar, disana salah, disini benar.

Merasa paling Indonesia, disini pribumi, disana antek asing, merasa paling pintar, sedangkan kubu lain bodoh, merasa paling hebat dan kuat, sehingga kelompok lain dianggap lemah, merasa terdzolimi, padahal sama-sama saling mendzolimi, dan merasa difitnah, padahal saling fitnah.

Indonesia adalah milik kita bersama. Pilpres hanya sarana untuk mencari dan memilih pemimpin terbaik. Jangan rusak republik ini hanya gara-gara adu kuat dan gengsi dalam perebutan kursi presiden. Sekeras apapun adu kuat, antara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Jangan membuat bangsa ini terpecah.

Menjaga Indonesia lebih penting dari sekedar Pilpres. Pemimpin akan silih berganti. Namun Indonesia harus tetap terpelihara dan terjaga. Adu kekuatan dalam Pilpres, sejatinya bukan untuk saling menjelekan, mencari-cari kesalahan, dan membusuki lawan. Adu kekuatan Prabowo-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi harus menjadi sumber kekuatan. Bahwa kompetisi untuk menjadi presiden dan wakil presiden, silakan dilalui. Namun harus mengutamakan kesejukan, cinta, kasih sayang, dan perdamaian.

Tak mungkin bangsa ini dibangun, dengan narasi saling menjelekan dan menafikan. Tetapi republik ini dibangun, atas

dasar kebersamaan. Kebersamaan sebagai anak bangsa, jauh lebih penting dari sekedar dukung mendukung capres dan cawapres. Pilihan boleh beda. Namun pesaudaraan harus tetap dijaga.

Sesama saudara tidak mungkin saling menyakiti. Sesama anak bangsa, tidak mungkin saling mendzolimi. Kesadaran elit dua kubu yang berseberangan dalam Pilpres, menjadi keniscayaan. Kesadaran untuk berkomitmen membangun kampanye yang damai dan penuh keadaban. Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Venus, 2004: 7).

Kita lihat, strategi apa yang akan dilakukan para tim sukses kedua kubu, untuk memenangkan jagonya masing-masing. Adu kuat Jokowi-MA dan Prabowo-Sandi akan terus terjadi. Tentu persaingan akan semakin keras. Di udara akan ramai dengan perdebatan, antara yang pro dan kontra. Dan di darat akan semakin seru, dengan saling sapa dan tebar pesona ke rakyat untuk menambah dukungan.

Saling gempur antar kedua kubu akan terus meningkat. Apapun strategi yang akan dimainkan dan digunakan oleh kedua kubu, jangan sampai rakyat yang menjadi korban. Rakyat harus dibahagiakan. Bukan untuk dikorbankan. Dan rakyat harus disejahterakan. Bukan untuk dinihilkan dan dinafikan.

Momentum Pilres adalah momentum untuk berkampanye, dengan janji-janji yang dapat terimplementasi. Pilpres juga harus membahagiakan, menyenangkan, dan membanggakan. Momentum adu kekuatan capres dan cawapres, untuk memberdayakan dan mencerahkan. Bukan untuk saling menyingkirkan dan menjatuhkan. Narasi yang dikembangkan dua kubu, haruslah penuh kebaikan. Bukan nyinyiran.

BAB 2
HOAKS PENGHANCUR
SENDI-SENDI BANGSA

Isu PKI Serang Jokowi

Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan isu seksi. Bukan hanya karena PKI merupakan organisasi terlarang di republik ini. Tetapi karena, isu PKI terus menerpa Jokowi sebagai presiden RI. Isu PKI bukan hanya mengganggu Jokowi, tetapi juga mengancam kewibawaan Jokowi, yang sedang maju kembali menjadi capres pada Pilpres 2019.

Sejak tahun lalu, saya sering ditanya oleh para jurnalis, terkait isu apa saja yang akan mengancam Jokowi sebagai incumbent. Waktu itu, sekitar bulan september 2017, saya menjelaskan kepada teman-teman media, bahwa paling tidak ada tiga isu yang akan menyerang Jokowi. Pertama, terkait isu anti Islam. Kedua, isu tenaga kerja asing. Dan ketiga, isu tentang PKI.

Semakin dekat dengan hari pemilihan. Yang hanya menyisakan waktu kurang dari empat bulan lagi. Isu PKI terhadap Jokowi semakin kencang. Dan terlihat semakin masif. Seolah isu PKI terjadi by design. Terlihat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Semakin dekat dengan garis finish waktu pemilihan, semakin dahsyat isu PKI menyerang Jokowi, bagai air bah yang mengalir deras.

Wajar jika Jokowi khawatir. Dan ingin “menabok” orang atau kelompok yang telah menebar fitnah terkait isu PKI

tersebut. Tuduhan yang tidak main-main. Fitnah yang kejam dan menakutkan. Permainan politik yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan demokrasi. Dan serangan efektif, untuk mengalahkan dan menumbangkan sang petahana. Atau paling tidak, untuk men-downgrade sang incumbent.

Karena bagaimana pun, isu PKI terhadap Jokowi, dipercaya oleh 9 juta lebih masyarakat Indonesia. Artinya, tuduhan terkait isu PKI terhadap Jokowi, di yakini oleh kurang lebih 6% oleh penduduk di negeri ini. Ini berbahaya. Tuduhan yang serius. Harus dicounter. Diklarifikasi. Dan dibantah dengan cerdas dan elegan.

Adalah La Nyalla Mattalitti. Tokoh Jawa Timur dan mantan ketua umum PSSI. Eks pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 yang lalu. Yang mengaku, telah menebar fitnah isu bahwa Jokowi adalah PKI. Dan sudah meminta maaf kepada Jokowi.

La Nyalla Mattalitti memang telah menyeberang dan mendukung Jokowi. Yang dulu mendukung Prabowo, menggembosi Jokowi. Kini berbalik arah menyerang Prabowo. Dan sibuk mengklarifikasi tuduhan PKI terhadap Jokowi, yang pernah ia lakukan.

Isu PKI memang harus diklarifikasi. Karena jika tidak, maka akan dianggap sebagai sebuah “kebenaran”. Isu dan tuduhan yang tidak berdasar, akan menjadi kebenaran, jika dihembuskan secara terus menerus. Oleh karena itu, harus dicounter dan diklarifikasi tuduhan serius isu PKI terhadap Jokowi tersebut.

Tak mudah memang untuk mengcounternya. Karena isu PKI tersebut, sudah berhembus sejak Pilpres 2014. Jika pun ada jutaan rakyat Indonesia, yang termakan dan terlanjur percaya atas isu PKI Jokowi, maka tugas tim Jokowi-lah untuk menjelaskan fitnah yang keji terhadap Jokowi itu. Karena jika didiamkan, tuduhan tersebut akan menjadi semakin besar dan akan menjadi sebuah “kebenaran” yang tak terhindarkan. Yang tentu akan merugikan Jokowi sebagai capres petahana.

Fitnah terkadang mewarnai setiap kontestasi politik. Fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan, terkadang dihembuskan sebagai strategi untuk menghancurkan lawan. Politik menjadi rusak karena fitnah. Demokrasi bisa hancur karena fitnah. Dan Indonesia bisa bercerai-berai karena fitnah. Kita sebagai umat yang beragama dan taat pada Pancasila, harus menghindari dan menjauhi fitnah.

Jika suatu masyarakat atau bangsa sudah dipenuhi oleh fitnah, maka tunggulah kehancurannya. Menebar fitnah, tak akan menyelesaikan masalah. Namun akan menambah masalah. Tidak mungkin bangsa ini dibangun atas dasar fitnah. Saling membenci. Dan saling membusuki.

Bangsa ini dibangun dengan visi. Visi besar. Visi yang jauh ke depan. Visi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena bangsa yang tidak memiliki visi, akan menjadi bangsa kerdil dan jahil. Tak tahu arah pembangunan bangsa ke depan. Visi menjadi dasar, pijakan, dan sekaligus cita-cita Indonesia jaya. Kata Franklin D. Roosevelt bahwa bangsa yang tak memiliki visi akan musnah (Purba dan Sumiharti, 2006: 103).

Isu PKI yang menyerang Jokowi. Bukanlah isu murahan. Bukan pula isu recehan. Dan ecek-ecek. Tetapi isu dahsyat, yang bisa merusak elektabilitas Jokowi. Jika kita berpikir dengan jernih dan objektif, maka tak mungkin bangsa ini dipimpin oleh orang yang terlibat dengan PKI. Karena bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

Isu PKI yang menghantam Jokowi. Tidak lain dan tidak bukan. Merupakan isu pilihan. Ya, isu pilihan. Untuk mengganjal Jokowi, agar tidak terpilih kembali menjadi presiden di 2019. Jangan remehkan, isu tuduhan PKI terhadap Jokowi, jika tidak diantisipasi, akan menyakiti dan melukai Jokowi selamanya. Ya, selamanya.

Jika tidak diredam, maka akan menjadi bulan-bulanan, yang akan menerjang dan menggoyang singgasana sang petahana. Agar Jokowi enak tidur, bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dan jika ingin terpilih kembali menjadi presiden, untuk kedua kalinya, maka isu PKI yang menyerang terhadap dirinya, harus diselesaikan. Dituntaskan. Dan dibersihkan.

Stop saling memfitnah. Kompetisi untuk memperebutkan jabatan RI-1 dan RI-2 akan semakin panas. Saling memfitnah bukanlah pilihan. Memfitnah adalah dosa dan merupakan kejahatan. Menghindarinya adalah merupakan suatu kebajikan. Fitnah hanya akan membuat kerusakan dan kehancuran.

Isu PKI memang terlihat seksi. Namun harus dihindari dan dijauhi. Terlebih-lebih yang diserang adalah Jokowi, sang presiden RI. Jika tidak cepat diantisipasi dan diklarifikasi, maka fitnah tersebut akan menjadi-jadi.

Isu PKI adalah pertarungan Jokowi. Menjadikan La Nyalla Mattalitti sebagai tim sukses Jokowi adalah bagian dari strategi. Strategi untuk meredam isu PKI, yang deres menyerang dirinya. Fitnah memang tidak boleh dibalas dengan fitnah. Fitnah harus dibalas dengan senyuman. Dan fitnah pada dasarnya akan kembali kepada orang yang menebarkannya.

Siapa yang tak kesal dan kecewa jika difitnah. Isu PKI yang menerpa Jokowi, bisa saja merupakan fitnah. La Nyalla Mattalitti telah mengakuinya, bahwa dia telah memfitnah Jokowi dengan isu PKI. Siapapun kita. Jangan pernah memfitnah orang lain. Bangun narasi kebaikan. Jangan bangun fitnah dan cacian. Balas fitnah dengan senyuman. Agar bangsa ini aman.

Politik Poligami PSI

Membicarakan poligami tak akan pernah ada habisnya. Isu tersebut sedang dimainkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk meraih simpati. Simpati masyarakat yang anti poligami. Penolakan PSI terhadap poligami, merupakan langkah blunder. Maksud hati ingin mendapat simpati. Namun bisa antipati yang didapat.

PSI sedang memainkan politik poligami. Dan kita tahu, poligami sangat tidak disukai oleh kaum hawa. Namun sangat disenangi kaum adam. Wajar jika kaum emak-emak anti terhadap poligami. Karena poligami dipandang sebagai pengkhianatan sejati, dari kaum laki-laki. Poligami dianggap akan melukai dan akan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Secara sosiologis, kaum emak-emak memang benci terhadap poligami. Namun ada juga yang melakukannya. Banyaknya kaum hawa yang anti dan menolak poligami, menjadi isu menarik yang dijual dan dikampanyekan oleh PSI. Tak ada hujan dan tak ada angin. PSI menolak poligami. Hak PSI untuk menjadikan poligami menjadi komoditas politik. Karena dalam politik, isu apapun bisa dikemas untuk meraih simpati. Termasuk isu poligami.

Penolakan PSI terhadap poligami, tak akan berdampak apapun terhadap elektabilitas partai tersebut. Emak-emak yang

tidak suka terhadap poligami, memang jumlahnya banyak. Tersebar di seluruh nusantara. Tapi mereka belum tentu memilih PSI. Belum tentu membela partai anak muda tersebut. Dan belum tentu bersimpati. Apalagi berharap mencoblos PSI.

Karena bagaimana pun, isu poligami, merupakan isu domain kaum hawa, dari kalangan umat Islam. Tidak terlalu menarik, jika isu poligami menjadi jualan dan kampanye partai nasionalis seperti PSI. Selain karena belum tentu lolos ke Senayan. Tetapi juga karena PSI dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang lebih menarik adalah jika ada partai Islam, yang berani menolak poligami.

Islam membolehkan poligami. Tetapi laki-laki harus adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka tidak boleh. Dilarang keras, jika poligami menjadi alat laki-laki untuk menikah lagi hanya karena mengikuti dan menuruti hawa nafsu, duniawi, dan karena kesenangan belaka.

Menolak poligami sama saja menolak ajaran Islam. Walaupun isu anti poligami disukai ibu-ibu. Namun belum tentu kaum hawa tersebut, simpati terhadap PSI. Sah-sah saja PSI memviralkan dalam menolak poligami. Dan umat Islam pun, suka-suka juga untuk menolak PSI.

Menolak poligami merupakan operasi. Operasi untuk meraih dukungan emak-emak dan kaum milenial. Mana ada emak-emak yang mau dimadu. Dan mana ada kaum milenial yang mau dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat. Jika pun ada, jumlahnya tidak banyak. Dan jika pun ada, pernikahannya lebih pada karena nafsu dan karena harta.

PSI sedang menjalankan kampanye politik modern, cara yang digunakan oleh warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah. Dan PSI juga sedang

menjalankan politik, mencari atau melaksanakan kekuasaan dalam urusan pemerintahan (Steinberg, 1981: 1 dan Agustino, 2005: 126).

Emak-emak dan kaum milenial yang terjebak dan melakukan poligami, biasanya bersifat untuk kesenangan dunia semata. Mereka berpandangan, dari pada berzina, lebih baik kawin siri. Poligami yang hanya karena dunia dan bersifat kebendaan semata, dilarang keras dalam Islam. Karena bukan ketenteraman rumah tangga yang akan didapatkan. Tetapi keributan dan pertengkaran yang akan dirasakan.

Namun poligami yang hanya karena Allah SWT. Dan dilakukan secara adil oleh kaum adam. Sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam. Dilakukan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warrohmah, maka poligami diperbolehkan. Boleh tapi ada syarat-syaratnya yang ketat. Boleh tapi ada ketentuan-ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku.

Politik poligami PSI, tentu tidak bisa dipisahkan dari kampanye Pileg yang sedang dijalani PSI. Kita tahu, menurut beberapa lembaga survey, PSI merupakan salah satu partai peserta Pemilu 2019 yang tidak akan lolos Parliamentary Threshold (PT) 4%. Artinya tidak akan masuk Senayan. Akan ada dipinggiran. Dan sangat menyedihkan.

Oleh karena itu, wajar jika PSI mencari dan membuat isu-isu populer yang disukai oleh sebagian masyarakat. Menolak Perda syari'ah dan menolak poligami, merupakan isu-isu yang dibuat untuk menjadikan PSI bukan hanya sekedar populer. Tetapi juga harapannya, dapat bersaing dengan partai-partai lainnya.

Manuver PSI tersebut, terkadang membuat partai lain jengkel. Partai Golkar, partai yang satu koalisi dengan PSI di kubu Jokowi-

Ma'ruf, bahkan sempat marah, karena menganggap PSI sudah merusak tatanan koalisi yang sudah dibangun bersama. Jig-jag PSI memang membuat partai koalisi Jokowi-Ma'ruf kebingungan. Tapi itu lah politik. Siapapun yang memiliki kesempatan untuk show up, akan memanfaatkan dan menggunakan panggungnya, sebaik mungkin untuk membangun pencitraan.

Walaupun agak ugal-ugalan. Dan cenderung menyalip partai koalisi lain, dalam memainkan isu-isu politik di media. PSI telah melakukan akrobat politik, yang membuat banyak kalangan tersinggung. Akrobat yang terkadang berbahaya bagi elektabilitas partai.

Sepertinya PSI tak peduli dengan pandangan dan penilaian orang lain. Begitu dapat panggung, maka langsung memviralkannya. Begitu dapat kesempatan, langsung memanfaatkannya. Begitu dapat isu seksi, langsung melontarkannya. Tak peduli salah atau tidak. Tak peduli dibenci dan dicaci. Yang penting populer. Dan yang penting tidak terpelanting dari arus besar kekuasaan dan koalisi petahana.

PSI sedang menjajal kehebatannya. Sebagai partai baru, PSI memang harus kreatif dan inovatif. Pilihan bergabung dengan koalisi incumbent. Dan bergerak kampanye di udara via media sosial dilakukan dengan masif.

Apapun motif PSI menolak poligami. PSI ingin tampil beda. PSI ingin menguasai pemberitaan media. PSI ingin terdepan dalam publikasi. PSI tidak ingin kalah dengan partai-partai yang sudah establish. PSI ingin meraih simpati kaum emak-emak dan kaum milenial yang cenderung anti poligami.

Politik anti poligami PSI lumayan seksi. Pro dan kontra akan mewarnai. Poligami tidak dilarang. Tetapi ditentang. Poligami akan tetap menjadi isu yang tak akan pernah mati. Poligami oleh

sebagian orang diamin-i. Namun oleh sebagian lain dikebiri, ditentang, dan ditolak.

Politik anti poligami PSI bisa saja menuai simpati sebagian emak-emak. Namun bisa juga memantik antipati kelompok masyarakat lain. Bagi PSI, anti poligami bisa jadi harga mati. Poligami tidak bisa disalahkan. Poligami jangan ditolak. Yang harus disalahkan dan ditolak adalah pelaku poligami yang tak mampu berlaku adil. Dan berpoligami karena nafsu dan keinginan duniawi.

Gaya Baru Kampanye Pilpres

Lima hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2018. Diujung bulan desember 2018 ini, kita sudah menyaksikan kampanye Pilpres yang cenderung agitatif, reaktif, ofensif, dan tanpa solusi. Narasi yang dikembangkan juga hanya sebatas berbalas kritikan, serangan, nyinyiran, fitnahan, dan saling mem-viralkan kelemahan, kekurangan, dan kebusukan lawan.

Kampanye tak ubahnya nyanyian sumbang, yang tak enak didengar telinga. Dan banyak masyarakat yang mengelus dada. Tanda, tidak menikmati narasi kampanye yang dikembangkan oleh kedua paslon Pilpres, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Kampanye juga layaknya “tong kosong yang berbunyi nyaring”. Tak ada faedah dan hikmah yang didapat masyarakat.

Alih-alih memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan. Namun yang terjadi justru kegaduhan, yang bisa mengarah pada konflik politik yang tak berkesudahan. Saling jual beli serangan dilakukan oleh kedua pasangan kandidat capres, cawapres, dan tim suksesnya. Entah akan sampai kapan metode kampanye tersebut digunakan.

Dipenghujung tahun politik 2018, kita harus introspeksi dan evaluasi diri. Untuk meninggalkan kampanye gaya lama, yang tak beradab dan menafikan nilai-nilai kemanusiaan, serta

menghilangkan nilai-nilai kebenaran. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Namun jika narasi kampanye, masih menggunakan metode lama, yang saling memutar balikan fakta dan keadaan, maka predikat bangsa yang baik tersebut, akan tercabik-cabik.

Kampanye sejatinya mensosialisasikan visi, misi, dan program-program terbaik para kandidat capres dan cawapres agar dimengerti oleh masyarakat, menuai bersimpati, lalu memilihnya dihari pencoblosan. Kampanye Pemilu merupakan instrumen yang sah di mana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti Pemilu itu sendiri, karena Pemilu adalah fondasi kebebasan individu (Stiftung, 2002: 19).

Bukan mensosialisasikan kebencian, makian, intimidasi, dan kekerasan. Bukan juga mengkampanyekan kebohongan dan kesaling curigaan. Tiga bulan lebih kampanye Pilpres berlalu. Namun tak ada yang didapatkan masyarakat. Masyarakat Indonesia masih akan setia menunggu, melihat, dan memperhatikan kampanye yang elegan ke depan.

Januari 2018 merupakan bulan yang tepat untuk berbenah. Membenahi kampanye yang telah merusak realitas keadaban masyarakat, mencederai pesta demokrasi lima tahunan, dan melukai keindahan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan.

Januari bukan hanya karena merupakan awal bulan di tahun politik, yang akan semakin panas dan penuh kejutan. Dan bukan juga karena akan terjadi pertanda dimulainya musim hujan. Namun januari 2019, menyimpan harapan. Harapan untuk berkampanye agar lebih sopan dan elegan, yang bisa menghasilkan kedamaian dan kenyamanan.

Berkampanye bukan untuk saling membenci. Bukan pula untuk saling bermusuhan. Apalagi hingga saling mendendam.

Kampanye hanya sarana untuk meraih simpati pemilih. Simpati akan didapatkan dan diterima oleh paslon capres dan cawapres, yang menarasikan kebaikan. Bukan menarasikan nyinyiran.

Januari merupakan bulan yang tepat untuk melakukan kampanye gaya baru (*new style*). Kampanye yang bukan hanya menekankan substansi, kualitas, dan isi. Tetapi juga berkampanye, dengan cara-cara kreatif dan inovatif. Sehingga masyarakat bukan saja akan menerima kampanye yang berbobot. Tetapi juga akan senang dan riang gembira, dengan atraksi-atraksi kampanye yang dikembangkan oleh kedua calon capres dan cawapres.

Kampanye gaya baru yang diciptakan, sejatinya untuk menangkal dan menghilangkan gaya kampanye lama yang penuh horor dan nyinyiran. Sehingga, metode dan model kampanye gaya lama, yang ngeri-ngeris sedap dan menakutkan terhenti di desember ini.

Januari harus menjadi bulannya kampanye kreatif, inovatif, dan penuh substansi. Bukan hanya karena KPU, sudah menjadwalkan debat capres dan cawapres secara formal. Tetapi kampanye yang penuh kreasi, inovasi, dan substansi merupakan kebutuhan dan keharusan. Untuk apa visi, misi, dan program-program dibuat, jika hanya jadi pajangan. Tidak dikampanyekan dan disosialisasikan.

Visi, misi, dan program-program kandidat harus disosialisasikan, dibedah, dan diperdebatkan. Agar muncul dialektika dan diskursus intelektual di masyarakat. Visi, misi, dan program-program tersebut harus memiliki “roh”, sehingga visi, misi, dan program-program para kandidat menjadi hidup, dinamis, mencerdaskan, mencerahkan, menyenangkan, membahagiakan, dan mengasyikan.

Strategi-strategi kampanye gaya baru capres dan cawapres, mesti cepat dikeluarkan. Jurusan-jurusan baru kampanye para kandidat, juga harus segera diperlihatkan. Sehingga kampanye, bukan

lagi menjadi sesuatu yang membosankan, menjengkelkan, dan membuat marah publik.

Tetapi kampanye yang dikembangkan, merupakan kampanye cantik gaya baru, yang penuh dengan kreativitas dan penuh dengan narasi kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Bukan hanya sekedar menyampaikan visi, misi, program-program, dan janji kampanye terbaik. Tetapi juga berkampanye dengan tulus dan ikhlas untuk memperbaiki masyarakat, bangsa, dan negara.

Tak mungkin bangsa ini diperbaiki, dengan narasi kampanye yang rusak, salah, dan kebablasan. Namun republik ini, bisa dibangun dengan narasi kampanye yang mensosialisasikan ide dan gagasan besar, fresh, dan orisinal.

Kampanye dibuat, agar masyarakat mengetahui ide dan gagasan besar para kandidat. Dan tentu ujung dari kampanye adalah masyarakat diberi keleluasaan untuk memilih capres dan cawapres terbaik. Capres dan cawapres terbaik di negeri ini, tidak mungkin hanya berkampanye asal-asalan.

Hanya tinggal enam hari lagi bulan januari 2019 akan kita awali. Mari kita awali kampanye di januari dengan atraksi yang penuh dengan simpati. Tidak mengawali dengan mempreteli kesalahan pribadi capres dan cawapres.

Era baru kampanye yang mencerdaskan dan mencerahkan harus dikembangkan. Bukan hanya karena ingin menang. Tetapi kita memiliki kewajiban moral, untuk membuat pesta demokrasi Pilpres 2019 berjalan dengan aman, nyaman, damai, tertib, penuh kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan, dan kesenangan.

Buat apa jika Pilpres di 17 April 2019 terlaksana. Namun rakyat menderita dan terluka. Yang harus kita pikirkan. Bagaimana Pilpres 2019, berjalan dengan lancar. Dan masyarakat pun bisa sejahtera. Karena sejatinya, Pilpres dilaksanakan untuk mencari pemimpin terbaik, agar bisa mensejahterakan rakyatnya.

Pilpres Pasca Reuni 212

Membicarakan Pilpres memang sangat menarik. Bukan hanya karena narasi kampanye yang saling serang, ugal-ugalan, dan penuh fitnah. Tetapi juga diwarnai oleh adanya aksi reuni akbar alumni 212. Gerakan 212 yang fenomenal, telah mampu memenjarakan Ahok karena kasus penistaan agama. Gerakan aksi damai 212 juga, memiliki daya magnet politik tersendiri di republik ini.

Reuni akbar 212, menjadi acara atau kegiatan, yang disukai oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Selain karena dapat mengumpulkan jutaan orang dalam dalam satu waktu dan satu tempat. Kegiatan tersebut, juga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Menjadi wisata spiritual yang indah dan enak dipandang mata. Mencerminkan umat Islam, yang cinta damai dan rahmatan lil alamin. Dan Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan para penganutnya (Hart, 2009: 7).

Jika kita mengacu pada hasil survey yang dirilis oleh LSI Denny JA, Desember 2018, maka pertemuan alumni 212 tidak mengubah banyak peta politik nasional, dan tidak terlalu mengubah efek elektoral kedua paslon capres dan cawapres. Reuni 212, tidak terlalu berdampak, pada naik dan turunnya elektabilitas para kontestan Pilpres.

Pengaruh kegiatan reuni 212, dapat dilihat dengan cara membandingkan elektabilitas kedua capres sebelum dan sesudah reuni dilaksanakan. Sebelum reuni, pada November 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di angka 53.2%, sedangkan elektabilitas Prabowo-Sandi sebesar 31.2%.

Pasca reuni 212, elektabilitas kedua pasangan capres dan cawapres, tidak banyak berubah, dan masih stagnan. Hasil survey LSI Denny JA, pada Desember 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54.2%, sedangkan Prabowo-Sandi di angka 30.6%.

Ada beberapa alasan, yang dapat menjelaskan mengapa reuni 212, yang tertib, aman, dan damai, serta menyita perhatian publik, belum dan tidak banyak mengubah elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.

Dalam survey LSI Denny JA, setidaknya ditemukan lima alasan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama, kebanyakan pemilih, yang suka dengan reuni 212, sudah memiliki pilihan sendiri atau sulit dipengaruhi oleh Habib Rizieq Shihab (HRS), khusus terkait soal NKRI bersyariah dan ganti presiden di 2019. Terkait dengan ajakan dan seruan HRS, untuk mewujudkan NKRI bersyariah, dari mereka yang suka dengan reuni 212, sebesar 83.2% menyatakan lebih mendukung konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila. Hanya sekitar 12.8%, dari mereka yang suka dengan reuni 212, yang menyatakan setuju dengan NKRI bersyariah.

Seruan HRS untuk ganti presiden, atau ingin memiliki presiden baru, juga tidak semua diamini, oleh pemilih yang menyatakan suka dengan reuni 212, sebanyak 43.6% menyatakan memilih Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan sebesar 40.7% dari mereka yang suka dengan reuni 212, memilih pasangan Prabowo-Sandi.

Kedua, pasca reuni 212, pemilih ada yang datang. Juga ada yang pergi dari pasangan Prabowo-Sandi. Pada pemilih yang

berafiliasi dengan FPI dan PA 212, terjadi peningkatan suara, bagi Prabowo-Sandi. Di pemilih yang terafiliasi dengan FPI, pada November yang mendukung Prabowo-Sandi sebesar 68.3%, pasca reuni, meningkat signifikan menjadi 74.8%. Sedangkan mereka yang berafiliasi dengan PA 212, pada November 2018 yang mendukung Prabowo-Sandi 70,4%, mengalami kenaikan menjadi 82.6% pada Desember 2018, pasca reuni.

Sementara itu, dukungan Prabowo-Sandi di pemilih yang berafiliasi ke NU, Muhammadiyah, dan pemilih yang tidak berafiliasi dengan Ormas manapun, mengalami penurunan. Di pemilih NU, pada November 2018, dukungan kepada Prabowo-Sandi sebesar 30.2%. Pasca reuni, elektabilitas Prabowo-Sandi menurun menjadi 28.6%. Di pemilih yang tidak berafiliasi dengan Ormas manapun, pada November 2018 yang mendukung Prabowo-Sandi sebesar 33.1%. Pasca reuni 212, dukungan terhadap Prabowo-Sandi menjadi 30.8%.

Ketiga, secara umum kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih tinggi. Survey LSI Denny JA pada Desember 2018, menunjukkan bahwa mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi mencapai 72.1%. Kepuasan kinerja Jokowi mengalami kenaikan, jika dibandingkan November 2018 sebesar 69.4%. Pasca reuni 212, bukan penurunan kepuasan kinerja yang didapat Jokowi, tetapi kenaikan. Artinya, pasca reuni 212 tidak banyak mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Karena kita tahu, kepuasan kinerja incumbent akan menjadi berkah elektoral bagi dirinya.

Keempat, Ma'ruf Amin menjadi "jaring pengaman" Jokowi untuk pemilih Islam. Hadirnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi, memang tidak banyak mengangkat dan menaikkan elektoral Jokowi. Namun Ma'ruf Amin menjadi "tembok tebal" Jokowi dari

isu-isu politik identitas yang berpotensi menggerus elektabilitas. Incumbent yang sering diserang isu tak ramah terhadap Islam, dapat diimbangi dengan hadirnya figur Ma'ruf Amin yang merupakan Ketum MUI dan ulama NU.

Kelima, Jokowi bukan Ahok. Dan Jokowi berbeda dengan Ahok. Survey LSI Deni JA menemukan bahwa Jokowi adalah bukan musuh bersama umat Islam. Oleh karena itu, gerakan reuni 212, tidak bisa digunakan untuk menjadikan Jokowi musuh bersama. Sebesar 74.6% menyatakan bahwa gerakan reuni 212, tidak bisa digunakan untuk menjadikan Jokowi sebagai common enemy pemilih Islam. Jokowi berbeda dengan Ahok. Karena saat itu, Ahok seakan menjadi common enemy umat Islam karena adanya dugaan penistaan agama Islam.

Jika dilihat dari segmen pemilih, yang suka atau tidak suka terhadap reuni 212, pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul dikedua segmen pemilih tersebut. Di pemilih yang suka dengan gerakan reuni 212 (54.5%), dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf unggul tipis dari pasangan Prabowo-Sandi. Di segmen pemilih ini, Jokowi-Ma'ruf memperoleh dukungan sebesar 43.6%, sementara Prabowo-Sandi memperoleh dukungan sebesar 40.7%.

Di segmen pemilih yang tidak suka dengan reuni 212, Jokowi-Ma'ruf unggul mutlak. Di segmen ini, Jokowi memperoleh dukungan sebesar 61.8%. Dan dukungan terhadap Prabowo-Sandi sebesar 27.6%. Sedangkan di pemilih, yang tak menyertakan sikap suka atau tidak suka dengan reuni 212, Jokowi-Ma'ruf juga unggul. Jokowi-Ma'ruf memperoleh dukungan sebesar 52.6%. Dan sebesar 37.2% menyatakan mendukung Prabowo-Sandi.

Pilpres masih tinggal 107 hari lagi. Masih ada kesempatan bagi Prabowo-Sandi untuk mengejar elektabilitas Jokowi-Ma'ruf. Namun jika Prabowo-Sandi, tidak mampu membuat terobosan

kampanye yang aktraktif, kreatif, inovatif, dan penuh substansi, dalam meraih simpati masyarakat, maka sang incumbent-lah yang memiliki peluang besar untuk menang. Di politik apapun bisa terjadi. Tetaplah waspada.

Politisasi Ngaji Menebar Politik Identitas

Tak pandang bulu, baik capres atau cawapres, tim sukses, pejabat, konglomerat, dosen, mahasiswa, guru, murid, dokter, apoteker, petani, nelayan, buruh, dan profesi apapun yang ada di dunia ini, jika mengaku Islam yang taat, maka wajib hukumnya untuk bisa membaca Al-Qur'an.

Sungguh merugi, jika kita sebagai umat Islam, tidak pandai mengaji Al-Qur'an. Kalam Allah SWT, keaslian dan kesuciannya terjaga, membacanya mendapat banyak pahala, penistanya bisa masuk penjara, referensi dan sumber ilmu pengetahuan yang tak akan pernah habis digali, mencerahkan, membahagiakan, dan menentramkan hati, bagi siapa pun yang membacanya.

Mengaji jangan dipolitisasi. Ngaji juga jangan dibenci. Bisa mengaji adalah keharusan. Dan jangan diributkan. Politisasi mengaji Al-Qur'an, sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Diperdebatkan di media sosial, dibicarakan di warung-warung kopi di pinggiran jalan, bahkan dibahas di coffee shop-coffee shop kelas elit, di seluruh pelosok negeri.

Bukan hanya santri dan kiyai, yang harus bisa mengaji. Tetapi kita juga sebagai kaum muslimin. Begitu juga kedua kubu

capres dan cawapres, yang sedang mengikuti kontestasi Pilpres 2019. Alangkah naifnya, jika calon pemimpin Indonesia tidak bisa mengaji. Alangkah ruginya republik ini, jika capres-dan cawapresnya tak bisa baca Al-Qur'an. Dan alangkah malangnya bangsa ini, ketika kedua kubu ribut soal bisa tidaknya mengaji.

Bagi saya mengaji Al-Qur'an adalah keharusan dan kewajiban. Namun membaca Al-Qur'an, bagi capres dan cawapres, tidak menjadi persyaratan batal atau tidaknya mereka, menjadi capres atau cawapres. Mereka juga memang harus bisa mengaji. Namun tidak perlu diformalkan oleh KPU.

Jika ada undangan untuk mengikuti tes mengaji dari Dewan Ikatan Dai Aceh, bagi mereka capres dan cawapres menghadirinya adalah sunah. Tidak wajib untuk datang ke sana. Jika pun ada capres dan cawapres hadir, lalu mendemonstrasikan dan unjuk kebolehan dalam mengaji Al-Qur'an itu lebih baik.

Karena kita memang perlu pemimipin, yang bisa dan pandai mengaji Al-Qur'an. Namun jangan diformalkan. Karena sejatinya siapapun kita, capres atau bukan, tim sukses atau bukan, dari sejak kecil kita harus sudah fasih membaca Al-Qur'an.

Mengaji rentan dipolitisasi. Mudah saja untuk menjawab dan merespons masyarakat yang meminta capres dan cawapres untuk bisa mengaji. Zaman sudah canggih, mengaji saja di rumah, lalu divideokan, dan dishare ke media sosial, dengan cepat pasti publik akan menilai, bagus atau tidaknya bacaan Al-Qur'an para capres dan cawapres tersebut.

Politisasi mengaji sangat rentan dengan menguatnya politik identitas. Seolah-olah politik aliran dihidupkan kembali. Politik aliran memang tidak pernah mati. Namun harus disimpan, jangan dijadikan sebagai alat politik, untuk mencari-cari kesalahan atau menyerang lawan politik. Pemikiran politik Indonesia pada 1945-

1965, menurut, (Feith dan Castles, 1988) ada lima: Nasionalisme radikal, Islam, tradisionalisme jawa, sosialisme demokrat, dan komunis.

Jika pun ada dari para capres dan cawapres tersebut, yang tidak bisa baca Al-Qur'an, tugas kita semua untuk mengingatkan, bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Qur'an hingga mahir.

Saya sering keliling ke masjid-masjid di sekitar Jakarta, banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek-nenek yang sedang berlatih membaca Al-Qur'an. Usia mereka sudah tidak muda lagi. Mungkin sedang siap-siap menjemput maut. Namun semangat mereka untuk mengaji dan mengkaji Al-Qur'an sangat tinggi.

Mereka bukan pejabat atau calon pejabat. Namun mereka sadar, tidak ada kata terlambat untuk belajar mengaji Al-Qur'an. Nah, bagi capres dan cawapres pun sama, jangan pernah malu-malu atau gengsi untuk belajar mengaji Al-Qur'an, walaupun dengan cara memanggil ustad ke rumah untuk mengajari.

Kemampuan mengaji Al-Qur'an bagi capres dan cawapres memang penting. Namun bukanlah kewajiban mereka untuk show up di depan publik. Bisa mengaji adalah keniscayaan. Tapi mendemonstrasikannya ke masyarakat adalah bukan kewajiban dan keharusan.

Muncul dan mengentalnya politik aliran, bisa saja dikelola oleh tim sukses salah satu kubu capres dan cawapres. Jika tak dikelola, tak mungkin muncul dan menjadi viral. Jadi mungkin-mungkin saja, politik identitas yang selama ini muncul dan berkembang, dibuat oleh salah satu dari kedua kubu. Yang pasti dan yang jelas, politik identitas dimunculkan, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menjatuhkan lawan.

Konstitusi, Undang-undang Pemilu, dan PKPU pun tidak ada yang mewajibkan mengaji Al-Qur'an sebagai persyaratan batal atau tidaknya pencapresan. Jadi tak usah dirisaukan. Tak usah dipikirkan. Dan tak usah digalaukan. Semua akan baik-baik saja.

Persoalan akan menjadi berfaedah, jika capres dan cawapres terpilih nanti, membuat kebijakan yang mewajibkan kepada anak-anak dari kalangan umat Islam, agar lancar mengaji Al-Qur'an sejak kecil. Bahkan, jika perlu membuat program tahfidz nasional, sehingga anak-anak dari sejak kecil, bukan hanya pandai mengaji Al-Qur'an. Tetapi juga hafal. Ya, hafal Al-Qur'an sejak mereka kecil.

Karena tidak akan pernah rugi. Dan juga tidak pernah menyesal bagi mereka yang suka membaca dan menghafal Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, "sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya".

Permasalahan mengaji Al-Qur'an bagi capres dan cawapres sedang dipersoalkan. Kental dengan nuansa politik identitas. Menjawab dan meresponsnya harus hati-hati. Sangat baik, jika capres dan cawapresnya bisa mengaji Al-Qur'an. Namun jauh lebih baik lagi, jika mereka mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an.

Politisasi mengaji sepertinya akan terus berjalan. Tapi jangan membuat perpecahan. Bisa mengaji Al-Qur'an adalah kewajiban bagi kita semua dan bagi capres dan cawapres. Namun mereka tidak wajib, untuk memberitahukannya ke khalayak banyak.

Republik Darurat Hoaks

Hoaks di republik ini, sepertinya sudah menjadi komoditas. Komoditas yang sengaja diproduksi oleh kelompok tertentu, untuk menghancurkan lawannya. Hoaks tak akan bermakna, jika tak ada yang memproduksi, menyebar, dan membacanya. Hoaks tak akan besar, jika tidak diolah dan digoreng.

Hoaks sangat berbahaya, bukan hanya bagi proses demokrasi. Tetapi juga dapat menghancurkan bangsa. Hoaks yang tumbuh dan berkembang secara masif, akan menjadi hantu pembunuh dan menghanguskan bangunan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Dan hoaks dapat mendegradasi dan mendelegitimasi sebuah rezim.

Bangsa ini, sedang mengalami dan menjalani darurat hoaks. Hoaks terjadi di mana-mana. Menyebarkan hoaks, seperti sudah menjadi rutinitas dikursus di ruang publik. Hoaks menyebar bagaikan virus mematikan, yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hoaks bisa menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Melebihi ganasnya penyakit jantung, stroke, kanker, hipertensi, dan HIV-AIDS. Hoaks mengudara, membesar, dan menyebar

akan menabrak tembok besar kekuasaan. Hoaks bisa menerjang siapapun yang sedang berkuasa.

Jika dibiarkan, hoaks akan banyak memakan banyak korban. Bukan hanya penguasa politik yang akan menjadi santapan. Siapapun akan terkena. Siapapun akan menjadi objek. Dan siapapun akan menderita dan merana, karena serangan hoaks yang membabi buta.

Semua komponen bangsa harus mealawan hoaks, rakyat, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif sejatinya harus menangkal hoaks. Bukan hanya sekedar 5 (D), datang untuk duduk, dengar diam, dengkur, dan duit (Batubara, 2009: 58).

Bangsa besar dan kuat adalah bangsa yang mampu melawan dan membunuh hoaks. Negara harus hadir dalam memberantas hoaks. Negara tidak boleh kalah, oleh serangan-serangan hoaks yang disebar untuk menghancurkan, memecah-belah, mendegradasi, dan mendeligitimasi pemerintah.

Republik ini, tidak boleh kalah oleh hoaks. Bangsa yang tak berdaya dan kalah oleh hoaks, hanya akan menjadi negara hancur. Tentu Indonesia tidak mau menjadi negara yang hancur. Oleh karena itu, melawan hoaks adalah keniscayaan. Melawan hoaks adalah tugas kita semua. Tak peduli miskin atau kaya, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, semuanya harus bergerak untuk melawan hoaks.

Hoaks yang dibiarkan akan menjadi kebenaran. Dan hoaks yang diproduksi secara terstruktur, sistematis, dan masif, jika tidak diantisipasi dan dihentikan, akan dapat memporak-porandakan nilai-nilai kebaikan. Dan menjungkir-balikan fakta, dan objektifitas.

Jika bangsa sudah dikuasai hoaks, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Republik yang kita cintai ini, tentu tak mau hancur.

Dan tak boleh hancur. Kedewasaan kita sebagai anak bangsa, yang dapat menghalangi hancurnya bangsa dari serangan hoaks. Kedewasaan dalam memverifikasi berita yang datang. Kedewasaan dalam “tabayun”, ketika informasi diterima. Dan kedewasaan, untuk tidak menyebarkan berita, yang belum jelas kebenarannya.

Cara lain untuk melawan dan menghentikan hoaks, yaitu dengan cara menegakkan hukum secara adil dan konsekwen. Tangkap, adili, dan hukum siapapun yang memproduksi dan menebar hoaks. Agar ada efek jera. Jika penegakkan hukum tidak dijalankan, maka hoaks akan merajalela. Dan akhirnya, masyarakat tidak takut lagi untuk menyebar hoaks.

Demokrasi harus selaras dan sejalan dengan penegakkan hukum. Demokrasi yang tidak dibarengi dengan penegakkan hukum yang baik, akan menjadi demokrasi abal-abal yang tanpa arah. Demokrasi yang akan mudah diserang hoaks. Demokrasi yang rapuh dan tak bermakna.

Hoaks 7 kontainer yang berisi kertas suara, yang sudah dicoblos untuk pasangan 01, Jokowi-Ma’ruf. Sungguh merupakan hoaks yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Karena seolah-olah pemerintah akan bermain curang dalam Pemilu 2019. Dan seolah-olah, penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu juga membiarkan kejadian tersebut.

Jika dilihat dari pola gerakan dan penyebarannya. Hoaks tersebut, bukan hanya untuk mendegradasi dan mendeligitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu saja. Tetapi juga, untuk menumbuhkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dan KPU. Jika hoaks tersebut berhasil, maka tentu akan bisa memecah belah sesama anak bangsa.

Syukurlah, pihak kepolisian bergerak dan bertindak cepat. Sudah ada pelaku, yang dijadikan tersangka, dalam kasus

penyebaran hoaks tersebut. Namun yang harus diselidiki dan diinvestigasi adalah, siapa sesungguhnya aktor intelektual di belakangnya. Karena tak mungkin mereka bekerja asal-asalan dan sendirian.

Mengusut tuntas para penyebar hoaks adalah jalan terbaik. Jalan kebaikan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jalan keindahan, untuk menjaga kewibaan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Jalan kesuksesan, untuk menjadikan republik ini hebat dan jaya.

Kita sudah jenuh, lelah, dan terluka dengan narasi kampanye konyol yang saling serang, fitnah, dan saling menjatuhkan. Ditambah lagi dengan sebaran hoaks yang membabi-butu. Mari kita sudahi kampanye yang saling menyakiti dan melukai.

Ditengan kejenuhan tersebut, wajar jika muncul capres dan cawapres fiktif, Nurhadi-Aldo. Sebuah pesan, sindiran, dan kritikan atas fenomena dan realitas kampanye kedua kubu, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi yang masih mempertontonkan kampanye yang tidak mencerdaskan dan mencerahkan.

Munculnya capres dan cawapres fiktif, Nurhadi-Aldo jangan dianggap enteng. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Walaupun bisa saja sebagai bentuk hiburan. Namun jika dibiarkan, akan menjadi fenomena menarik, yang bisa saja akan menambah Golput dalam pemilu nanti.

Apapun bentuk, isi, dan polesannya, hoaks menjadi musuh bersama. Musuh kita semua. Musuh sesama anak bangsa. Dan musuh negara. Jangan beri ruang hoaks untuk tumbuh dan berkembang. Sekali saja kita lengah, maka kita bisa menjadi korbannya.

Republik ini harus diisi dengan kreativitas dan inovasi. Bukan dengan memproduksi dan menebar hoaks. Karena dengan

keaktivitas dan inovasi, bangsa ini bisa menjadi bangsa besar yang disegani dalam percaturan politik internasional. Namun jika hoaks yang diproduksi dan kembangkan, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Mari kita jaga republik ini dari hoaks.

BAB 3
KAMPANYE
TANPA MORALITAS

Hantu Debat Perdana

Debat perdana Capres dan Cawapres, menjadi acara yang dinanti-nanti. Bukan hanya karena masyarakat, ingin melihat performance terbaik Capres dan Cawapresnya. Namun juga, publik ingin menilai, apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan, dalam lima tahun ke depan, terkait persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat perdana sungguh akan menentukan. Laiknya kesan pertama, ketika kita bertemu pujaan hati, kesan pertama, akan menjadi kenangan indah. Kesan pertama akan menentukan, dan selanjutnya terserah anda.

Debat perdana, akan menentukan persepsi para pemilih, terutama swing voters. Undecided voters yang masih galau, akan menilai para kandidat dikesan pertama pada debat perdana. Debat perdana akan menentukan kesan pada debat-debat berikutnya.

Persoalan-persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme merupakan persoalan krusial bangsa ini. Demokrasi tak berarti dan akan mati, jika hukum memble dan tidak ditegakkan. Demokrasi akan menjadi liar dan tak terkendali, dan hanya akan menguntungkan sekelompok elit tertentu, jika hukumnya tajam kebawah dan tumpul keatas.

Persoalan korupsi masih menjadi problem bagi bangsa ini. Bahkan menurut (Alatas, 1987: 1), sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit, mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlainan.

Hukum yang belum menjadi panglima, hanya akan menjadi mainan, kelompok tertentu untuk mengerjai kelompok lain. Hukum bisa menjadi alat sandera dan alat serang, untuk menghancurkan lawan. Oleh karena itu, jika kita sudah memilih demokrasi, sebagai bagian dari kehidupan bernegara, maka harus dibarengi dengan penegakkan hukum yang baik dan benar.

Demokrasi tanpa penegakkan hukum, bagai sayur tanpa garam. Demokrasi yang tak paralel dengan penegakkan hukum, hanya akan menjadi demokrasi prosedural, tak akan pernah menjadi demokrasi yang substansial. Jadi, hukum menjadi instrumen penting dalam maju-mundurnya proses demokrasi di Indonesia.

Persoalan HAM akan menjadi hantu bagi Prabowo. Dan hantu HAM ini, akan terus membayang-bayangi Prabowo sampai kapanpun. Seolah-olah, kasus pelanggaran HAM, yang dituduhkan ke Prabowo digantung dan dibiarkan, agar dari pemilu ke pemilu menghantui Prabowo.

Sejak Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres pada tahun 2009, hantu HAM muncul dan membayang-bayanginya. Begitu juga pada Pilpres 2014 yang lalu, hantu HAM gencar menyerang Prabowo. Pada Pilpres 2019 ini pun sama, hantu HAM masih akan tetap menjadi hantu bagi Prabowo.

Bahkan hantu HAM menjadi momok yang menakutkan, Karena seperti kita tahu, hantu HAM Prabowo menjadi beban masa lalu, saat ini, dan beban masa depan bagi Prabowo. Mungkin para pendukungnya, sangat kasihan pada Prabowo, walaupun sudah dibantah mati-matian oleh Prabowo dan tim-timnya, namun hantu HAM tersebut tetap menyerang.

Selama Prabowo tidak pernah diadili, dengan seadil-adilnya, selama itu pula kasus HAM yang menerpa Prabowo tak akan hilang. Bahkan hingga dipanggil Tuhan, suatu saat nanti. Negara harus punya solusi yang adil, terkait persoalan HAM yang membelit Prabowo. Jangan biarkan Prabowo menanggung beban masa lalu, kini, dan akan datang terkait penculikan aktivis tahun 1998. Semua harus clear dan clean.

Negara tidak boleh dzolim kepada siapapun. Termasuk kepada Prabowo. Jalan terbaik adalah, membentuk peradilan khusus, untuk menuntaskan masalah HAM yang membelit Prabowo. Agar jelas dan tuntas, apakah Prabowo bersalah atau tidak. Negara harus punya solusi. Solusi terbaik agar Prabowo tidak terus-menerus dihantui kasus HAM yang melilitnya.

Jika negara tak punya solusi, maka Prabowo masih akan diserbu, diserang, dan dihantui kasus pelanggaran HAM hingga kapanpun. Ini berbahaya, berbahaya bagi Prabowo, karena tidak akan bisa tidur nyenyak. Hantu HAM itu masih akan terus terbayang dan menyerang. Ganas dan berbahaya.

Hantu HAM pada debat perdana, masih akan menyerang Prabowo. Sekuat apapun Prabowo membantah dan mengklarifikasi ke masyarakat. Namun, jika tidak ada pengadilan, yang memutuskan apakah Prabowo bersalah atau tidak. Selama itu pula, hantu HAM akan tetap sulit dihapus dari memori kolektif seluruh anak bangsa.

Debat perdana nanti malam, harus mengarah pada penyelesaian kasus HAM Prabowo. Dan hanya satu, yang bisa menghilangkan kasus tuduhan pelanggaran HAM kepada Prabowo, yaitu kemenangan. Hanya dengan kemenangan Prabowo, akan bisa mengklarifikasi dan meminimalisir serangan tersebut. Hanya dengan kemenangan, hantu HAM yang mengusik Prabowo akan sedikit-demi sedikit akan terlupakan.

Namun jika Prabowo kalah lagi, maka hantu HAM tersebut akan tetap membayang-bayangi. Tidak enak memang dibayang-bayangi hantu HAM. Momok menakutkan yang bisa menghalangi dan menggajal kemenangan dalam Pilpres.

Pilpres memang bukan bicara soal HAM semata. Namun bicara soal semua aspek kehidupan. Namun, jika ada yang menggajal dalam persoalan HAM, maka akan menjadi alat serang pihak lawan. Tidak heran dan tidak aneh, jika sejak 2009, 2014, dan 2019 isu HAM masih tetap menghantui Prabowo.

Hantu HAM dalam debat perdana, tentu merugikan Prabowo. Dan menguntungkan Jokowi. Namun semuanya kembali kepada Prabowo, apakah bisa menjelaskan ke publik berdasarkan fakta-fakta sejarah, bahwa dia tidak terlibat pelanggaran HAM. Atau masyarakat akan tetap menilai negatif atas persoalan HAM Prabowo di masa lalu.

Kita memang tidak boleh menghakimi siapapun. Tak boleh menghina, memfitnah, merendahkan, dan menjelekan siapapun. Yang boleh kita lakukan adalah mengkritik. Mengkritik yang membangun dan solutif. Bukan mengkritik yang dekonstruktif dan ofensif yang bisa melukai orang lain.

Seperti bait lagunya Slank yang indah, “aku gak mau menjadi setan yang menakutimu”, “aku gak mau menjadi iblis yang menyatkanmu”. Tentu lirik lagu Slank ini, bukan ditujukan

untuk Prabowo. Namun jangan sampai hantu HAM, terus menerus menakuti dan menyesatkan Prabowo.

Dari pemilu ke pemilu, Prabowo selalu diganjal dan dihantui isu HAM. Itulah politik, tak boleh ada celah lawan politik untuk menyerang kita. Sekali ada celah, repotlah kita. Oleh karena itu, track record Capres dan Cawapres menjadi penting. Pemimpin yang baik sejatinya tidak dibayang-banyangi oleh kasus-kasus kelam masa lalu. Ini berlaku bagi siapapun.

Kritik JK dan Nasib Bangsa

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) sedang gencar mengkritik pemerintah. Entah karena peduli akan nasib bangsa atau karena sebentar lagi akan selesai menjadi wakil presiden. Kritik JK diakhir masa jabatan membuat publik bertanya-tanya. Ada apa gerangan.

Apa yang sedang terjadi di negeri ini, sehingga JK sebagai wakil presiden, yang merupakan orang tertinggi nomor dua di pemerintahan, mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri.

Paling tidak ada tiga kritikan JK terhadap pemerintahannya sendiri. Pemerintahan yang dipimpinnya bersama Jokowi. Pertama, terkait standarisasi pembangunan rumah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk membuat standarisasi rumah, seperti pintu dan jendela.

Kedua, pembangunan LRT Jabodebek. LRT di atas jalan tol dinilai tak efisien dan sepuluh kali lebih mahal di banding di luar tol. Dan kehadiran LRT menyebabkan jalan tol susah diperlebar. Dan Ketiga, pembangunan jalur kereta trans Sulawesi. Rute dinilai terlalu panjang, tak efisien karena sedikit barang yang bisa diangkut.

Kritikan JK bisa jadi benar dan merupakan kritikan yang membangun. JK bisa saja peduli akan nasib bangsanya. Namun yang aneh, kenapa kritikan tersebut muncul, dari orang dalam pemerintahan. Pemerintah yang membangun, internal pemerintah sendiri yang mengkritik. Pemerintah yang merencanakan dan mengimplementasikan, internal pemerintah juga yang membuka kekurangan dan kelemahan.

Siapapun memang boleh mengkritik pemerintah. Namun kritik JK terhadap pemerintah, merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap ringan dan biasa. Pemerintah mengkritik pemerintah. Artinya ada komunikasi dan manajemen pemerintahan yang harus diperbaiki.

Sejatinya, JK sebagai orang dalam pemerintahan, tidak mengkritik pemerintahannya sendiri. Alangkah baik dan bijaknya, jika JK mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persolan yang dikritiknya. Jabatan orang nomor dua di negeri ini, tentu akan mampu dan bisa membenahi dan memberesi apa-apa yang dikritiknya.

Kritik itu menyehatkan. Bagaikan obat, ketika diminum, walaupun rasanya pahit, namun menyehatkan. Kritik juga sama, walaupun tidak enak didengar dan membuat pening, tapi menyehatkan dan menyegarkan. Tanpa kritik, kita tidak akan pernah tahu apa kekurangan kita, dan kita tak akan bisa maju. Begitu juga sebuah bangsa, tanpa kritik, bangsa akan jalan ditempat bahkan bisa gulung tikar.

Bangsa yang tidak bisa menerima kritik, akan termakan oleh keangkuhannya sendiri. Jika ada pembangunan infrastruktur yang salah, atau tidak efisien, memang harus dikoreksi dan diperbaiki. Jangan dibiarkan. Namun alangkah baik dan bijaknya jika kritikan, saran, dan masukan muncul dari masyarakat.

Kritik dalam negara demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Sistem politik demokrasi terjadi ketika kebebasan politik melalui dasar-dasar kebebasan dari asosiasi, informasi dan komunikasi untuk tujuan dari persaingan secara bebas antara pemimpin untuk mengesahkan pada jangka waktu tertentu tanpa kekerasan yang berarti keinginan untuk memerintah, sistem demokrasi melakukan tanpa melibatkan politik dari persaingan atas larangan anggota partai politik dari kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka dari hal-hal yang menggunakan kekuatan untuk melemahkan (Pahlevi, 2001).

Pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi-JK sedang menjadi prioritas dan primadona. Memang tidak akan bisa dirasakan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, masyarakat akan menikmati fasilitas infrastruktur yang sedang dibangun dan dikembangkan. Jika ada salah dalam pembangunannya, perbaiki. Jika ada yang korupsi, laporkan dan tangkap.

Kritikan-kritikan JK diakhir masa jabatan, tentu mengherankan. Bukan saja karena JK seorang wakil presiden, yang juga ikut dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan. Namun kenapa kritikan tersebut baru dilakukan sekarang. Di mana proses Pemilu sedang berjalan, di saat pembangunan infrastruktur sedang dalam tahap akhir, dan di saat berada di penghujung jabatan.

Apapun kritikan JK, sejatinya harus memacu pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi. Dan JK sebagai bagian dari pemerintahan, yang dikritiknya sendiri, juga harus memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pembangunan infrastruktur dengan smart dan elegan. Agar persoalan tidak menjadi runyam.

Kritikan JK besar atau kecilnya merugikan pemerintah. Terlebih lebih tentu merugikan Jokowi sebagai petahana, karena akan dianggap oleh publik bahwa kedua pemimpin tersebut kurang harmonis. Padahal kita tahu JK merupakan bagian dari tim kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Kritikan yang sifatnya membangun dan solutif harus didengarkan. Sebagai *early warning*, bahwa ada suatu masalah dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Perlu dievaluasi dan dikoreksi, agar ke depan lebih baik lagi. Namun karena yang mengkritiknya JK, bisa menjadi dilema. Di satu sisi JK merupakan pimpinan dalam pemerintahan. Dan di sisi yang lain, mengkritik pemerintahan yang dipimpinnya.

JK merupakan tokoh nasional yang berpengalaman dan disegani. Tentu ucapan dan tindakannya akan didengar oleh publik. Mengkritik sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Dan kita memang, boleh mengkritik siapapun di dunia ini. Namun mengkritik pemerintahan yang dipimpinnya sendiri merupakan suatu keanehan dan kejanggalan.

Kritikan JK sudah barang tentu mamantik reaksi di masyarakat. Ada yang mendukung. Tentu juga ada yang menyangkan sikap kritis JK tersebut. Bagi kubu petahana, kritik JK bisa merugikan karena mengganggu pemberitaan. Namun bagi kubu Prabowo-Sandi, kritik JK menguntungkan karena dianggap ada persoalan dalam pembangunan infrastruktur.

Sejatinya kedua pemimpin bangsa tersebut, kompak dalam detik-detik akhir masa jabatannya. Kesalahan dalam pembangunan infrastruktur memang harus dikoreksi. Jika ada yang tak efisien, perbaiki. Jika ada yang salah, evaluasi. Dan jika ada yang main-main dan banyak ambil aksi untung dan korupsi, laporkan dan tangkap.

Pembangunan infrastruktur akan mengubah wajah bangsa ke depan. Namun pembangunannya jangan sampai ada penyimpangan dan penyalahgunaan. Kita tentu harus mengapresiasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur. Namun kita juga perlu mengkritik pembangunan infrastruktur yang bermasalah.

Untuk mengakhiri polemik kritik JK terhadap pembangunan infrastruktur. Perlu kebijaksanaan dari kita semua masyarakat Indonesia, untuk menyikapi kritikan dengan senyuman dan perbaikan. Kritik yang tajam dan menohok memang biasanya datang dari internal. Dan JK berada di internal pemerintahan itu.

Karena kritikan JK ditujukan untuk pemerintah, maka JK juga perlu memikirkan solusinya. Dan saya yakin. Haqul yakin. Pemerintah akan bisa menyelesaikannya. Terlebih-lebih JK merupakan bagian dari internal pemerintahan, yang memiliki kuasa untuk membereskan hal-hal yang menyimpang.

Jebakan Demokrasi

Pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan segera tiba. Hanya tinggal 75 hari lagi, kita akan memilih Capres, Cawapres, dan anggota legislatif. Demokrasi sedang diuji. Apakah bangsa ini akan mulus dalam penyelenggaraan Pemilu, pada 17 April 2019. Ataukah justru, demokrasi dijadikan alat untuk membangun tirani mayoritas, sehingga demokrasi terjebak hanya pada prosedur semata.

Demokrasi memang mengharuskan adanya Pemilu yang demokratis. Tak ada negara demokrasi di dunia ini, yang tak melaksanakan Pemilu. Pemilu dilakukan, selain untuk memilih pemimpin yang terseleksi. Tetapi juga untuk menjaga hak rakyat yang berdaulat, dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka.

Demokrasi responsif dapat terjadi hanya jika paling sedikitnya terdapat jaminan terhadap delapan institusi: Kebebasan untuk membuat dan bergabung dalam organisasi, kebebasan untuk berekspresi, hak untuk memilih, sifat memenuhi syarat untuk jabatan pemerintahan, hak pemimpin-pemimpin politik untuk bersaing agar mendapat suara, sumber-sumber alternatif terhadap informasi, pemilu yang jujur dan adil, institusi-institusi

untuk pembuatan kebijakan pemerintah yang bergantung pada suara pemilih (Dahl, 1971).

Melalui Pemilu, kekuasaan di eksekutif dan legislatif diperebutkan. Pemilu menjadi ajang pertarungan politik, yang konstitusional untuk meraih dan memenangkan hati rakyat. Jangan sampai Pemilu menjebak demokrasi. Pemilu seolah-olah dilaksanakan secara demokratis. Namun sesungguhnya tidak.

Bisa saja demokrasi dibajak dan dijebak, untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sehingga demokrasi dalam ancaman. Pemilu dalam bayang-bayang kecurangan. Namun di era keterbukaan seperti saat ini, siapapun yang berbuat curang pasti akan ketahuan.

Saya yakin, bahkan haqul yakin. Pemilu tahun ini, akan terlaksana dengan baik. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai. Dan banyak negara lain belajar tentang demokrasi kepada Indonesia.

Pasca reformasi 1998, Pemilu di republik ini, memang dibayang-banyangi konflik dan kecurangan. Namun konflik tidak pernah terjadi. Dan seandainya ada dan terjadi kecurangan, maka bisa dilaporkan kepada institusi yang berwenang.

Masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa dan cerdas, dalam mengelola, menjaga, dan merawat demokrasi. Masyarakat di negara ini, tidak mau masuk jebakan demokrasi. Yang seolah-olah demokrasi. Namun sesungguhnya esensi demokrasi itu sendiri tidak ada. Tidak terimplementasi. Tidak menjadi inspirasi. Dan tidak membangun dan mensejahterakan.

Pemilu sebagai implementasi dari demokrasi, sejatinya dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan

kesenangan. Oleh karena itu, sebagian orang menyebut Pemilu merupakan bagian dari pesta demokrasi.

Laiknya pesta, maka Pemilu menjadi ajang happy-happy antar sesama anak bangsa. Dan Pemilu jangan diisi dengan hal-hal yang dapat melukai sesama warga negara. Pemilu yang aman, damai, dan menyenangkan menjadi dambaan kita semua.

Tak mudah menjaga dan merawat demokrasi. Saat ini, kita masih berada dalam proses transisi demokrasi. Masih dalam tahapan konsolidasi menuju negara demokrasi. Belum menjadi negara demokrasi. Demokrasi di republik ini, masih terjebak oleh tingkah polah elit-elit politik yang seolah-olah menumbukan demokrasi. Namun pada saat yang lain, menjebak dan membajak demokrasi.

Untuk menjadi negara demokrasi memang tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak hanya sekedar diucapkan. Namun demokrasi juga harus terimplementasikan. Demokrasi hanya alat. Ya, hanya alat. Alat untuk mencapai kesejahteraan.

Jika ada negara yang mengaku-ngaku menjadi negara demokrasi. Namun jika rakyatnya masih miskin dan menderita. Maka demokrasi, masih belum mampu mengangkat kesejahteraan orang-orang yang mengikutinya. Demokrasi masih sebatas jargon, belum menyentuh esensi, yaitu kesejahteraan.

Berdemokrasi jangan terlalu banyak basa-basi. Berdemokrasi, memang belum tentu dapat mensejahterakan. Namun pilihan menjadi negara demokrasi, merupakan keniscayaan. Pilihan berdemokrasi adalah jalan terbaik.

Jebakan demokrasi masih menghantui kita semua. Kampanye hitam, saling serang, saling fitnah, hoaks, nyinyiran,

dan pembusukan terhadap lawan politik, akan menjadi ganjalan dan jebakan demokrasi yang tak akan terhindarkan.

Pemilu hanya tinggal 75 hari lagi. Namun narasi kampanye yang dikembangkan masih saling hantam dan melukai. 75 hari, sejatinya para elit politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Bukan malah menjebak demokrasi, sehingga menjadi demokrasi yang hambar dan tanpa makna.

Karena jebakan demokrasi masih menghantui, maka tidak heran dan tidak aneh, jika debat pertama Capres dan Cawapres terasa hambar, garing, kaku, dan tidak menyenangkan, bagi siapapun yang menonton dan menyimaknya.

Debat kedua nanti, 17 Februari 2019, harus menjadi momentum terbaik, untuk melepaskan diri, dari jebakan demokrasi dan jaga *image*, sehingga apapun yang disampaikan oleh kedua pasangan calon, lepas dalam menyampaikan visi-misi, program, ide, dan gagasan terbaiknya.

Bukan lagi terjebak pada wacana-wacana pinggiran, yang tidak substantif dan inspiratif. Jika penyampaian kurang mengesankan, asal-asalan, dan tanpa persiapan yang matang, maka kita hanya akan melihat dan menyaksikan debat yang tanpa ruh. Yang tentu tidak akan menyenangkan bagi siapapun yang menontonnya.

Untuk menghilangkan jebakan demokrasi, tak perlu ragu. Kita semua harus melawan upaya-upaya yang dapat membajak demokrasi. Narasi kampanye yang ugal-ugalan dan tak bermakna, hanya akan menjadikan demokrasi dalam jebakan.

Namun jika narasi kampanye diisi, dengan program-program, ide, dan gagasan yang mendidik dan mencerahkan, akan menjadikan demokrasi menjadi berkualitas dan penuh dengan keindahan.

Kita masih ada dalam tahapan, yang masih saling menyalahkan satu sama lain. Kubu A menyalahkan kubu B. Begitu juga sebaliknya. Belum ada pada level kampanye dengan perdebatan yang mencirikan paslon Capres dan Cawapres yang visioner, intelektual, dan berkarakter.

Demokrasi yang berkualitas tidak akan diisi oleh perdebatan yang ala kadarnya. Tidak akan dilaksanakan dengan seadanya. Tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak, menjebak, dan membajak demokrasi.

Pilihan boleh berbeda. Namun kita masih tetap bersaudara. Masih tetap bersatu. Itulah indahnya berdemokrasi. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan dan dipertajam, sehingga dapat menjebak demokrasi. Tetapi perbedaan ada dan terjadi sebagai bagian dari sunnatullah. Perbedaan adalah rahmat. Rahmat bagi kita semua.

Mari jadikan Pemilu, menjadi momentum terbaik untuk memilih pemimpin terbaik. Masih ada 75 hari lagi, untuk kita bisa menilai pasangan calon Capres dan Cawapres manakah yang akan kita pilih. Semua bergantung pada Anda sebagai rakyat Indonesia. Pilihan Anda akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Kampanye Ofensif

Bukan hanya dalam dunia sepak bola, gaya ofensif (menyerang) diperagakan. Dalam percaturan politik pun sama, gaya ofensif terkadang menjadi senjata yang ampuh, untuk melumpuhkan lawan politik.

Dunia sepak bola, tak jauh beda dengan dunia politik. Jika dalam sepak bola, gaya ofensif menjadi andalan, untuk menggolkan bola ke pihak lawan. Dalam dunia politik, kampanye dengan gaya menyerang dilakukan untuk memenangkan pertarungan Pemilu.

Selain strategi ofensif, dalam sepak bola dikenal pula strategi defensif (bertahan). Tidak harus selalu ofensif, untuk memenangkan pertandingan. Sesekali perlu melakukan gaya defensif, agar pihak lawan stres dan tidak bisa menjebol gawang. Di saat memperagakan permainan defensif, namun jangan lupa juga, melakukan counter attack, agar kesebelasan lawan lengah, kalang kabut, lalu bisa mencetak gol.

Dalam dunia politik, strategi defensif tidak berlaku. Karena jika lawan politik, menyerang dengan hoaks, fitnah, dan pembusukan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka akan sulit menepis dan mengklarifikasinya. Jadi gaya

defensif, dalam politik merupakan gaya usang, jadul, dan tak menguntungkan.

Lihat saja, bagaimana gaya ofensif Donald Trump dengan gaya kampanye ala-Rusianya, mampu mengalahkan Hillary Clinton, dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016 yang lalu. Belajar dari kasus Pilpres Amerika tersebut, Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama. Kampanye Pilpres diwarnai dan didominasi kampanye ofensif yang masif.

Kampanye ofensif Prabowo-Sandi, hampir-hampir menjungkir balikan logika berpikir masyarakat. Tak ada kata lain, suka tidak suka, senang tidak senang, untuk melawan petahana, pasangan Prabowo-Sandi harus bermain terbuka, agresif, dan ofensif.

Petahana memang memiliki keunggulan. Karena prestasi kerjanya bisa terlihat dan dapat dinilai oleh masyarakat. Jika tingkat kepuasan kinerja Jokowi, dalam lima tahun terakhir, dianggap baik oleh masyarakat, maka untuk menghancurkan citranya, agar jelek dan jatuh di mata pemilih, maka harus diserang. Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral), (Venus, 2004: 10).

Dan inilah yang sedang terjadi, dalam ruang kampanye saat ini. Kritikan yang keras, kencang, tajam, dan pedas menysasar Jokowi-Ma'ruf, dari mulai persoalan utang negara, import, penguasaan aset di tangan segelintir orang, Indonesia akan bubar di 2030, isu PKI, anti-Islam, dan pro China yang dituduhkan kepada Jokowi, menjadikan pemerintah bereaksi. Menjadikan petahana mengklarifikasi. Dan menjadikan Jokowi, agak sedikit agresif dan ofensif.

Di politik, gaya ofensif tidak bisa dihadapi dengan gaya defensif. Karena jika lawan politik bermain ofensif, lalu petahana bergaya defensif, maka kubu lawanlah yang akan di atas angin. Gaya kampanye ofensif harus pula dihadapi dan dilawan dengan gaya ofensif. Jika gaya ofensif direspons dengan gaya defensif, maka petahana akan kerepotan.

Bagaimana pun isu-isu dan tuduhan-tuduhan, benar atau salah, baik atau tidak, perlu diklarifikasi dan harus clear. Jika isu-isu yang berkembang dan tuduhan-tuduhan yang masif, serta membabi buta tidak diklarifikasi, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, akan menjadi sebuah kebenaran. Dan jika sudah menjadi kebenaran, maka sulit untuk menangkis dan mengcounter isu-isu dan tuduhan-tuduhan tersebut.

Gaya oposisi yang ofensif, memang harus dicounter dan dilawan dengan ofensif pula. Karena ofensifitas kedua kubu, akan beradu pada ruang publik. Dan biarlah publik yang akan menilai. Namun kampanye jual beli serangan, antar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak membuat politik semakin panas.

Gaya ofensif memang lebih menguntungkan kaum oposan. Karena bergerak untuk melawan dan menghancurkan incumbent. Kinerja incumbent yang dianggap baik, jika terus menerus diserang dengan isu-isu hoaks, maka bisa saja akan kerepotan dan kedodoran, dan bisa berujung kekalahan.

Kampanye ofensif Jokowi, memang agak terlihat tidak seperti biasanya. Gayanya yang sederhana dan santai. Tiba-tiba banyak mengeluarkan peluru untuk menyerang kaum oposisi. Gaya ofensif Jokowi tidak dilarang dan tidak juga salah. Karena di saat oposisi menyerang dan itu sudah dilakukan sejak lama, maka satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk menghadapi mereka, dengan cara menyerang balik. Bukan dengan cara diam dan bertahan.

Jika Jokowi defensif, maka akan terlihat lemah dan bisa kalah. Oleh karena itu, bergaya agresif dan ofensif dalam berkampanye, merupakan suatu keniscayaan, jika incumbent masih ingin bertahan, dan jika ingin menang pada pertarungan Pilpres, 17 April 2019 mendatang.

Tak agresif dan tak ofensif akan merugikan Jokowi. Melakukan counter attack kepada pihak oposisi, adalah merupakan kewajiban dan sangat rasional. Diam atau bergaya defensif, berarti sama saja dibully tanpa melawan, dihakimi tanpa membela, dan difitnah tanpa mengklarifikasi.

Memang gaya ofensif Jokowi, dinilai sebagian orang sebagai bentuk kepanikan. Tapi bukan itu yang sedang diperagakan Jokowi. Jokowi sedang menunjukkan, bahwa dia yang selama ini diam, bangkit, agresif, dan melakukan tindakan ofensif untuk menunjukkan powernya.

Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak lemah. Dia kuat. Dia tidak takut pada lawan politiknya. Dan siap menghadapi serangan-serangan politik yang lebih keras, tajam, dan dahsyat.

Politik memang berbeda dalam mengamalkan agama. Jika dalam ajaran agama, serangan lawan via hoaks dan fitnah, harus dihadapi dengan kesabaran, senyuman, dan kita dianjurkan untuk tidak membalas orang yang memfitnah kita.

Namun dalam politik, fitnah dan hoaks harus dilawan. Harus di-counter. Harus diklarifikasi. Jika tidak, maka hoaks dan fitnah akan menjadi kebenaran dalam masyarakat. Jika politik sudah diisi dan dipenuhi dengan fitnah, hoaks, dan kebencian, maka demokrasi akan terdegradasi.

Kampanye ofensi terkadang sangat diperlukan untuk mencegah agresivitas dan ofensivitas serangan lawan. Gaya ofensif lawan dalam berkampanye tidak bisa dihadapi dengan cara defensif dan ala kadarnya.

Melihat gaya kampanye kedua kubu, yang sama-sama menggunakan gaya kampanye tentu akan semakin menarik. Bukan hanya karena gaya kampanye ofensif yang dianggap membahayakan. Tetapi gaya ofensif sudah menjadi keharusan dan gaya kampanye baru kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Agresif silakan. Ofensif juga boleh. Tidak ada yang melarang. Asalkan kampanye dengan gaya agresif dan ofensif, bukan untuk menjungkir balikan keadaan, kebencian, dan fitnahan.

Menanti Kejutan Debat Kedua

Debat kedua akan dilaksanakan 17 Februari mendatang. Walaupun hanya menghadirkan Capres –tanpa Cawapres— debat diprediksi akan sengit. Namun belum tentu menggigit, substantif, dan penuh gagasan yang kreatif dan inovatif.

Jika kita mengacu pada debat pertama. Debat perdana tersebut berjalan kaku, boring, dan tak menyenangkan. Laiknya sebagai sebuah tontonan. Tontonan tersebut tak enak dilihat dan menyebalkan. Tak heran jika sebagian masyarakat, menilai debat pertama, dengan penuh kekecewaan dan tidak sesuai harapan.

Karena banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat. KPU pun melakukan evaluasi agar kejadian pada debat perdana, yang kurang mengasyikan, tidak terjadi lagi. Bocoran pertanyaan dihilangkan, dan segmen keempat waktunya diperpanjang. Sehingga para Capres bisa mengeksplor diri, dalam menjelaskan dan menyanggah lawan debat.

Bocoran pertanyaan didebat pertama, telah menjadikan peserta debat bagaikan robot. Terpaku pada daftar pertanyaan. Dan cenderung memperhatikan contekkan.

Debat kedua tentu harus lebih baik. Bukan hanya substansi yang harus diperbaiki. Namun performance juga harus

diperhatikan. Substansi yang dalam, detail, dan komprehensif menjadi keniscayaan. Karena sejatinya perdebatan dilakukan untuk mengeksplor, mendalami, dan mengangkat isu-isu yang diperdebatkan.

Jika substansinya dangkal, kering, dan tak bermakna, maka perdebatan hanya akan melahirkan debat kusir, debat yang non-substantif, dan hanya mempertontonkan perdebatan yang kosong, tanpa roh.

Dan juga hanya melahirkan perdebatan yang tidak mendidik, menggerakkan, menggugah, mencerahkan, menginspirasi, dan mengilhami. Perdebatan terasa hambar, tak bermakna, dan tak berarti.

Politik itu seni. Seni kemungkinan. Atau politik juga bisa dimaknai cerdas atau bijaksana, sesuai makna dalam bahasa Arab “Siyasah”, dan dalam bahasa Inggris “Politics”. (Syafie, 1997). Karena politik itu kebijaksanaan dan kecerdikan, maka debat pun sejatinya harus mencerminkan kecerdikan dan kebijaksanaan.

Kita sedang menanti perdebatan kedua. Adakah kejutan didebat kedua. Atau sama saja nilainya dengan debat perdana. Ataupun lebih buruk dari debat pertama. Tentu itu semua kita akan saksikan di 17 Februari nanti. Hari yang ditunggu dan dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kejutan didebat kedua bisa saja akan terjadi. Dengan tema yang menarik terkait energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Ditambah dengan moderator yang fresh, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki. Membuat debat kedua layak dinanti.

Dinanti bukan hanya karena debat dimoderatori oleh *host* yang *good looking*. Tetapi dinanti karena kita ingin melihat dan menyaksikan kedua Capres menyampaikan visi-misi, dan

program-programnya secara mantap. Dan dengan performance terbaik. Bukan asal-asalan atau ala kadarnya.

Jika perlu, perdebatan juga diisi dengan humor (guyonan-guyonan) politik yang jenaka, menyegarkan, dan intelek. Atau bahkan bisa juga diselipkan, pantun yang memuji satu sama lain. Sehingga perdebatan menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan menggembirakan.

Karena sejatinya, perdebatan tidak hanya diisi, dengan substansi yang mantap dan performance yang dahsyat. Tetapi juga harus diisi dengan humor-humor politik yang bisa membuat penonton terhibur.

Jika perdebatan politik hanya disisi dengan hal-hal serius, maka perdebatan akan terasa kering, garing, dan boring. Tanpa mengurangi substansi dalam berdebat. Guyonan politik menjadi penting dan perlu.

Di saat suhu politik sedang memanas, polarisasi dukungan makin menjadi-jadi, pembelahan politik juga sangat kentara dan tajam, maka guyonan politik yang intelek akan menjadi sesuatu yang menyejukkan dan mendamaikan.

Bagaimanapun, politik bukan hanya membutuhkan keseriusan, untuk mengurusnya. Tetapi juga butuh sentuhan-sentuhan humor-humor politik jenaka, yang bisa meredakan ketegangan.

Dalam berdebat juga butuh perspektif lain. Perspektif yang bisa mendamaikan kedua kubu. Perspektif yang bisa membuat masyarakat yang melihatnya menjadi terpingkal-pingkal. Perspektif yang bisa melemaskan ketegangan, melenturkan yang alot, mencairkan yang keras, dan menyatukan yang berseteru. Perspektif itu adalah humor.

Jika kedua Capres memiliki selera humor yang tinggi. Saya yakin masyarakat yang menonton debat tak akan tegang, tak akan saling serang, tak akan saling menantang, dan tak akan saling menyalahkan, hanya gara-gara beda dukungan dan pilihan.

Sesekali boleh juga para kandidat Capres, bergaya lucu ala komedian. Tanpa harus menghilangkan kewibawaan, tanpa harus menghilangkan status kebangsawanan, tanpa harus jaga *image* (jaim), dan tanpa harus menghilangkan substansi dalam berdebat.

Gaya kocak para Capres, bisa saja menjadi penghibur di tengah tontontan politik yang menyebalkan. Gaya lucu para kandidat, bisa juga menjadi pelipur lara bagi yang sedang terluka. Gaya humoris Jokowi atau Prabowo, bisa saja akan membawa kebahagiaan bagi yang menyaksikannya.

Dalam debat kedua, para Capres perlu terobosan baru, perlu melontarkan ide dan gagasan yang fresh, perlu memainkan isu yang strategis, perlu kreativitas dan inovasi, dan perlu membuat kejutan-kejutan yang bisa mencengangkan bagi kita yang menonton. Dan itu semua, hanya para Capres dan tim suksesnya yang tahu. Dan harus berbuat apa dalam mempersiapkan penampilan di debat kedua nanti.

Jika di 17 Februari nanti, kita tidak menyaksikan sesuatu yang berbeda, dari debat pertama, maka kita semua akan rugi. Ya, akan rugi. Karena kita tidak menyaksikan kehebatan para Capres dalam mempresentasikan maha karya visi-misi dan program-program terbaiknya. Karena kita akan menyaksikan perdebatan calon RI-1. Bukan akan melihat dan nonton permainan ludruk.

Bukan akan menyaksikan debat abal-abal, tanpa persiapan, dan asal-asalan. Kita hanya akan menyaksikan dan menonton perdebatan yang argumentatif, substantif, intelek, berwawasan luas, menghibur, dan penuh humor yang tinggi.

Dan itu semua, akan menjadi salah satu bekal kita, dalam menentukan pilihan. Pilihan yang menjunjung rasionalitas, dengan melihat kualitas debat. Dan menghindari pilihan yang berdasarkan emosional. Oleh karena itu, tampil sebaik mungkin dalam debat kedua, menjadi keniscayaan bagi kedua Capres.

Tampil tanpa persiapan yang baik, hanya akan mengurangi kualitas debat, akan merendahkan diri sendiri, dan tentu akan mengecewakan banyak pihak. Bukannya akan memberi kejutan-kejutan pada masyarakat, dengan ide dan gagasan yang cemerlang, yang bisa menjadi solusi, dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa dalam lima tahun ke depan.

Saling Serang Pasca Debat

Debat ke dua para Capres, telah usai minggu malam lalu. Namun gemanya, masih terasa hingga saat ini. Alih-alih mereda. Perdebatan malah makin meruncing, dan berpindah tempat, ke ruang publik, media sosial, dan media-media lainnya.

Perdebatan antara Jokowi dan Prabowo kemarin. Walaupun belum melahirkan perdebatan yang substantif, mendalam, dan bergaya intelektual. Namun perdebatan sudah cukup menarik. Karena debat berjalan dinamis dan terbuka. Selain lebih baik dari debat pertama. Debat ke dua tersebut, juga dibumbui saling serang antara keduanya.

Dalam debat kedua, Jokowi serasa terlihat percaya diri, dalam menjelaskan dan mengeksplorasi ide-ide dan gagasannya. Tentu juga mengkampanyekan keberhasilan-keberhasilannya, dalam memimpin pemerintahan.

Di saat yang sama, Prabowo banyak memberi apresiasi pada Jokowi, atas capaian-capaian pada kepemimpinan Jokowi. Itu memang sikap kesatria dan patriot Prabowo, yang secara objektif mengakui kesuksesan-kesuksesan Jokowi di bidang-bidang tertentu. Dan mengkritiknya di bidang yang lain.

Sikap menyanjung lawan debat, yang diperagakan Prabowo. Bisa menjadi nilai plus bagi Prabowo. Karena dianggap gentle, mengakui kelebihan lawan. Namun disisi yang lain, bisa menjadi nilai plus juga bagi Jokowi. Karena Jokowi dianggap berhasil, dalam menjalankan roda pemerintahan, selama empat tahun terkahir ini.

Bukan debat jika tidak ada kejutan. Seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya. Ketika diwawancarai teman-teman media. Debat kedua akan melahirkan kejutan. Kejutan itu lahir, dari pernyataan Jokowi, yang mengatakan bahwa Prabowo memiliki tanah yang luas di Kalimantan Timur dan Aceh. Luasnya hingga 340.000 hektar.

Pernyataan Jokowi tersebut, sebenarnya hanya ingin menjawab pertanyaan Prabowo, yang menganggap bahwa bagi-bagi sertifikat tanah, tidak bermanfaat bagi rakyat. Terkesan diserang secara personal. Prabowo pun mengklarifikasi, bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Tanah hak guna usaha (HGU). Dan Prabowo siap mengembalikan ke Negara, jika Negara memintanya.

Persoalan debat tidak selesai dan berhenti di atas panggung. Debat yang lebih liar terjadi diantara sesama tim sukses kedua kubu. Karena Jokowi dianggap unggul dalam berdebat, maka serangan-serangan ke arah Jokowi pun terjadi di ranah media. Jokowi dituduh curang, berbohong, dan lain-lain.

Jokowi dituduh menggunakan earpiece dan pulpen yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Tuduhan tersebut memang tidak berdasar. Cenderung mengada-ada. Dan mengarah pada fitnah.

Tapi itu lah yang terjadi. Kedua kubu sedang mencari titik lemah lawan politik. Untuk disebarkan ke publik. Tak peduli benar atau salah. Tak peduli objektif atau tidak. Tak peduli fitnah atau

bukan. Serang duluan. Hantam duluan. Jeleskan duluan. Fitnah duluan. Yang lain urusan belakangan.

Jokowi juga dituduh berbohong. Karena dalam debat Jokowi mengatakan, bahwa selama tiga tahun terakhir pemerintahannya, tidak ada kebakaran hutan. Faktanya masih ada kebakaran hutan. Jokowi pun sudah mengklarifikasi. Tidak ada kebakaran hutan yang berskala masif, dan tidak ada negara tetangga yang protes. Salah data atau salah ucap, bukan berarti seseorang dianggap berbohong.

Karena pada sebelum-sebelumnya, ketika hutan Indonesia terbakar, negara tetangga batuk-batuk. Dan negara tetangga, yang terserang asap dari Indonesia, akan mengalami banyak kerugian, baik materil maupun immateril.

Ada cerita lucu, jika Indonesia perang dengan negara tetangga. Bakar saja hutan. Kirim asapnya, maka negara tetangga tersebut akan kalang kabut dan kalah. Kelihatannya lucu. Tapi bisa saja guyonan tersebut benar. Buktinya begitu asap mengenai mereka, mereka tidak bisa beraktivitas. Apalagi untuk berperang.

Lupakan kebakaran hutan. Kembali ke urusan tanah Prabowo. Dalam hal HGU Prabowo. Jusuf Kalla pun ikut berkomentar. Bahwa JK-lah yang memberi konsesi tanah tersebut, dan Prabowo membayarnya dengan cash.

Pernyataan JK tentu sangat menguntungkan Prabowo. JK mungkin ingin mendudukan persoalan sebagaimana mestinya. Ingin objekif. Namun posisi JK sebagai ketua dewan pengarah TKN. Menjadikan kubu 01 meradang. Dalam konteks pernyataan JK, Prabowo dianggap berjasa bagi negara.

Mungkin kita sedih, gelisah, dan galau melihat kampanye yang dipertontonkan kedua kubu, yang masih berkuat pada saling serang, fitnah, hancurkan, lawan, dan kalahkan. Kita belum

menemukan roh. Ya, roh kampanye yang menjadi idola dan andalan.

Roh kampanye positif, menggigit, dan tidak menyakiti. Roh kampanye yang hidup, dinamis, mendidik, mencerahkan, dan menginspirasi. Roh kampanye yang substantif, mendalam, detail, dan komprehensif.

Kampanye sejatinya harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Bukan mengumbar nilai-nilai kejahatan. Kampanye dilakukan bukan untuk merendahkan atau menjelekan lawan. Tetapi untuk menyampaikan ide dan gagasan. (Komarudin, 2018).

Apapun di dunia ini, yang tidak memiliki roh akan mati. Manusia tidak memiliki roh, akan mati. Binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta. Semua memiliki roh. Oleh karena itu, semua kejadian di dunia ini menjadi hidup, dinamis dan bermakna.

Begitu juga dengan kampanye. Debat sebagai bagian dari kampanye. Jika dilakukan tanpa roh. Hanya akan monoton, garing, borong, kering, tak bermakna, dan serasa mati.

Memberikan roh pada setiap kampanye. Akan menjadikan kampanye menjadi lebih hidup dan bermakna. Akan positif. Tak akan negatif. Menggerakkan. Bukan membekukan. Apalagi membodohi. Informatif, kreatif, dan inovatif. Dan kampanye akan mendamaikan, menyenangkan, dan membahagiakan. Bukan saling serang.

Stop saling serang dan memfitnah. Tak boleh kita berpikiran yang negatif, dan tidak-tidak kepada para Capres dan Cawapres. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Mereka bukan untuk dicaci dan difitnah. Tapi mereka menjadi Capres dan Cawapres, untuk didukung. Ya, untuk didukung. Bukan untuk dipentung.

Mereka para Capres dan Cawapres memiliki banyak kelebihan. Angkatlah kelebihan-kelebihannya. Mereka memiliki

keberhasilan. Angkatlah keberhasilan-keberhasilannya. Mereka memiliki karakter dan sikap positif, tirulah yang baik-baik dari mereka.

Tak elok dan tak etis, jika kita sebagai bangsa timur dan bangsa yang beragama, melihat Capres dan Cawapres hanya dari sisi negatif. Kapan bangsa ini akan membangun dan maju, jika yang dikampanyekan adalah narasi dan aura negatif dari para kandidat.

BAB 4
DEMOKRASI
DALAM ANCAMAN

Kartu Sakti Jokowi

Jokowi telah mengeluarkan tiga kartu sekaligus. Bukan kartu remi, domino, dan kartu judi yang dikeluarkan Jokowi. Tiga kartu tersebut yaitu, kartu sembako murah, kartu pra-kerja, dan KIP-kuliah. Ketiga kartu tersebut bukan sembarang kartu. Tetapi merupakan kartu sakti Jokowi.

Kartu sakti. Ya, kartu sakti. Karena kartu-kartu tersebut, dikeluarkan di masa kampanye dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Tiga kartu tersebut, menysar emak-emak, kaum millenial, dan masyarakat umum. Kartu sembako murah, sangat dibutuhkan emak-emak, yang sedang gelisah dan galau jika harga sembako melambung tinggi. Emak-emak merupakan pemilih loyal. Suaranya sangat dibutuhkan oleh Capres dan Cawapres (Komarudin, 2019)

Begitu juga dengan dua kartu yang lain. KIP-kuliah. Merupakan kartu sakti, untuk menysar pemilih millenial. Kita tahu anak-anak kampus, atau biasa kita sebut mahasiswa, membutuhkan beasiswa untuk keberlangsungan studinya. Dan mendapatkan beasiswa adalah merupakan suatu kebanggaan.

Kartu pra-kerja juga sama. Selain untuk menolong para pencari kerja, dari kaum millenial. Tentu kartu tersebut, juga

bermanfaat bagi masyarakat umum, yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Emak-emak, kaum millennial, dan masyarakat yang lain, menjadi target dari hadirnya ketiga kartu tersebut. Menguntungkan Jokowi. Namun merugikan Prabowo sebagai penantang petahana. Namun itulah enaknya menjadi petahana, bisa membuat program-program populis untuk kebutuhan rakyat.

Pihak oposisi mengkritik, bahwa Jokowi telah menggunakan jurus mabuk. Menggunakan jurus-jurus sakti, untuk memikat hati pemilih, dengan mengeluarkan program-program populis, di *the last minute*. Di *injury time*. Di ujung permainan politik, mendekati hari H pemilihan.

Ketiga kartu sakti Jokowi tersebut, untuk melengkapi lima kartu sebelumnya yang telah dikeluarkan Jokowi. Otomatis Jokowi sudah mengeluarkan delapan kartu sakti. Kartu yang lima pertama, dikritik ICW, tidak efektif, karena dianggap memboroskan anggaran APBN.

Namun tiga kartu terakhir. Kemungkinan akan efektif. Karena menjadi program andalan Jokowi, yang dikeluarkan di masa kampanye, untuk menyasar semua segmen pemilih.

Karena ketiga kartu tersebut, secara sosiologis dan psikologis, sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama emak-emak dan kaum millennial. Yang menjadi pemilih mayoritas di Pilpres 2019.

Siapa yang tidak butuh sembako murah. Siapa yang tidak butuh beasiswa untuk kuliah. Dan siapa juga yang tidak butuh pekerjaan. Semuanya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Dengan dikeluarkannya tiga kartu sakti Jokowi tersebut. Incumbent bisa di atas angin. Asal realisasi dan implementasinya berjalan dengan baik. Dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Maka simpati kepada *incumbent* tentu akan bertambah.

Jika masyarakat sudah simpati kepada pertahana, dengan jurus-jurus populisnya, maka peluang untuk dipilih kembali sangat besar. Artinya peluang untuk memenangkan Pilpres 2019 sangat terbuka.

Namun harus dicatat. Jika kartu-kartu tersebut di-*launching*. Lalu implementasinya acak-acakan, tidak tertib, tidak adil, tidak rapih, maka bisa saja, program-program tersebut akan merusak Jokowi. Jadi antara *launching* kartu, dengan implementasi harus sejalan dan sehaluan.

Launching yang baik atas ketiga kartu sakti Jokowi. Harus dibarengi dengan implementasi yang baik pula. Agar tidak menjadi serangan balik. Karena program-program yang baik, jika tidak diatur dan diimplementasikan dengan baik, akan menjadi kontra produktif, akan menjadi ganjalan bagi *incumbent*, dan akan merusak citra *incumbent*.

Kartu-kartu sakti yang diikeluarkan Jokowi telah membuat oposisi meradang, gerah, dan jengkel. Karena tidak ada amunisi untuk meng-counter program-program populis Jokowi tersebut. Yang bisa dilakukan tentu dengan mengkritik. Dan memberi janji-janji, serta harapan yang harus lebih baik dari realisasi dan janji-janji Jokowi.

Tak ada yang salah, dengan program-program yang dikeluarkan Jokowi, dengan kartu-kartu saktinya tersebut. Sah-sah saja. Namun karena dikeluarkan di ujung masa kampanye Pilpres. Ini yang menjadi pertanyaan publik dan oposisi.

Pengalaman membutuhkan. Di Pilpres 2009 Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang ketika itu, maju kembali kedua kalinya menjadi calon presiden. Mengeluarkan jurus pamungkas, program bantuan langsung tunai (BLT). BLT menjadi program unggulan dan pamungkas SBY untuk meraih simpati publik. Dan untuk

mengalahkan lawan politik. Singkat cerita, SBY pun melenggang jadi presiden untuk kedua kalinya.

Pola yang sama juga dilakukan Jokowi. Jokowi mengeluarkan tiga kartu saktinya, untuk meraih dan menarik simpati publik. Untung bagi Jokowi. Rugi bagi Prabowo. Tapi itulah politik. Jurusan pamungkas yang dikeluarkan, dalam program-program populis, menjadi andalan bagi petahana untuk menaikkan elektoral.

Selama tidak melanggar aturan. Dan selama tidak menabrak undang-undang. Kartu sakti Jokowi, menjadi obat penawar bagi mereka yang lapar, karena terkena imbas kenaikan harga sembako. Dengan kartu sembako murah, maka masyarakat tidak lagi merasakan tinggi dan mahal nya harga sembako.

KIP-kuliah, menjadi pelipur lara, bagi mahasiswa yang tidak mampu, agar bisa kuliah. Jangan hanya yang kaya saja, yang bisa menikmati indah dan manisnya menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. KIP-kuliah harus menjadi solusi. Solusi bagi mereka anak-anak bangsa, agar bisa kuliah dengan indah.

Kartu pra-kerja, juga menjadi penyemangat bagi mereka yang masih menganggur. Agar jangan putus harapan dalam meraih pekerjaan. Pemerintah sudah menyediakan kartunya. Tinggal memaksimalkan saja penggunaannya.

Sah-sah dan wajar-wajar saja, jika Jokowi mengeluarkan jurusan-jurusan pamungkasnya, dengan mengeluarkan kartu-kartu saktinya. Walaupun memang menguntungkan Jokowi. Dan merugikan Prabowo. Tapi itulah politik. Harus siap dengan segala kemungkinan. Kemungkinan enak. Dan kemungkinan tidak enak.

Pihak oposisi juga harus siap. Jangan kagetan. Jangan meradang. Jangan juga menyalahkan. Ini soal permainan politik. Siapa saja yang dapat meraih simpati publik. Maka dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya.

Kebijakan politis dan populis petahana merupakan hal biasa. Tidak ada yang aneh. Karena siapapun petahannya. Ya, siapapun. Pasti akan menggunakan jurus-jurus pamungkas dengan program-program populisnya untuk meraih hati pemilih.

Narkoba Menyasar Andi Arief

Peredaran narkoba di Indonesia, bak air bah yang membanjiri isi bumi nusantara ini. Tak peduli menyasar siapa. Semua anak bangsa, berpotensi terkena dan menjadi pengguna barang haram tersebut.

Tak peduli, pejabat atau rakyat, politisi atau kurcaci, dosen atau mahasiswa, guru atau siswa, Polisi, TNI, ASN, pekerja, petani, nelayan, orang ningrat atau masyarakat pinggiran, semuanya menjadi sasaran peredaran Narkoba.

Yang tentu mengagetkan, tidak kurang dari sepuluh politisi di republik ini, terjerat Narkoba. Entah sebagai bandar, pengedar, atau sekedar pengguna. Salah satu politisi yang terkena tersebut Andi Arief.

Sejak Andi Arief ditangkap polisi, di sebuah hotel hari Minggu, 3 Maret 2019 lalu. Telepon saya sering berdering. Lebih sering dari biasanya. Karena banyak teman-teman media, menanyakan apa dampak kasus narkoba Andi Arief terhadap Partai Demokrat, partai yang telah membesarkan namanya. Juga sekaligus apa dampak, terhadap Prabowo-Sandi.

Karena saking santer dan gencarnya pemberitaan, terkait penangkapan Andi Arief. Pada Selasa, 5 Maret 2019, di acara

Prime News CNN TV Indonesia, saya diminta untuk menjadi narasumber untuk mengulas kasus Andi Arief dan apa dampaknya terhadap elektoral Demokrat.

Analisa saya sederhana saja. Tak perlu rumit dan jelimet, untuk menjelaskan kasus narkoba yang menerpa Andi Arief. Kasus Andi Arief tersebut merupakan kasus personal. Apalagi hari ini pihak Kepolisian menjelaskan, bahwa kasus Narkoba Andi Arief tidak dilanjutkan ke pihak selanjutnya. Artinya hanya direhabilitasi.

Dia memang icon Demokrat, selalu terdepan dalam membela Demokrat dan keluarga SBY. Itu sah-sah saja dan sangat wajar. Karena Andi Arief, merupakan Wasekjen Demokrat, dan juga dididik dan dibesarkan oleh SBY.

Cuitan twitternya menyasar dan menembak banyak pihak. Entah kawan maupun lawan. Entah partai satu koalisi, maupun di luar koalisi. Mengkritik kubu 02 yang didukung partainya, juga menyentil kubu 01, yang menjadi lawannya.

Cuitan-cuitan Andi Arief, bisa saja banyak membuat orang lain marah. Tapi itulah gayanya, gaya politisi-aktivis yang ceplas-ceplos, menyerang sana-sini, yang membuat banyak pihak tersinggung.

Kasus narkoba Andi Arief, sedikit banyak, besar atau kecil merusak citra Partai Demokrat. Namun belum tentu menggerus elektabilitas partai tersebut. Kasus narkoba Andi Arief, merupakan fenomena sesaat. Akan tertutup oleh pemberitaan media yang lebih besar lagi terkait Pilpres.

Apalagi masyarakat Indonesia itu memiliki dua sifat unik, yaitu: Mudah memaafkan dan mudah melupakan. Jadi kasus Andi Arief, akan cepat berlalu dan akan tergulung, oleh ombak pemberitaan lain, yang tak kalah hebohnya yang sudah menghadang di depan mata.

Demokrat bukan partai kemarin sore. Hanya karena satu kasus. Lalu goyang dan oleng. Demokrat memiliki pengalaman, dan telah menjadikan sang pemiliknya menjadi Presiden RI dua periode (sepuluh tahun).

Mesin partai sudah bergerak. Tokoh-tokoh senior partai juga tidak diam diri, mereka berjalan dan bekerja untuk memenangkan Pileg. Elit-elit partai juga pasti tak mau kalah, selain terjun langsung ke gelanggang politik untuk berkampanye, mereka juga memberi semangat para kader untuk berjuang menaikkan suara partai di Pileg. Ditambah lagi banyak kepala daerah dari Demokrat yang sudah siap untuk menjadikan Demokrat sebagai partai pemenang. Atau paling tidak masuk lima besar Pemilu 2019.

Apalagi Andi Arief, juga sudah mengundurkan diri dari Demokrat. Jadi sulit lawan politik Demokrat untuk mengkait-kaitkan lagi kasus narkoba Andi Arief dengan Demokrat. Memutus mata rantai, kasus narkoba yang menerpa Andi Arief, dengan cara mengundurkan diri dari Demokrat, adalah langkah terbaik.

Antar partai politik sedang saling bunuh. Saling jegal. Dan saling menghancurkan. Posisi Demokrat yang dalam survey, selalu masuk lima besar dan diprediksi lolos PT 4 %. Membuat partai-partai lain, menginginkan Demokrat turun tahta. Agar bisa tersalip oleh partai lainnya.

Bagi Demokrat, Pileg adalah harga mati. Harus menang. Atau paling tidak, perolehan suara Demokrat di Pileg 2019 harus lebih banyak dari Pileg 2014 yang lalu. Karena Pileg 2019, menjadi ajang pertempuran serius bagi Demokrat, maka tentu kasus Narkoba Andi Arief harus cepat diselesaikan. Agar perjuangan menuju 17 April 2019 menjadi ringan.

Partai Demokrat menghendaki sistem hukum nasional yang demokratis dan menjunjung tinggi rasa keadilan (Setiawan dan

Nainggolan, 2004: 182). Dalam kasus Andi Arief pun Demokrat ingin diselesaikan secara adil tanpa pandang bulu. Bila tak bersalah harus dibebaskan atau paling tidak direhabilitasi.

Suara Demokrat di Pileg 2019, akan menentukan Pilpres 2024 nanti. Karena bagaimanapun, Demokrat memiliki sang “golden boy”, AHY yang sudah diorbitkan di Demokrat untuk dapat berkompetisi di Pilpres 2024 yang akan datang. Entah nyata atau tidak. Kita lihat saja episode politik Indonesia ke depan.

Jalan menuju Pemilu 2024 memang masih lama. Masih panjang. Namun jika tidak dipersiapkan sejak dini, maka akan sulit terrealisasi. Jika pada Pileg 2019 ini, suara Demokrat bertambah, maka peluang untuk mengambil alih kepemimpinan 2024 akan terbuka.

Tidak mudah memang. Yang pastinya akan terjal dan rumit. Namun itulah jalan politik. Untuk mendapatkan kekuasaan, memang harus bertempur dalam Pemilu dan berdarah-darah dalam merebutnya. Asalkan kekuasaan tersebut diraih dengan konstitusional, sah-sah saja.

Jika Jokowi memiliki Nawacita (sembilan program unggulan). Maka Demokrat memiliki dan sudah melaunching 14 program prioritas. Salah satu program unggulan tersebut yaitu pemberantasan Narkoba. Ya, pemeberantasan Narkoba.

Walaupun dalam faktanya, Narkoba sudah menysar kadernya sendiri, Andi Arief. Namun hal tersebut sangat bagus. Karena kasus Andi Arief tersebut, menjadi bahan evaluasi dan refleksi agar Demokrat mawas diri, dan agar menjaga kader-kadernya dari jeratan Narkoba yang sudah menggurita.

Dan bersama-sama pemerintah, menjaga bangsa ini dari serbuan Narkoba, yang makin hari makin merajalela dan tak terkendali.

Narkoba lebih bahaya dari korupsi. Selain merusak akal sehat. Narkoba juga dapat merusak generasi bangsa. Kasus Narkoba Andi Arief, jangan hanya penting bagi Demokrat. Bukan sekedar urusan elektoral. Tapi harus penting juga, bagi kita semua sesama anak bangsa. Agar kita bersama-sama memerangi pemberantasan Narkoba dengan segenap jiwa dan raga.

Tak perlu menyalahkan siapapun. Tak perlu dipolitisir. Tak perlu dikaitkan dengan Demokrat. Biarlah Andi Arief menyelesaikan persoalan yang melilitnya. Apalagi pihak Kepolisian hanya meminta Andi Arief untuk direhabilitasi, tidak ditahan, dan kasusnya tidak dibawa ke tahap penyidikan. Maka jelas sudah, Demokrat tak akan terseret-seret lagi, dengan kasus Narkoba Andi Arief Tersebut.

Siapapun kita. Mari kita hindari dan jauhi narkoba. Narkoba bukan hanya akan merusak bangsa. Tetapi juga merusak diri sendiri. Jaringan pengedar narkoba sudah di mana-mana. Jaga diri kita, keluarga, dan lingkungan agar terbebas dari narkoba. Say no to narkoba.

Menanti Debat Ketiga

Tema dan isu debat ketiga tak kalah menarik dengan debat-debat sebelumnya. Persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan merupakan isu seksi dan menjadi isu sehari-hari yang dihadapi masyarakat.

Kini giliran Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, yang akan menjelaskan kampanye dengan janji-janji terbaiknya. Kedua Cawapres tentu akan jualan isu-isu tersebut untuk menarik simpati pemilih.

Laiknya jualan, maka yang akan dipromosikan dan dikampanyekan merupakan produk-produk terbaik. Dengan kualitas dan kemasan terbaik. Dan jangan lupa harus disampaikan dengan cara yang terbaik pula.

Debat sebagai bagian dari kampanye, tentu harus berjalan menarik, unik, dan memiliki daya tarik. Walaupun hanya akan disampaikan oleh para Cawapres, debat jangan sampai berjalan ala kadarnya, tanpa substansi dan esensi.

Salah satu persoalan yang penting, untuk dibahas dalam debat, yaitu terkait pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikan merupakan hal utama dan pertama, agar suatu bangsa menjadi

bangsa maju. Jika pendidikannya baik, maka negara pun akan maju. Begitu juga sebaliknya, Jika pendidikannya kacau, maka negara pun kacau.

Banyak negara fokus dan menginvestasikan pembangunan SDM, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan. Lihat saja Jepang, pasca Jepang dibom atom oleh Sekutu, tahun 1945. Kaisar Jepang hanya berkata, “berapa jumlah guru yang tersisa”. Bukan berkata yang lain. Ya, bukan berkata tentang persoalan lain. Pendidikan menjadi inti dari kemajuan Jepang saat ini.

Hanya dalam waktu kurang dari 25 tahun. Jepang sudah menjadi negara maju. Menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Bagaimana nasib pendidikan kita. Bagaimana nasib guru dan dosen di republik ini. Masih sangat menyedihkan.

Banyak guru honorer, yang sudah mengabdikan puluhan tahun, hanya dihonor Rp 300.000 perbulan, banyak dosen yang digaji di bawah UMR. Menyedihkan memang. Tapi itulah potret sekelumit dunia pendidikan kita. Yang harus dibahas dan dicarikan solusinya, bukan hanya dalam debat. Tapi juga dalam implementasi kebijakan ketika mereka terpilih.

Tak ada peradaban yang tak dibangun dengan pendidikan. Bagaimana ingin membangun peradaban. Jika dunia pendidikannya masih carut-marut. Dunia pendidikan di Nusantara ini, bagai benang kusut. Harus segera diurai, dipetakan permasalahannya, lalu dicarikan jalan keluarnya.

Membicarakan persoalan pendidikan di negeri ini, tak akan ada habis-habisnya. Memang banyak perbaikan di sana-sini. Banyak juga prestasi yang ditorehkan. Tetapi juga banyak bolongnya. Banyak kurangnya. Dan banyak juga kelirunya.

Bangsa besar adalah, bangsa yang peduli akan pendidikan anak bangsanya. Anak bangsa yang terdidik, tercerahkan, dan

berilmu akan menjadi lokomotif perubahan, sehingga bisa mengubah arah bangsa ke depan.

Lihatlah para pendiri bangsa ini, sebut saja Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Syahrir, Agus Salim, Oemar Said Tjokroaminoto, dll, mereka adalah tokoh-tokoh terdidik dijamannya. Dan mereka mampu memerdekakan Indonesia dan membawa Indonesia menjadi bangsa berdaulat.

Soekarno sebagai pemimpin berlatar pendidikan Barat yang memiliki keterpautan historis dengan organisasi-organisasi Islam dan menghormati ulama, juga tokoh lain, mencoba menjembatani kesenjangan antara dua kutub yang berbeda (Islam dan nasionalis), dalam desain institusional (Latif, 2017:74). Sehingga potensi bangsa ini bisa bersatu dan tidak terpecah-pecah.

Banyak potensi yang dimiliki oleh anak bangsa. Namun jika potensi besar anak bangsa, tidak disalurkan dengan pendidikan yang baik, maka potensi itu akan sirna. Banyak anak bangsa yang pintar di negeri ini. Tapi karena sistem pendidikannya masih kurang baik. Maka orang-orang pintar tersebut masih berada di menara gading.

Banyak juga orang-orang Indonesia, yang hebat dan pintar yang ada di luar negeri. Tapi mereka malas dan takut ke Indonesia. Karena begitu mereka ke Indonesia. Tak dihargai dengan layak. Dan tak ada pekerjaan yang cocok untuk berkarya dan berinovasi. Akhirnya mereka tak ingin kembali. Masih tetap di luar negeri. Di negeri orang mereka besar. Di negeri orang mereka hebat. Di negeri sendiri tak dihargai.

Siapa pun yang terpilih nanti. Sejatinya pemerintah harus membujuk mereka, orang-orang cerdas pandai yang masih di negeri orang untuk kembali. Buat kebijakan agar mereka bisa mengabdikan untuk Indonesia. Siapkan anggarannya, tempatnya,

laboratoriumnya, dan hal-hal apa saja yang diperlukan, untuk mengembangkan riset-riset unggulan.

Jika bangsa ini ingin menjadi bangsa besar dan disegani di dunia, maka anak-anak bangsanya, harus bergerak bersama berkarya di bidang masing-masing. Menumbuhkan kreativitas, memupuk inovasi, dan menghasilkan produk berteknologi tinggi, yang canggih dan bermanfaat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia. Tetapi juga bagi dunia.

Dunia pendidikan kita, masih berkulat pada perubahan kebijakan dari menteri lama ke menteri baru. Ganti menteri ganti kebijakan. Ganti pejabat, ganti kebijakan, apa yang sudah ditetapkan oleh pejabat lama di rubah. Inilah yang membuat dunia pendidikan kita jalan ditempat. Tidak maju-maju. Masih meributkan cangkang daripada isi.

Sejahterakan guru dan dosennya. Buat mereka nyaman berkreativitas. Jika gurunya masih banyak yang digaji di bawah standar, dan dosennya dihonor di bawah UMR. Jangan harap pendidikan kita akan maju. Jangan harap pendidikan kita akan memiliki daya saing. Guru dan dosen sejahterakan, maka pendidikan Indonesia akan tercerahkan.

Bagaimana ingin membangun peradaban. Jika guru dan dosennya masih lapar. Masing ngamen sana-sini (mengajar sana-sini), hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Peradaban bisa dibangun oleh mereka yang sudah mapan. Sudah kenyang. Sudah selesai terkait dengan urusan perut. Bukan ribut dan meributkan urusan perut.

Namun kita harus tetap optimis. Serumit dan sepelik apapun dunia pendidikan di republik ini. Kita pasti punya jalan keluar. Punya solusi untuk mengatasinya. Pendidikan tak boleh diabaikan. Pendidikan harus menjadi prioritas. Tentu kita juga

tidak mengesampingkan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial-kebudayaan, dan isu-isu lainnya.

Seperti isu BPJS kesehatan yang dalam implementasinya rumit dan berbelit-belit. Pasien BPJS dinomer duakan. Begitu juga soal isu pengangguran dari kaum terdidik. Makin hari makin banyak jumlahnya. Harus tuntas dibahas oleh kedua Cawapres dalam debat.

Dan yang terpenting lagi adalah soal budaya. Kita saat ini sudah kehilangan budaya malu. Ya, budaya malu. Korupsi terjadi karena kita tidak punya malu. Narkoba merajalela, free sex merebak, minuman keras meluas, pencurian, kekerasan, pembunuhan, saling fitnah, dan saling menghabisi. Karena kita sudah tercerabut dari budaya malu. Harusnya kita malu melakukan hal-hal tersebut. Dan harusnya menghindarinya.

Kita lihat saja di debat ketiga nanti, pada 17 Maret 2019. Kita akan menyaksikan capaian dan janji-janji mereka. Sandi yang berpendidikan luar negeri, dan Ma'ruf Amin yang bergelar profesor. Mampukah mereka menampilkan *performance* terbaiknya. Kita tentu sedang menanti hari debat itu. Apapun hasilnya. Bangsa ini tak boleh kehilangan arah. Anak bangsa juga harus selalu optimis. Jangan pernah pesimis. Hadapi masa depan dengan optimisme dan senyuman. Niscaya kita akan tercerahkan dan mencerahkan.

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Dua puluh delapan hari menjelang hari H Pilpres. Kita dikagetkan dengan survey dari Litbang Kompas. Survey yang membalikan dan berbeda dengan survey-survey yang ada. Survey yang menempatkan elektabilitas Jokowi di bawah angka 50 %. Tentu membuat rame dan mewarnai jagat media.

Survey yang merilis penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 3,4 % dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Sandi di angka 4,7 %, telah menjadi heboh. Ditambah lagi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dalam survey tersebut di angka 49,2 %.

Secara psikologis, survey Litbang Kompas tersebut membangkitkan semangat kubu 02. Dan sedikit membuat kaget kubu 01. Karena survey Litbang Kompas, berbeda dengan hasil survey lembaga survey lain, seperti SMRC, LSI Denny JA, Chartha Politika, dan Indikator, yang menempatkan petahana elektabilitasnya di atas 50 %.

Dalam survey tersebut, Jokowi-Ma'ruf mendapat elektabilitas 49,2 % dan Prabowo-Sandi 37.4 %. Ada perbedaan selisih jarak 11,8 % antara elektabilitas kubu 01 dengan kubu 02. Dan di luar itu, ada 13 % masyarakat yang merahasiakan pilihannya.

Jika dibandingkan dengan survey Litbang Kompas sebelumnya, yang dilakukan di bulan Oktober 2018. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di angka 52,6 % dan Prabowo-Sandi 32,7 %. Saya tidak pernah meragukan survey Litbang Kompas tersebut. Tapi kita juga harus kritis terhadap hasil survey beberapa lembaga survey.

Namun ada catatan dari saya. Ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Litbang Kompas tidak berani mengeluarkan hasil surveynya. Mungkin melakukan survey. Tapi surveynya tidak dipublikasi. Di keep. Karena bisa saja Litbang Kompas sudah tahu, bahwa arah angin kemenangan mengarah ke Anies-Sandi.

Dan jika kita bandingkan juga, dengan hasil survey Litbang Kompas, yang dirilis delapan belas hari, sebelum pemilihan di Pilpres 2014 yang lalu. Yang menjelaskan bahwa elektabilitas Jokowi-JK 42,3 % dan Prabowo-Hatta 35,3%. Selisih suara keduanya terpaut 7 %. Saat ini selisihnya 11 %. Jadi kemungkinan menang petahana masih sangat besar.

Bedanya ketika Pilpres 2014, Jokowi bukan petahana. Sedangkan di Pilpres 2019 Jokowi sebagai incumbent. Sejatinya seorang incumbent, harusnya menang mudah. Namun Pilpres 2019 butuh usaha keras bagi Jokowi-Ma'ruf agar tetap unggul, lalu menang.

Survey Litbang Kompas, jangan dijadikan satu-satunya referensi, dalam mengambil keputusan. Jadikan hasil survey Litbang Kompas sebagai kompas (petunjuk arah), untuk melakukan evaluasi dan refleksi.

Ada dua sisi, yang bisa didapatkan, dari hasil survey Litbang Kompas di atas. Kubu Jokowi-Ma'ruf bisa saja kurang happy atas survey tersebut. Namun perlu dicatat. Hasil survey tersebut justru baik. Bahkan sangat baik bagi kubu 01. Sebagai warning. Agar tetap waspada untuk menjaga dan mempertahankan keunggulan.

Bisa jadi, jika tidak ada hasil dari survey Litbang Kompas, kubu 01 bisa saja terlena. Merasa aman. Karena berdasarkan survey yang dilakukan lembaga lain, jarak elektabilitas antara Jokowi dengan Prabowo, di angka 15-20 % yang mengunggulkan Jokowi. Justru yang berbahaya adalah jika sudah merasa aman, lalu diam, tidak bergerak.

Survey Litbang Kompas, juga bisa dijadikan second opinion. Justru kubu Jokowi-Ma'ruf harus bersyukur, dengan hasil survey tersebut. Karena bisa dijadikan sebagai pemantik agar para pendukungnya, untuk lebih keras lagi dan lebih giat lagi memenangkan dirinya. Tak akan ada kemenangan tanpa kerja keras dan kesungguhan.

Sedangkan untuk kubu 02, mungkin sedang merasa happy. Semangatnya tumbuh kembali. Namun perlu diingat. Jangan geer dulu. Walaupun Prabowo-Sandi naik dalam elektabilitas. Tetap saja, masih ada jarak 11.8 % yang harus dilampaui oleh keduanya.

Tetap saja, Jokowi-Ma'ruf masih unggul, dalam survey Litbang Kompas tersebut. Walau pun memang, keunggulannya makin menipis. Oleh karena itu, di tengah polarisasi dukungan yang sudah menggumpal dan mengkristal. Suara undecided voters sangat menentukan. Ya, sangat menentukan.

Namun persoalannya. Apakah 13 % pemilih yang masih merahasikan pilihannya tersebut, memilih kubu 01 atau kubu 02. Belum tentu. Mereka belum tentu memilih. Belum tentu datang ke TPS untuk mencoblos. Apes-apesnya sebagian dari mereka memilih dan sebagian lagi Golput.

Saya banyak mendapatkan pertanyaan, dari mahasiswa-mahasiswa di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) dan kaum millennial lainnya. Sebagian besar, mereka tidak terlalu suka dengan narasi kampanye yang dikembangkan oleh kedua kubu. Dan mereka lebih condong untuk Golput.

Namun saya katakan kepada mereka. Walau pun Golput itu hak. Namun menjadi Golput, bukanlah pilihan terbaik. Memilih salah satu dari kedua kubu, adalah pilihan terbaik. Karena tidak ada kebijakan di negeri ini, bahkan di dunia ini, yang tidak melalui proses politik.

Jadi jika dalam lima tahun ke depan, harga sembako naik, kesehatan mahal, biaya pendidikan melambung, mencari pekerjaan susah, listrik naik, harga bensin naik, harga tabung gas naik dan banyak kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Maka jangan salahkan presiden terpilih. Jangan salahkan mereka.

Yang salah adalah anda dan kita semua, yang tidak peduli dengan politik. Yang abai terhadap politik. Yang salah karena anda dan kita Golput. Hilangkan untuk berpikir Golput. Kedua kubu merupakan putra-putra terbaik bangsa. Masa iya tidak ada yang positif dari mereka.

Ribut-ribut hasil survey Litbang Kompas tersebut, merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi. Semua media, kita semua, termasuk Litbang Kompas tentu memiliki kepentingan. Ya, memiliki kepentingan.

Namun saya percaya, jika survey Litbang Kompas tersebut dilakukan dengan objektif dan profesional. Namun jangan terlalu dijadikan acuan. Jadikan peta jalan saja. Untuk melakukan evaluasi dan refleksi.

Tak ada yang salah, dengan hasil survey Litbang Kompas. Walau pun beberapa kalangan, meragukan terkait metodologi dan responden yang dipilih. Apapun itu. Kita boleh percaya dengan angka-angka. Dan boleh juga tidak percaya dengan angka-angka. Karena dalam ilmu statistik, dikenal juga istilah "*how to lie with statistics*", bagaimana berbohong dengan statistic (Huff, 2002).

Pemilu hanya tinggal 27 hari lagi. Masih ada kesempatan kepada kedua kubu, untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Dan isu-isu dalam 27 hari ke depan, akan sangat menentukan. Tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dengan isu yang akan muncul dan berkembang. Siapapun yang siap. Merekalah yang akan menang.

Beban Ideologi Debat Keempat

Debat keempat sudah mendekat. Debat yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2019 akan mempertemukan kembali Jokowi versus Prabowo. Laiknya debat, mereka harus adu argumen. Bukan adu serangan. Adu ide dan gagasan. Bukan adu nyinyiran. Adu visi-misi. Bukan adu kisi-kisi. Dan adu kecerdasan. Bukan adu kedunguan.

Debat yang akan membahas dan mengulas persoalan ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional menjadi akan sangat menarik dan dinanti. Jika kedua Capres, mampu menjelaskannya dengan cara mempesona. Jika hanya disampaikan dengan datar, maka gagasan yang ada akan hampa dan tak bermakna.

Bicara ideologi (Rocamora, 1991: 96), maka percuma mencari ideologi yang terumus dengan baik, padat dan lengkap dalam partai (khususnya PNI ketika itu). Bukan saja karena kualitas seperti itu tidak ada, melainkan karena tatanan dan kepaduan ideologi PNI. Yakni Marhaenisme, lebih berada pada bidang tindakan dan penerapan politik daripada dalam logika gagasan. Ideologinya tergantung pada kebutuhan partai, ditempa oleh tuntutan sejarah yang saling bertentangan, susunan pimpinan partai, dan kondisi kehidupan politik Indonesia yang cepat bergerak.

Debat keempat tentu saja akan menentukan. Menentukan kehebatan kedua Capres tersebut. Bukan hanya kehebatan dalam mengolah kata. Tetapi juga kehebatan dalam menampilkan data. Bukan hanya hebat dalam berargumentasi. Tetapi juga hebat dalam performance.

Debat juga akan menentukan arah dukungan swing voters. Apakah mereka akan akan berubah pikiran, lalu menentukan pilihan. Ataukah justru mereka akan diam, lalu menjadi Golput.

Di saat Pemilu hanya tinggal hitungan hari. Memberikan penampilan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keniscayaan. Membangun narasi kebajikan adalah keharusan. Dan berdebat dengan rasional, dalam, detail, dan komprehensif juga menjadi kewajiban.

Debat keempat bukanlah debat tanpa hasrat. Hasrat untuk membangun bangsa yang hebat harus ditanamkan dalam jiwa Capres. Jangan juga berdebat. Tetapi tanpa makna. Berdebat. Tapi tanpa arti. Berdebat. Tapi tanpa kesan yang membanggakan.

Debat bukanlah rutinitas kampanye di atas panggung semata. Debat bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk keren-kerenan. Bukan juga sebagai formalitas. Tetapi untuk menjelaskan, mengulas, dan mengeksplor gagasan terbaik. Program-program terbaik. Dan visi-misi terbaik, untuk Indonesia yang lebih baik.

Debat keempat juga harus melahirkan solusi. Solusi atas persoalan-persoalan bangsa, yang makin hari makin rumit dan tanpa arah. Bangsa ini adalah bangsa besar. Dibutuhkan ide dan gagasan besar, untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang membanggakan.

Ideologi merupakan persoalan fundamental bangsa. Bangsa yang tak berideologi akan mati. Pancasila harga mati dan tak boleh mati. Pancasila harus tetap berdiri tegak hingga kapanpun.

Tak boleh ada kelompok atau siapapun, yang boleh mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Jika ada kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Dan ingin merongrong Pancasila. Maka kitalah yang harus menjaga dan mempertahankannya. Bahkan kita juga berkewajiban untuk melestarikannya.

Kemunculan kelompok-kelompok yang ingin menggoyang Pancasila harus dilawan. Pancasila adalah anugerah. Ya, anugerah dari Allah SWT. Dengan Pancasila kita bisa bersatu. Dalam naungan Pancasila kita bersaudara. Dan dalam cahaya Pancasila, kita juga saling menjaga.

Ideologi Pancasila jangan hanya ada dalam kertas. Jangan hanya ada dalam buku. Jangan hanya dalam kelas. Jangan hanya dalam pikiran. Jangan hanya ada dalam hati. Namun harus terimplemetasikan dan termanifestasikan dalam perilaku hidup sehari-hari.

Ideologi yang tak terimplementasikan dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya akan menjadi ideologi yang beku, tak bergerak, dan mati. Tak memiliki roh. Dan tak akan berarti.

Sama halnya dengan ajaran agama. Jika hanya ada dalam kitab suci, hati dan pikiran. Jika tidak diimplementasikan, tak akan punya arti. Tak akan punya makna. Dan tak hidup. Jika ideologi dan agama ingin hidup dan menjadi jalan hidup, maka hendaknya harus terimplementasikan.

Ideologi ataupun ajaran agama apapun di dunia ini. Termasuk di Indonesia, akan mencerahkan dan menjadi sumber inspirasi, jika dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, ideologi atau agama yang hebat adalah, jika berpijak pada nilai-nilai Tuhan yang dapat dijalankan dalam kehidupan keseharian.

Pembubaran HTI oleh negara juga bagian dari persoalan ideologi. Pemerintah tentu sudah mengkaji secara mendalam, atas keputusannya membubarkan HTI. Secara kelembagaan HTI telah dibubarkan. Namun secara gerakan, bisa saja masih berjalan. Tentu eks HTI lebih leluasa bergerak *under ground* untuk memilih dan mendukung Capres tertentu.

Kita semua harus menjaga Pancasila. Kita harus menjadi “the guardian of Pancasila”. Tak ada ideologi lain, yang lebih baik dari Pancasila. Tidak ada lagi ideologi lain, yang cocok untuk Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbaik untuk kita semua. Untuk rakyat Indonesia.

Persoalan ideologi, sesungguhnya bukan hanya persoalan keyakinan semata. Namun bertali-temali dengan persoalan lain. Berkorelasi dengan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan, seni, dll. Apakah masyarakat miskin, masih memikirkan ideologi. Apakah masyarakat yang kecewa kepada negara, masih memikirkan ideologi.

Ideologi yang kuat dan hidup, adalah ideologi yang dapat mencerahkan dan memberi inspirasi, bagi yang meyakiniinya, agar hidup sesuai dengan nilai-nilai, yang ada dalam ideologi tersebut. Ideologi juga harus menjadi sumber kekuatan agar masyarakat bekerja keras. Dengan kerja keras dan cerdas. Agar kemiskinan menjauh dan hilang.

Saya sering mengisi tentang empat pilar berbangsa dan negara: Pancasila., UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI ke daerah-daerah. Dari sekolah ke sekolah. Saya merasakan bahwa Pancasila masih hanya sekedar dihafal. Belum termanisfetasikan dalam jiwa, raga, dan terimplentasikan dengan baik.

Apalagi jika kita melihat perilaku elit politik. Mereka berkampanye, bermanuver, melakukan tendangan salto, saling

serang, saling fitnah, saling tikam, saling menjatuhkan, dan saling menebar hoaks. Itu semua merupakan perilaku-perilaku yang tidak Pancasilais.

Mengaku Pancasilais. Tetapi ucapan dan perilakunya jauh dari norma-norma Pancasila. Mengklaim diri merasa paling Pancasilais. Tetapi karakternya busuk. Dan tidak mencerminkan politisi yang santun dalam berbicara. Dan beretika ketika berperilaku.

Mengaku Pancasilais tapi otak dan pikirannya berlawanan dengan Pancasila. Mengaku Pancasila abadi. Tapi kelakuannya mencemari nilai-nilai luhur Pancasila. Mengaku setia terhadap Pancasila. Namun ucapan dan perbuatannya bertolak belakang dengan karakter Pancasila yang tinggi.

Saya bukan tidak mau membahas persoalan pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional yang juga menjadi tema debat keempat. Mungkin akan saya tulis pada tulisan-tulisan saya berikutnya. Saya memilih persoalan ideologi dalam debat keempat. Karena persoalan ideologi sangat penting dan mendasar. Yang akan menjadi masalah jika tidak diselesaikan.

Karena ancaman terhadap ideologi bangsa sangat nyata. Jadi ideologi harus dikawal dan dijaga. Jangan biarkan ideologi menjadi lapuk, lalu dimakan rayap. Ideologi tak akan bersinar, mencerahkan, dan berdaya guna. Jika kita semua sebagai user, tidak memanfaatkannya secara positif.

Demokrasi dalam Ancaman

Detik-detik menentukan itu akan segera tiba. Hanya tinggal hitungan hari, nasib bangsa akan dipertaruhkan. Tiga belas hari ke depan akan menjadi hari yang bersejarah, dalam perjalanan hidup bangsa. Di 17 April 2019 detik-detik menentukan itu akan terjadi. Di 17 April 2019 juga kita akan menyaksikan, siapa yang akan keluar sebagai pemenang.

Seru, mendebarkan, dan menegangkan bercampur menjadi satu. Mengkhawatirkan belum tentu. Menjadi taruhan perjudian bisa jadi. Siapapun yang menang nanti, sudah dicatat di “Lauhul Mahfudz”. Tuhan punya catatan, siapa yang akan memang. Namun kita sebagai manusia, harus berikhtiar terbaik dalam memilih pemimpin terbaik.

Apakah demokrasi akan berjalan on the track, atau sebaliknya berwajah bopeng, rusak, dan dalam ancaman. Pemilu menjadi indikator, apakah suatu negara termasuk negara demokratis atau bukan. Dan Pemilu yang terbuka, jujur, adil, bebas, dan rahasia menjadi pegangan kita dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, mejadikan Pemilu yang free dan fair adalah suatu keniscayaan. Karena jika bangsa ini, tidak bisa

menyelenggarakan Pemilu secara baik, maka demokrasi sedang dipertaruhkan. Seperti apa kata (Linz, 2001), dalam bukunya menjauhi demokrasi kaum penjahat. Demokrasi jangan dijadikan alat oleh para kaum penjahat untuk mempertahankan dan merusak demokrasi.

Demokrasi di Indonesia sedang dalam ancaman. Betapa tidak. Proses Pemilu sedang berjalan. Tuduhan kubu 02 yang menganggap penyelenggara Pemilu tidak netral, lalu berniat mendelegitimasi KPU, dan penyelenggara Pemilu yang lainnya. Demonstrasi di kerahkan, sebagai alat tekan, agar KPU tidak memihak dan tidak melakukan kecurangan.

Bahkan Amien Rais, salah satu tokoh sentral kubu 02 menyerukan, jika ada indikasi kecurangan, mereka tidak akan membawa ke jalur hukum – ke MK—tetapi lebih akan memilih melakukan *people power*. Kita boleh sependapat, atau pun tidak sependapat, dengan pernyataan sang tokoh reformasi 1998 tersebut.

Namun langkah *people power* di negara demokrasi, merupakan langkah aneh. *People power* biasa terjadi di negara-negara yang otoriter. Pemimpinnya anti demokrasi. Rakyatnya dibodohi. Jadi *people power* di republik ini, bukanlah pilihan terbaik. Bahkan bisa merusak demokrasi. Dan bisa mengancam demokrasi.

Ketika kita sudah bersepakat memilih demokrasi, sebagai jalan politik. Maka mekanisme hukum lah yang harus dikedepankan. Karena negara demokrasi, harus selaras atau paralel dengan penegakkan hukum.

Jika seandainya kubu 02 merasa dicurangi, secara nyata dan itu ada buktinya, maka bawalah bukti-bukti kecurangan tersebut ke jalur hukum. Dan MK lah, yang nanti akan mengadili apakah ada kandidat, yang curang atau tidak.

Zaman semakin terbuka. Dan semakin canggih. Arus informasi luar biasa sangat cepat. Media sosial bisa menjadi alat kampanye, sekaligus alat kontrol untuk mengawasi mereka yang akan berperilaku curang. Jika nanti ada yang curang di TPS, kan tinggal di foto saja sebagai alat bukti. Lalu laporkan ke yang berwenang.

Demokrasi punya aturan. Demokrasi punya rule of the game yang harus ditaati. Demokrasi memberi ruang kepada dua kubu, baik 01 atau 02 untuk saling mengawasi, mengontrol, dan mengkritik satu sama lain. Jika ada indikasi kecurangan, maka selesaikan via jalur hukum. Bukan jalur jalanan, yang justru akan merusak demokrasi.

Jika ada indikasi kecurangan, silakan upload di media sosial, agar masyarakat tahu. Namun yang di-upload, haruslah bukti-bukti kecurangan yang nyata apa adanya. Bukan bukti yang dibuat-buat. Atau hasil editan. Karena bisa saja, kubu tertentu menuduh kubu yang lain, dengan bukti yang lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jika terlihat ada indikasi kecurangan, silakan laporkan. Jangan sampai menuduh tanpa bukti. Tuduhan tanpa alat bukti, hanya akan memperkeruh dan mengacaukan proses demokrasi. Dan ini yang akan memicu terjadinya konflik di kemudian hari.

Di zaman now yang terbuka ini. Sangat sulit untuk melakukan kecurangan. Masing-masing TPS sudah ada yang mengawasi. Pemantau dalam negeri dan asing juga siap memelototi TPS-TPS. Mata seluruh rakyat Indonesia juga mengawasi. Jadi yang akan berbuat curang, pasti akan berpikir dua kali.

Namun kalau boleh saya punya pendapat. Curang itu saya maknai, adanya permainan money politics untuk membeli hak pilih pemilik suara. Masyarakat diberi amplop, yang diberi isi

uang, untuk memenangkan paslon tertentu. Ya, ini bisa saja terjadi. Dan jika money politics terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka inilah yang sesungguhnya sedang mengancam proses demokrasi.

Money politics bisa merupakan salah satu bentuk kecurangan. Bukan hanya karena dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi juga akan menyuburkan korupsi di kemudian hari, dan mengancam, juga merusak demokrasi.

Namun persoalannya. Bisakah Pemilu kita bebas dari kecurangan *money politics*. Mungkin ke depan bisa. Tapi untuk sekarang masih belum bisa. Selama masyarakat Indonesia, masih banyak yang pendidikannya rendah, ekonominya lemah, kesadaran hukumnya juga rendah. Maka *money politics* akan digunakan oleh kontestan Pemilu, untuk mempengaruhi pilihan.

Yang saya khawatirkan bukan soal kecurangan di hari H. Bukan soal permainan *money politics* di hari pencoblosan. Bukan pula soal siapa yang menang dan siapa yang kalah di 17 April 2019. Yang saya khawatirkan adalah pasca Pemilu. Ya, Pasca Pilpres. Apakah akan ribut atau tidak.

Semoga kekhawatiran saya tidak terjadi. Semoga konflik tidak terjadi. Dan semoga masyarakat semakin cerdas. Tidak terpengaruh dengan hoaks yang merajalela. Tidak terprovokasi. Tidak main hakim sendiri. Dan tidak berbuat yang dapat merusak proses demokrasi.

Jika pun ada kecurangan dalam Pemilu. Itu pasti akan kelihatan dan diketahui. Jadi, jika memang ada bukti kecurangan ya harus diproses. Namun yang berbahaya adalah, jika menuduh kecurangan tanpa bukti. Urusannya bisa rumit dan kusut. Saling tuduh dan hujat bisa terjadi. Dan konflik tak akan terhindari.

Jangan sampai hanya karena beda dukungan. Beda pilihan. Beda kubu. Kita mengorbankan persaudaraan, persatuan dan

kesatuan. Persaudaraan sebagai anak bangsa adalah lebih penting dari sekedar Pilpres.

Siapapun yang menang nanti, itulah pilihan terbaik rakyat. Ya, pilihan terbaik rakyat Indonesia. Yang pasti dan yang jelas, pasangan calon manapun yang terpilih, harus tetap menjaga persaudaraan. Jangan sampai hanya gara-gara Pilpres persaudaraan menjadi hancur.

Tak ada yang indah di dunia ini, selain kita bisa masih bisa bersaudara. Tertawa riang gembira karena saling menjaga. Pilpres itu hanya soal jabatan. Soal kekuasaan. Sifatnya hanya lima tahunan. Namun persaudaraan bersifat abadi. Persaudaraan akan menjaga kita dari kehancuran, yang disebabkan Pilpres.

BAB 5

REKONSILIASI DEMI

PERSATUAN BANGSA

Menanti Debat Pamungkas Capres dan Cawapres

Debat kelima, atau debat terakhir Capres dan Cawapres, akan menjadi debat pamungkas bagi para kontestan Pilpres 2019. Debat di detik-detik akhir menjelang hari pemilihan, akan sangat menentukan. Bukan hanya bagi undecided voters, yang masih bingung. Tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki hak pilih.

Tantangan besar pada debat pamungkas adalah, meyakinkan swing voters, yang masih galau dengan pilihannya. Jumlahnya kurang lebih 13 %. Dan sangat menentukan, bagi kemenangan Capres dan Cawapres, di 17 April 2019.

Debat kelima, yang merupakan debat pamungkas, akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 April 2019. Karena merupakan debat pamungkas, maka Capres dan Cawapres, harus tampil habis-habisan. Bermain total. Mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Dengan penguasaan materi yang mumpuni. Ditambah memberikan performance yang terbaik. Akan memberi kesan yang menggoda. Selanjutnya terserah anda.

Debat kelima, juga merupakan pertarungan para Capres dan Cawapres. Pertaruhan dalam memberikan visi-misi dan program-program terbaik. Pertaruhan dalam memberikan ide dan gagasan

terbaik. Pertaruhan berpenampilan maksimal. Bila perlu tanpa cacat. Dan tanpa kesalahan.

Sekali melakukan kesalahan, blunder, atau tidak memahami persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri, akan membuat pasangan Capres dan Cawapres, dinilai minus oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Menguasai materi, dan persoalan debat, juga tidak melakukan kesalahan, maka akan bernilai plus.

Plus dan minus dalam debat nanti, pasti akan terjadi. Dan jika ada kesalahan dari mereka, itu pun sangat wajar. Karena para Capres dan Cawapres juga manusia. Tempat salah dan dosa.

Namun usaha untuk menampilkan visi-misi, program, ide, dan gagasan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan, dan industri, haruslah maksimal. Haruslah perfect. Haruslah yang terbaik. Karena mereka adalah putra-putra terbaik bangsa.

Putra-putra terbaik bangsa, yang sedang bersaing dalam Pilpres tersebut, tak boleh tampil seadanya. Apa adanya. Sekedarnya. Apalagi tanpa persiapan. Persiapan yang matang merupakan keniscayaan, jika hasilnya ingin mengesankan.

Tanpa persiapan yang baik dan matang. Mustahil para Capres dan Cawapres, akan memahami dan menguasai materi secara mendalam. Mustahil akan berpenampilan yang baik. Dan mustahil akan bisa menjawab, pertanyaan dengan meyakinkan.

Siapa pun kita. Apalagi Capres dan Cawapres. Mempersiapkan diri dengan baik, dalam suatu forum debat, merupakan keharusan. Tanpa persiapan. Pasti akan acak-acakan. Tanpa persiapan. Pasti tidak akan meyakinkan. Dan tanpa persiapan. Pasti akan sulit menjawab, persoalan-persoalan yang dilontarkan.

Isu ekonomi, merupakan isu yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Karena ekonomi, menjadi fundamen dasar, bagi

kekuatan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan ekonomi merupakan urusan perut. Jadi harus menjadi perhatian utama, dan diutamakan. Pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang wajib memfokuskan kepada nilai tambah (value added) yang dapat diberikan kepada barang dan jasa (Silitonga, 2019).

Individu, keluarga, atau masyarakat yang miskin, tentu akan menganggap bahwa Pilpres tak akan mengubah nasib mereka. Dari Pemilu ke Pemilu, mereka tetap miskin. Dari tahun ke tahun, mereka tetap rentan secara ekonomi. Saat inilah, saat yang tepat dan menentukan, untuk memperbaiki nasib ekonomi bangsa, dan ekonomi masyarakat pinggiran.

Hal tersebut, harus dijawab oleh para Capres dan Cawapres. Bagi rakyat miskin. Tak penting siapa presidennya. Yang penting mereka bisa makan. Tugas Capres dan Cawapres, memang sungguh berat. Bagaimana bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, yang masih hidup di garis kemiskinan.

Bangsa yang kaya raya ini. Tak boleh ada rakyatnya yang masih miskin. Republik yang memiliki banyak sumber daya alam ini. Tak boleh rakyatnya melarat. Bangsa yang anak bangsanya, tidur di atas batu bara, emas, timah, tembaga, nikel, minyak dan gas. Tak boleh rakyatnya mengeluh. Dan tak boleh lapar.

Pilpres 2019, harusnya menjadi titik awal dan momentum untuk memperbaiki kondisi bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Mari perbaiki bangsa ini, paling tidak untuk lima tahun ke depan. Siapapun yang terpilih nanti. Itulah pilhan rakyat. Di pundaknyalah, harapan rakyat digantungkan.

Perdebatan persoalan kue ekonomi, yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Harus segera dituntaskan. Kaya dan miskin memang sunnatullah. Dalam struktur masyarakat, pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Namun jika kemiskinan, itu akibat dari kemiskinan struktural. Ini yang harus kita bereskan. Yang miskin

tak boleh miskin terus. Dan yang kaya juga harus berbagi. Ini Indonesia, milik kita semua. Bukan hanya milik orang kaya.

Jangan sampai masyarakat menjadi miskin. Karena uang negaranya dikorupsi. Jangan sampai masyarakat menjadi miskin. Karena memang kebijakan-kebijakan negara, tidak memihak mereka. Dan jangan sampai masyarakat menjadi miskin. Karena elit-elit politik dan para penguasanya, tak peduli pada nasib mereka.

Yang pasti, Pilpres haruslah menjadi tahap awal dari proses perubahan nasib bangsa dan nasib rakyat. Dari yang miskin, agar lebih sejahtera. Bukan dari yang kaya makin kaya, berkuasa, dan digdaya. Masyarakat miskin yang harus diperdayakan. Harus diangkat derajatnya. Karena mereka juga anak bangsa. Mereka juga cinta Indonesia.

Pilpres hanya menyisakan enam hari lagi. Tidak ada kata lain. Selain kita untuk berikhtiar memilih Capres dan Cawapres terbaik. Pilihlah sesuai hati nurani. Pilihan kita semua, akan menentukan nasib bangsa ke depan.

Jangan biarkan hak suara anda hilang. Jangan biarkan diri anda Golput. Golput bukanlah pilihan terbaik. Golput tak akan menyelesaikan persoalan. Dan Golput akan merugikan. Bukan hanya pada dirinya. Tetapi juga merugikan bagi masyarakat yang lain.

Karena jika nanti, mereka yang terpilih abai dan tidak peduli, akan nasib rakyat. Jangan salahkan mereka, yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salahkan kita, yang memilih diam. Salahkan kita, yang memilih Golput.

Tak ada kebijakan di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang tidak melalui proses politik. Kebijakan ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, energi, pangan, impor, ekspor, pertanian, investasi, perdagangan, industri, dll, yang tidak diputuskan melalui mekanisme politik.

Jika masih ragu, siapa yang akan dipilih. Maka saksikan debat pamungkas hari sabtu, 13 April 2019 nanti. Simak narasi dengan baik. Pahami bobot dan isi penjelasannya. Nilai penampilannya. Lalu siapkan diri anda, untuk memilih di 17 April 2019.

Bangsa ini sedang memanggilmu. Pilpres ini sedang menunggumu. Capres dan Cawapres juga sedang harap-harap cemas, menanti pilihanmu. Jangan sia-siakan hak pilihmu. Partisipasimu akan menentukan maju-mundur, lonjong-bulat, baik atau buruknya, wajah bangsa Indonesia ke depan.

Pilpres Kita

Pemilu serentak yang gaduh telah usai. Pilpres menjadi fokus utama. Sedangkan Pileg menjadi dilema. Masyarakat hanya mengetahui, calon presiden dan wakil presidennya. Sedangkan untuk calegnya, mereka tak mengenal.

Pilpres kaya pemberitaan. Sedangkan Pileg miskin publikasi. Pilpres menjadi Primadona. Sedangkan Pileg nyaris tak terdengar.

Pilpres memang telah menutup pemberitaan dan publikasi Pileg. Pilpres telah menghadirkan narasi kampanye yang menegangkan, saling serang, saling fitnah, dendam, dan saling menafikan.

Pilpres menjadi magnet bagi pemilih. Di saat yang sama, Pileg menjadi terbunuh. Pemilu serentak membuat kaget rakyat. Tidak heran, jika Jusuf Kalla mengusulkan, di Pemilu 2024 nanti, Pileg dan Pilpres dipisah.

Seluruh mata rakyat Indonesia terpaku dan terfokus pada Pilpres. Sehingga lupa jika masyarakat, juga harus memilih partai dan caleg-calegnya. Namun masyarakat sudah terlanjur, tidak mengenal caleg-caleg yang ada di daerahnya, maka yang terjadi seperti memilih kucing dalam karung. Menurut Robert Dahl, demokrasi poliarki (berskala besar) memiliki dua dimensi

partisipasi politik (warga negara) yang keduanya saling tergantung, serta kontestasi elite (Dahl, 2003).

Yang lucu, tadi malam saya menjadi narasumber di Kantor LPP RRI dan disiarkan langsung “on air” ke seluruh pelosok negeri. Ada pernyataan yang menggelikan dari seorang pendengar. Karena caleg-calegnya tidak dikenal, maka dia mencoblos perempuan. Jadi caleg-caleg perempuanlah yang dia coblos. Bukan yang lain.

Jika kasus di atas, terjadi di seluruh wilayah Indonesia, ini menjadi sebuah kerugian bagi demokrasi. Karena Pileg yang harusnya memilih dan menghasilkan pemimpin yang visioner, cerdas, dan terbaik. Justru sebaliknya, akan menghasilkan para anggota parlemen, yang tidak jelas track record, visi-misi, dan program-programnya.

Pilpres kita memang lebih semarak, jika dibandingkan dengan Pileg. Harusnya Pilpres dan Pileg, sama-sama ter-publish dengan baik. Sama-sama menjadi fokus utama pemilih. Sama-sama pentingnya. Dan sama-sama dilaksanakan untuk menghasilkan pemimpin yang jujur, adil, berintegritas, dan mencintai rakyatnya, baik di eksekutif maupun legislatif.

Kemarin kita telah menyaksikan Pileg dan Pilpres, yang dilaksanakan secara aman, damai, tertib, dan membanggakan. Walaupun ada riak-riak kecil. Namun secara umum, Pemilu telah berjalan dengan lancar dan sukses.

Bayang-bayang Pilpres akan terjadi konflik dan chaos tidak terjadi. Masyarakat sudah dewasa. Elit-elit politik, juga sudah menyadari, bahwa Pilpres itu merupakan ritual pesta demokrasi biasa. Terjadi setiap lima tahun. Kalah menang juga biasa dalam berdemokrasi.

Yang menang jangan jumawa. Dan yang kalah juga harus lapang dada. Politisi sejati adalah politisi, yang ketika bertarung dalam kontestasi politik. Sudah siap kalah. Dan juga siap menang. Bukan politisi yang hanya siap menang. Tetapi tidak siap kalah.

Hasil *quickcount* dan *exit poll* sudah bisa dilihat dan saksikan. Pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandi. Walaupun *quick count* dan *exit poll* bukan hasil resmi. Namun bisa dijadikan referensi dan informasi, untuk melihat siapa presiden dan wakil presiden terpilih di 17 April 2019 kemarin.

Kita tentu harus bersabar. Bersabar menunggu hasil perhitungan manual, dan pengumuman resmi dari KPU, di 22 Mei 2019 nanti. Demokrasi memang mengharuskan kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tak terbatas. Kesabaran menunggu siapa yang secara resmi, akan ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Pilpres kita memang tidak sempurna. Banyak catatan yang menghampiri, perhelatan ritual lima tahunan ini. Dari mulai DPT bermasalah, kotak suara berbahan kardus, caleg eks napi korupsi yang direvisi, pemilih dengan gangguan jiwa, logistik yang terlambat tiba di lokasi, habisnya kertas suara di banyak TPS, TPS yang buka siang, dll.

Hal-hal di atas jangan dianggap enteng. Namun itu semua, bagian dari problematika dan dinamika Pilpres. Jika ada masalah, harus dievaluasi. Dan disanksi, bila ada yang melanggar. Jika ada kecurangan-kecurangan, silakan laporkan ke Bawaslu. Dan jika tidak menerima hasil Pemilu, silakan tempuh melalui mekanisme hukum.

Jika kita sepakat berdemokrasi, maka demokrasi membuka ruang bagi siapapun yang kalah, untuk menempuh dan menggunakan mekanisme hukum, sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan.

Bangsa ini butuh kedamaian. Pilpres bukan untuk menyuburkan pertentangan dan saling serangan. Namun hasil Pilpres, harus menjadikan kita semua sebagai anak bangsa dewasa, yang menerima apapun hasil Pilpres dengan lapang dada.

Pilpres bukan segalanya. Pilpres hanya sarana untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tak boleh, kita terlalu fanatik kepada para kontestan Pilpres. Yang segalanya adalah menjaga persaudaraan. Ya, persaudaraan adalah segalanya.

Pilpres telah usai. Kita sedang menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU. Apapun hasilnya nanti. Mari kita jaga persaudaraan sesama anak bangsa. Jangan pernah ada niat, untuk melakukan tindakan anarkis. Mari jaga Indonesia. Mari jaga diri kita. Mari jaga persaudaraan.

Pilpres kita yang aman, damai, tertib, dan demokratis menjadi perhatian dunia. Tiga hari yang lalu, saya diwawancarai oleh TV Astro Awani dari Malaysia. Malaysia sangat peduli kita. Kenapa diri kita tidak peduli dengan bangsa kita sendiri. Jika kita peduli terhadap nasib bangsa, hindari konflik. Hindari perpecahan. Hindari provokasi. Dan hindari hal-hal negatif lainnya, yang bisa merusak Pilpres dan keutuhan bangsa.

Kita harus bangga dengan suksesnya Pilpres ini. Walaupun banyak kekurangan disana-sini, itu akan menjadi bahan evaluasi, dan refleksi untuk introspeksi, agar ke depan lebih baik lagi.

Pilpres yang sudah berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Jangan dirusak dengan perilaku-perilaku yang mengancam persatuan dan kesatuan. Sesungguhnya Pilpres 17 April 2019 kemarin. Bukanlah kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Atau kemenangan Prabowo-Sandi. Tetapi kemenangan kita semua masyarakat Indonesia.

Rakyatlah yang menang. Rakyatlah yang berdaulat. Siapapun yang dipilihnya, tersimpan harapan agar Indonesia jaya ke depan.

Berat memang mengakui kekalahan. Dan enak memang menerima kemenangan. Tapi itulah demokrasi. Selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Siapapun pemenangnya nanti. Bersabarlah. Menantilah. Legowolah.

Saatnya Rekonsiliasi

Pilpres telah usai. Namun gemuruhnya masih terasa. Bayang-bayang konflik pun, menyeruak ke langit nusantara. Saling klaim kemenangan, semakin menggebu. Persaingan Pilpres, masih terjadi dan berlanjut.

Pemilu serentak, telah membuat masyarakat, penyelenggara, dan peserta Pemilu sekarat, shock, kaget, dan kelelahan. Bukan hanya Pileg, yang pemberitaan dan gaungnya, kalah oleh Pilpres. Namun Pemilu juga, telah menjadikan masyarakat terpolarisasi.

Polarisasi masyarakat menjadi-jadi. Bukan hanya karena Pilpres 2019, merupakan duel kedua, antara Jokowi dengan Prabowo. Tetapi juga karena, kampanye yang terlalu panjang, yang membuat Pemilu menjadi riuh, penuh gemuruh, caci-maki, fitnah, dan sumpah serapah.

Walau pun Pilpres telah beres. Namun belum tuntas. Karena masih menunggu, hitungan resmi KPU dan sekengketa Pemilu di MK. Siapapun pemenangnya, yang kalah harus legowo.

Yang kalah jangan marah-marah. Boleh kecewa. Namun tetap harus bersabar. Yang kalah, jangan sampai menggerakkan massa, untuk berbuat anarkis. Yang menang, juga jangan jumawa. Yang

menang harus merangkul yang kalah. Itulah demokrasi, kontestasi politik akan diakhiri dengan kemenangan dan kekalahan. Dan kalah dan menang, merupakan hal biasa dalam berdemokrasi. Tidak perlu ditangani.

Negara ini bukan milik Capres dan Cawapres, bukan milik kubu 01 atau 02, bukan milik anda atau milik saya. Tetapi bangsa ini, milik semua rakyat Indonesia. Jangan hanya karena kalah Pilpres, lalu kecewa dan membuat kerusuhan.

Bangsa ini miliki kita semua. Maka harus kita jaga bersama-sama. Jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Jaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Jaga kondusifitas, dan ketenangan.

Pemilu yang berjalan dengan aman, damai, lancar, dan tertib. Jangan dirusak dengan pikiran-pikiran, dan perilaku-perilaku, yang kotor dan merusak.

Sekeras apapun pertarungan Pilpres yang lalu. Jangan pernah membuat kedamaian menjadi kehancuran, kejujuran menjadi kecurangan, rasionalitas menjadi emosionalitas, kebenaran menjadi kesalahan, kecerdasan menjadi kebodohan, dan kedunguan. Dan janganlah kita kehilangan akal sehat.

Pilpres jangan membuat kita berkonflik dan bercerai berai. Jangan membuat kita saling bermusuhan. Jangan membuat kita saling menafikan. Dan jangan membuat kita saling menghancurkan. Jika ada konflik tentu kita juga perlu melakukan konsensus. (Surbakti, 1992). Konsensus dilakukan agar konflik tidak melebar kemana-mana. Pendekatan Surbakti lebih pada pendekatan struktur-fungsioanal dalam mengatasi konflik, yaitu dengan konsensus.

Pilpres hanya proses demokrasi lima tahunan. Hanya sarana untuk mencari pemimpin terbaik. Pilpres bukan segala-galanya. Pilpres hanya jembatan untuk meneguhkan pembangunan.

Pilpres bukan hanya sekedar untuk memperebutkan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Tetapi Pilpres untuk jalan kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa.

Percuma jika Pilpres dilakukan setiap lima tahunan. Namun tidak mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat. Tak mampu membawa perubahan bagi republik ini. Jangan biarkan demokrasi, berjalan secara prosedural semata. Namun tidak menyentuh, demokrasi substansial. Demokrasi yang membawa kesejahteraan, bagi seluruh penduduk negeri.

Sangat disayangkan, jika Pilpres hanya jadi ajang dan sarana untuk mencari kekuasaan, kekayaan, dan kemasyhuran. Sayang juga, jika Pilpres hanya jadi alat untuk saling mengkerdikan.

Pilpres 17 April 2019 merupakan Pilpres tergaduh. Tersibuk. Dan melelahkan. Tidak aneh dan tidak heran, jika banyak para penyelenggara Pemilu berguguran dan jatuh sakit. Mereka meninggal, karena kelelahan. Demi pengabdian, terhadap bangsa dan negara. Demi Pemilu yang demokratis.

Mereka yang gugur, dalam menjalankan tugas mengawal Pemilu, agar berjalan aman, damai, dan tertib. Mereka layak mendapatkan gelar pahlawan demokrasi. Mereka layak diabadikan dalam sejarah bangsa. Mereka bekerja tanpa lelah, demi suksesnya Pemilu 2019.

Pengorbanan mereka yang gugur, sejatinya harus menjadi evaluasi dan refleksi untuk kita semua. Jangan sampai pengorbanan mereka, dibalas dengan air tuba. Jangan sampai pengorbanan mereka, dirusak dengan gerakan-gerakan yang akan mengarah ke konflik horizontal dan kerusakan.

Hargai mereka yang gugur dengan penghargaan. Jangan dengan keributan dan kehebohan. Jangan dengan memanas-manasi situasi dan keadaan. Jangan dengan memprovokasi massa untuk memancing keributan.

Proses perhitungan suara sedang berjalan, pengumuman siapa pemenang Pilpres akan diketahui 22 Mei mendatang, hakim-hakim MK pun sudah siap untuk menerima dan memutus sengketa Pemilu.

Kegaduhan Pilpres, jangan membuat kita stres. Kehebohan Pilpres, jangan juga membuat kita pusing. Hiruk-pikuk Pilpres, jangan membuat kita fanatik dalam dukung- mendukung kandidat. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita tatap masa depan. Masa depan kita, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sudah keributan gara-gara Pilpres. Saatnya merajut rekonsiliasi.

Pemenang Pilpres baru akan diketahui 22 Mei nanti. Namun sudah saatnya, harus dipikirkan terkait rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Kata yang mudah diucapkan. Namun agak berat dan sulit, untuk dilaksanakan dan diterapkan.

Bagi yang menang, memang mudah untuk menggagas dan memulai untuk melakukan rekonsiliasi. Namun bagi yang kalah. Rekonsiliasi akan berat dilaksanakan.

Tapi saya yakin. Yakin dengan se yakin yakinnya. Setelah tahapan Pemilu tuntas semua. Saya yakin antara Jokowi dan Prabowo akan bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Bahkan bisa lebih cepat dari yang kita prediksi.

Karena saya yakin. Baik Prabowo maupun Jokowi, bukanlah politisi karbitan. Bukanlah politisi baru kemarin. Bukanlah politisi pendendam. Bukanlah politisi yang tak mau mengakui kekalahan. Bukanlah politisi yang ingin menghancurkan. Dan mereka berdua juga, bukan politisi pengecut yang tidak mau berdamai.

Mereka berdua adalah putra-putra terbaik bangsa. Mereka merupakan negarawan. Yang berbicara, berpikir, dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan kepentingan yang lain. Bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau partainya.

Saatnya kedua tokoh tersebut melakukan rekonsiliasi. Saatnya bersinergi. Saatnya bergandengan tangan. Saatnya bersama-sama, untuk membangun bangsa dalam lima tahun ke depan.

Tidak mudah memang melakukan rekonsiliasi. Butuh kebesaran jiwa, dari yang kalah Pilpres. Namun apapun yang terjadi. Rekonsiliasi adalah keniscayaan.

Demi bangsa dan negara. Demi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Bukan demonstrasi yang mengarah pada *people power*. Kita butuh rekonsiliasi. Kita butuh kebersamaan.

Dengan rekonsiliasi, republik ini akan bersatu kembali. Dengan rekonsiliasi, bangsa ini akan terhindarkan dari konflik dan perpecahan. Dengan rekonsiliasi, negara ini bisa membangun.

Tak penting siapa yang menang. Atau siapa yang kalah. Namun yang terpenting adalah, baik yang kalah, maupun yang menang, bertemu dan bersatu untuk bersama-sama membangun bangsa.

Ulama Terpecah, Umat Terbelah

Pemilu 2019 bukan hanya membuat pilu. Tetapi juga banyak memakan korban. Ratusan penyelenggara Pemilu dan aparat meninggal dunia. Bukan itu saja yang terjadi, elit, ulama, dan masyarakat pun terpolarisasi.

Pemilu 17 April 2019 yang berjalan dengan aman, damai, dan tertib menjadi kebanggaan tersendiri bangsa ini. Di tengah hiruk-pikuk Pilpres yang panas, saling serang, menjatuhkan, dan fitnah. Masyarakat berondong-bondong, melakukan people power, datang ke TPS untuk mencoblos siapa yang dikehendaknya.

Pilpres sejatinya jangan membuat stres. Pilpres, bukan untuk saling adu domba antar elit, ulama, dan masyarakat. Pilpres bukan arena cacik-maki dan mengumbar kebencian. Pilpres juga bukan untuk melanggengkan perpecahan.

Jika para elit terpecah, ulama tak bersatu, dan masyarakat terbelah. Hendak kemana republik ini melaju. Bangsa dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, harus tetap dijaga.

Pilpres 2019 juga masih menyisakan luka-luka. Luka Pilpres tak akan beres, jika para ulama yang berbeda dukungan, masih menjadikan umat sebagai legitimasi politik.

Ulama yang mulia, sudah sepatasnya memberikan kesejukan, kedamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ulama, sebagai perekat umat terpecah. Jika ulamanya terpecah, maka umat pun akan terbelah.

Jika ulamanya tidak kompak, maka umat akan terkotak. Jika ulamanya gagal menciptakan kedamaian, maka umatnya akan ugal-ugalan.

Pilpres bukan untuk melanggengkan perpecahan. Bukan untuk menyemai kebencian. Bukan pula untuk saling menjatuhkan. Tetapi Pilpres harus jadi momentum terciptanya persaudaraan, persatuan, dan kesatuan.

Setajam apapun perbedaan pendapat. Sekeras apapun perbedaan argumen. Sekuat apapun pertentangan. Jangan pernah membuat kita, berada dalam persimpangan jalan. Dan jangan sampai membuat bangsa ini terkotak.

Perbedaan pilihan diantara ulama adalah biasa. Ada ulama yang mendukung kubu 01. Dan ada juga, yang mendukung 02, itu merupakan fitrah. Tak dilarang ulama berpolitik. Tak dilarang ulama dalam dukung mendukung. Yang dilarang adalah, jika ulama menjadi faktor perpecahan umat.

Namun dalam dukung mendukung dan berpolitik, ulama harus jadi panutan dan tuntunan. Ulama juga harus jadi referensi bagi umat. Dan menjadi penyebar kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara.

Perbedaan pendapat diantara ulama adalah merupakan rahmat. Ya, menjadi rahmat. Karena kehadiran ulama dimasing-masing kubu, tentu akan bisa mewarnai politik moralitas di internal masing-masing kubu.

Namun akhir-akhir ini, benih-benih perpecahan ulama itu mulai terlihat. Masing-masing ulama di kedua kubu, melegitimasi kemenangan para capres dan cawapres masing-masing.

Munculnya Ijtima Ulama 3 yang salah satu rekomendasinya, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01, merupakan hal yang aneh. Karena pemenang capres dan cawapres belum diumumkan.

Kita tentu sepakat, jika ada kecurangan yang seperti dituduhkan, yaitu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Silakan ungkap. Silakan buka ke publik. Silakan dilaporkan ke yang berwenang. Dan lakukanlah melalui mekanisme hukum.

Baik ulama yang ada di kubu 01 atau pun 02, haruslah menjaga kerukunan, kedamaian, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Menjadi ulama adalah anugerah. Selain karena kedalaman ilmu dan intelektualitasnya yang tinggi. Ulama juga memiliki banyak pengikut.

Tak aneh dan tak heran, jika ucapan dan perilaku ulama banyak diikuti oleh pendukung-pendukungnya. Nah disinilah, ulama harus menjadi alat perekat dan pemersatu di antara internal ulama dan masyarakat.

Karena jika ulamanya terpecah, maka rakyat pun bisa terbelah. Ulama harus juga mampu digugu dan ditiru. Menjadi tuntunan. Bukan hanya menjadi tontonan.

Kita berharap pada ulama-ulama, yang bergaris lurus dan ikhlas dalam berpolitik. Berpolitik baginya, bukan untuk mendapatkan jabatan dan dunia. Namun berpolitik untuk kebaikan umat, bangsa, dan negara.

Karena ada juga ulama suu' (jelak), yang tak patut dan pantas untuk ditiru. Dan seperti kata (Al-Ghozali, 2016) ulama tersebut masuk kategori ulama dunia.

Yang pasti, jangan sampai antar sesama ulama, saling nyinyiran dan saling menjelekkkan. Inilah pangkal, kerusakan dan perpecahan. Jika ulamanya terpecah. Dukung mendukung di

kedua kubu. Tanpa solusi dan rekonsiliasi, maka hendak kemana lagikah umat ini akan melangkah.

Umat dan bangsa ini butuh perbaikan disana-sini. Peran ulama akan sangat penting. Jadi, jika ulamanya bisa bersatu. Tidak terpecah-pecah, maka umat dan bangsa pun bisa maju.

Namun jika ulamanya saling menyalahkan, hanya ingin menang sendiri-sendiri, di kubunya masing-masing, maka tunggulah kerusakan umat dan bangsa ini.

Jangan sampai ulamanya terpecah, masyarakatnya terbelah, elitnya rusak, pejabatnya korup, dan republik ini pun kehilangan arah. Masih ada waktu untuk kembali bersatu. Rekonsiliasi adalah salah satu jalannya.

Pilpres bukan untuk melanggengkan perpecahan, diantara para ulama, umat, dan elit. Tetapi Pilpres harus menjadi sarana untuk memperbaiki nasib bangsa.

Kita tentu masih hormat dan patuh pada ulama. Namun pada ulama yang ikhlas. Ya, ulama yang ikhlas terjun ke politik, hanya untuk memperbaiki nasib umat, bangsa, dan negara. Bukan ulama yang berjuang untuk kepentingan politik sesaat.

Jika ulamanya rusak, maka akan rusak pula negara ini. Namun jika ulamanya baik, maka akan baik pula negara ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan peran ulama, yang bisa mempersatukan, mempererat, dan merekatkan persatuan ulama dan umat.

Siapa pun nanti yang diumumkan sebagai pemenang Pilpres. Semuanya harus legowo. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ulama harus mempersatukan. Bukan memecah belah. Ulama harus mendamaikan. Bukan memperkeruh suasana.

Dan ulama harus cinta akan tanah airnya. Sehingga ketika nanti, terjadi bibit-bibit perpecahan muncul di masyarakat. Ulamalah yang akan pertama mendamaikan.

Menjaga Indonesia

Kontestasi Pilpres sudah hampir beres. Namun persetujuan, antar pendukung kedua paslon capres dan cawapres, masih panas. Saling serang pernyataan masih terjadi. Dan saling klaim kemenangan pun tak pernah berhenti.

Pasca keluarnya rekomendasi ijtima ulama 3, yang salah satu rekomendasinya, meminta penyelenggara Pemilu, untuk mendiskualifikasi kubu 01. Membuat suhu politik memanas kembali.

Di saat yang sama, isu people power, yang diwacanakan Amien Rais, menggema kembali. Dan mendapatkan wacana tandingan, dari kubu 01, dengan melempar isu people fight.

Ditambah lagi, ditsangkakannya Ustad Bachtiar Natsir (UBN), oleh pihak Kepolisian, karena dianggap melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kita tahu, UBN merupakan pentolan GNPf-MUI, dan menjadi salah satu penanda tangan, rekomendasi ijtima ulama 3.

Bulan suci Ramadhan 1440 H ini, sejatinya harus mampu dimanfaatkan kedua kubu, untuk menjalin hubungan baik dengan Allah SWT (hablum minallah). Dan menjalin hubungan baik juga, dengan sesama manusia (hablum minannas).

Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, merupakan bulan introspeksi dan evaluasi. Juga bulan untuk menahan diri, agar tidak melakukan tindakan atau ucapan yang merugikan orang lain.

Jangan hanya gara-gara Pilpres, permusuhan dikembangkan. Saling hujat diteruskan. Perkelahian dijalankan. Dan persekongkolan dilanggengkan. Stop itu semua. Mulailah hari yang baru.

Pilpres bukan hanya, telah banyak memakan korban jiwa, para penyelenggara Pemilu. Tetapi juga, telah membuat masyarakat terpolarisasi, ulama terpecah, dan elit terbelah. Pilpres bukannya membuat masyarakat tercerahkan. Tetapi Pilpres telah membuat masyarakat menjadi stres.

Pilpres bukanlah segala-galanya. Pilpres hanya sarana untuk memilih pemimpin. Pilpres bukan juga hidup mati kita. Pilpres hanya bagian, dari pesta demokrasi lima tahunan biasa. Tidak ada yang istimewa.

Jadi, jika kita gontok-gontokan, saling serang, fitnah, menjatuhkan, dendam, dan saling menafikan. Artinya kita masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Ya, belum dewasa berdemokrasi.

Tak perlu hanya gara-gara Pilpres, persaudaraan hancur, persatuan retak, dan kesatuan tercerai-berai. Pilpres dilaksanakan, bukan untuk menghancurkan persaudaran. Bukan untuk meretakan persatuan. Dan bukan pula, untuk menceraai-beraikan kesatuan.

Pilpres dilakukan, untuk mencari pemimpin ideal dan terbaik. Dan sejatinya Pilpres harus dinikmati, dengan riang gembira dan bahagia. Dan siapapun nanti, yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres di 22 Mei mendatang. Merekalah pilihan rakyat.

Pemilu, 17 April 2019 yang sudah berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Jangan dirusak dan dikotori dengan provokasi dan fitnah.

Silakan membuka kecurangan. Silakan laporkan kecurangan. Namun harus dengan bukti-bukti kuat dan akurat. Silakan berdemonstrasi. Karena negara kita negara demokrasi. Namun demonstrasi yang damai dan tertib. Tidak anarkis.

Silakan mengkritik pemerintah. Karena seluruh rakyat Indonesia, berhak untuk mengkritik presidennya. Dan berhak untuk mengkritik, siapapun pemimpinnya. Bahkan kita berhak, mengkritik siapapun di dunia ini.

Namun kritik yang konstruktif. Kritik yang membangun. Bukan menghina. Bukan pula mencaci-maki. Dan bagi siapapun, yang menjadi sasaran kritik, terima saja dengan lapang dada. Jangan pernah ada pikiran untuk membalasnya.

Adalah suatu kesalahan, jika Wiranto, selaku Menko Polhukam, berwacana ingin membuat tim khusus, yang bertugas memantau dan mengawasi, ucapan atau pernyataan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah.

Lucu dan geli, di alam demokrasi seperti saat ini. Di mana kebebasan berpendapat, dan berserikat dijamin oleh konstitusi. Ucapan atau pernyataan tokoh-tokoh yang kritis, terhadap pemerintah, akan dikebiri.

Tak usah membentuk tim khusus. Karena sudah ada Kepolisian yang berwenang menindak siapapun tokoh, yang menghina presiden. Dorong saja pihak Kepolisian, agar bekerja secara profesional dan adil, untuk memproses hukum, siapapun yang menghina presiden.

Namun harus jelas dulu, batasan antara menghina dengan mengkritik. Jika ada tokoh yang kritis terhadap presiden.

Lalu dituduh menghina. Ini kan jadi berbahaya. Menghina ya menghina. Artinya harus dihukum. Mengkritik ya bukan menghina. Artinya merupakan bentuk ekspresi protes terhadap pemerintah. Mengkritik bukan untuk dipenjara. Namun yang menghina, memang harus kena pidana.

Demokrasi membuka ruang, bagi siapapun, untuk dapat mengkritisi kinerja pemerintah. Dan di saat itu lah, pemerintah dituntut untuk memperbaiki diri dan kinerjanya. Kritik rakyat terhadap pemerintah, jangan dihadapi dengan pendekatan kekuasaan. Hadapi dengan senyuman.

Demokrasi juga membuka celah bagi oposisi, untuk secara keras mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun pihak oposisi juga, tidak boleh mengalami kriminalisasi. Hukum memang harus ditegakkan. Dan hukum tidak boleh, hanya menysar kaum oposisi. Hukum harus menjangkau siapapun, yang melakukan tindak pidana, baik di kubu 02 ataupun 01.

Oposisi hidup dalam alam demokrasi yang membuka ruang bagi hadirnya kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan rakyat dikesampingkan oleh pemerintah, maka oposisi bisa muncul. Oposisi juga bisa hadir karena adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi yang tersumbat, akan membuka ruang bagi publik untuk bisa menjadi kekuatan pengkritik pemerintah (Noor, 2016).

Siapun yang diumumkan KPU, sebagai pemenang Pilpres, di 22 Mei nanti. Yang kalah, harus legowo. Dan yang menang, jangan jumawa. Yang menang harus merangkul pihak yang kalah.

Berbahaya, jika yang kalah tidak terima, dengan kekalahannya. Apalagi jika sampai mengancam mengadakan *people power*. Dan sangat berbahaya lagi, jika kubu yang menang juga melakukan *people fight*.

Jangan sampai rakyat, diadu dengan rakyat yang lain. Rakyat jangan dikorbankan, hanya untuk kepentingan segelintir elit. Elit yang tak pernah merasakan, getir dan pahitnya kehidupan. Jangan pula mengorbankan kehidupan rakyat, yang hidupnya sedang kesusahan.

Sekeras apapun pertentangan. Setajam apapun perbedaan. Sekuat apapun militansi. Dan sebesar apapun, kemarahan dan dendam. Janganlah membuat kita saling melukai, membenci, dan mencaci.

Jagalah Indonesia dengan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Jagalah Indonesia dengan menciptakan kedamaian, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Mari kita saling menjaga. Menjaga silaturahmi. Menjaga Indonesia agar tetap gagah perkasa.

Jagalah Indonesia dengan segenap jiwa dan raga. Menjaga Indonesia harus lebih dari apapun. Jangan biarkan Indonesia menangis dan bercerai-berai. Karena Indonesia adalah, Indonesiaku, Indonesiamu, dan Indonesia kita semua.

Biarlah perbedaan, di antara sesama anak bangsa, menjadi rahmat. Jangan sampai menjadi laknat. Berbeda bukan berarti, menafikkan yang lain. Perbedaan adalah, anugerah Allah SWT yang paling Indah. Dengan berbeda kita ada. Dengan berbeda kita menjadi berwarna. Dan dengan berbeda kita jadi bersaudara.

Menolak Hasil Pemilu

Pemenang Pemilu 2019 belum diumumkan. Namun Prabowo, sudah menolak hasil Pemilu. Aneh memang. Aneh, karena belum diumumkan siapa pemenangnya. Namun penolakan sudah dilakukan.

Hak Prabowo, untuk menolak hasil Pemilu 2019. Sebagaimana dia pernah, menolak hasil Pemilu 2014, lima tahun silam. Prabowo “menganggap” Pemilu 2019, penuh tipu daya dan kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Prabowo dan koalisinya, “menemukan” persoalan-persoalan dari hulu, hingga hilir, seperti daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos, hingga salah hitung di website KPU.

Walau penolakan tersebut terasa aneh dan ganjil. Namun, penolakan Prabowo atas hasil Pemilu 2019, jangan dianggap remeh dan enteng. Karena penolakan tersebut, sudah terjadi dua kali (di Pemilu 2014 dan 2019), penolakan juga diawali, dengan pra kondisi wacana people power, dan tuduhan makar kepada para pendukungnya.

Di luar penolakan hasil Pemilu 2019 oleh Prabowo. Ada yang menggelitik dalam benak saya. Sekitar kurang lebih 600

KPPS, meninggal dunia dan 3000 lebih juga, terbaring sakit. Apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah mereka meninggal dan sakit karena kelelahan. Atau karena faktor lain.

Untuk membuktikan, bahwa pemilu kita berjalan dengan demokratis, adil, dan terbuka, maka perlu untuk mengusut tuntas, apa yang menjadi penyebab mereka meninggal dunia dan sakit. Karena jika hal ini dibiarkan, dan tidak diketahui penyebab yang sesungguhnya, maka dikhawatirkan di setiap pemilu, akan terjadi hal yang sama.

Demi menjaga nyawa putra putri terbaik bangsa, yang ingin berkontribusi besar dalam proses demokrasi, jangan ada lagi dan tidak boleh ada lagi, para penyelenggara pemilu, yang berguguran di pemilu-pemilu berikutnya.

Terkait kecurangan yang dituduhkan Prabowo dan timnya, rakyat Indonesia akan berterima kasih, jika Prabowo mampu membuktikan kecurangan-kecurangan tersebut, dengan data-data. Semua mata rakyat Indonesia sedang menunggu. Apakah data dari Prabowo valid atau tidak.

Namun, jika Prabowo tidak bisa, dan tidak mampu membuktikan kecurangan-kecurangan lawan politiknya, maka yang akan terjadi justru sebaliknya, akan ada arus balik menyerang Prabowo. Karena rakyat tak akan percaya lagi, kepada Prabowo dan Gerindra.

Kita tentu sepakat dan harus mengikuti akal sehat. Jika ada kecurangan, silakan buka. Silakan laporkan. Dan silakan buktikan. Dan tentu kita juga sepakat, tak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Dahsyat memang, jika kecurangan yang dituduhkan Prabowo terbukti. Namun untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik, tidaklah mudah. Tidaklah mudah, seperti membalik telapak tangan. Kecurangan tak semudah tuduhan, yang sulit pembuktian.

Kita semua, tak akan menutup mata, jika terjadi kecurangan. Namun menuduh kecurangan, tanpa pembuktian yang kuat, maka akan menjadi bumerang. Dan akan menjadi fitnah.

Demokrasi memberi ruang, kepada siapapun yang kalah, untuk menolak hasil pemilu. Namun demokrasi juga memberi jalan, kepada siapapun yang kalah, untuk menempuh melalui jalur hukum. Karena hukum merupakan bagian dari peradaban manusia yang mengatur tatanan kehidupan sosial yang bertujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Imran dan Hidayati, 2019).

Kita dorong agar Prabowo, bisa menggugat kecurangan-kecurangan pemilu ke MK. Seluruh mata rakyat Indonesia, akan menyaksikan proses gugatan kecurangan-kecurangan di MK. Jadi, Prabowo tak usah khawatir, akan dikalahkan di MK.

Selama bukti-buktinya kuat. Dan jika benar-benar kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka pasti Prabowo, yang akan dimenangkan, terkait gugatannya tersebut.

Hakim MK memang manusia biasa. Banyak kekurangan, salah, dan dosa. Namun kita harus yakin, bahwa hakim-hakim MK akan berbuat adil. Yang menang, pasti dimenangkan. Dan yang kalah, pasti dikalahkan.

Putusan hakim MK, tak akan berani mencederai keadilan dan kebenaran. Selama Prabowo benar, dan bukti-bukti kecurangannya ada dan nyata, ya pasti menang dalam gugatannya. Begitu juga sebaliknya, jika buktinya lemah, ya pasti akan kalah.

Prabowo merupakan seorang negarawan, menolak hasil pemilu tentu memiliki alasan dan perhitungan. Namun kita tunggu saja, pembuktian kecurangan-kecurangan dari Prabowo dan timnya.

Jokowi juga negarawan. Seorang negarawan tak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Seorang negarawan pasti ingin menang dengan cara elegan, tanpa kecurangan, dan kekerasan.

Prabowo dan Jokowi, merupakan putra-putra terbaik bangsa. Sikap kenegarawanannya tidak perlu kita ragukan. Soal Prabowo menuduh Jokowi curang, itu perlu pembuktian. Tapi di luar itu semua, di luar urusan politik, mereka berdua bersahabat.

Politik memang penuh drama, dinamika, dan tipu daya. Jadi jangan aneh dan heran, jika politik selalu menghadirkan keributan-keributan dan kegaduhan. Menghadirkan kejutan-kejutan. Dan menghadirkan bara dendam.

Menolak hasil pemilu bagi Prabowo merupakan pilihan. Karena tidak ada pilihan lain. Namun menolak hasil pemilu, sebelum diumumkan siapa pemenangnya, merupakan langkah yang kurang bijak.

Apapun yang terjadi, bangsa ini perlu kita selamatkan. Biarkan para elit politik bertikai dan gontok-gontokkan. Rakyat biasa tak usah ikut-ikutan. Kita percayakan saja, proses perhitungan suara ke KPU.

Kecurangan, siapapun pelakunya jangan pernah dibiarkan. Membiarkan kecurangan terjadi, sama saja kita tak peduli, terhadap nasib bangsa. Namun tuduhan kecurangan tak akan berarti apa-apa, jika tidak bisa dibuktikan.

Menolak hasil pemilu, perlu didukung dengan argumen, fakta, dan bukti-bukti riil. Menuduh tanpa bukti, sama saja memfitnah. Jika bukti kecurangannya ada dan nyata, silakan ungkapkan. Biarlah rakyat yang menilai. Siapakah yang berbuat curang. Ataupun kecurangan itu hanya tuduhan.

Enam hari lagi, pengumuman siapa pemenang pemilu akan dibacakan KPU. Siapapun yang menang nanti. Itulah kemenangan rakyat. Kemenangan kita semua. Kemenangan bangsa Indonesia.

Tak perlu marah-marah bagi yang kalah. Seorang ksatria, tak akan marah, jika kalah. Dan seorang negarawan, tak akan dendam, jika tertekan. Seorang ksatria dan negarawan, tak akan mungkin menghasut rakyat, untuk menuai keributan.

BAB 6
PILPRES DAN
MASA DEPAN INDONESIA

Indonesia Terluka

Pemilu 17 April 2019 telah berlalu. Dan alhamdulillah, Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyak negara lain, yang mengapresiasi, atas suksesnya Pemilu di Indonesia. Namun tidak sedikit, yang mempertanyakan kecurangan Pemilu. Bahkan secara khusus, Prabowo di depan media-media asing, menjelaskan kecurangan-kecurangan tersebut.

Kita bangga dan bersyukur, Pemilu telah berjalan dengan lancar. Semua atas dasar kesadaran yang tinggi, dari masyarakat untuk menjadikan Pemilu, sebagai pintu masuk perjuangan dan penentuan nasib bangsa, untuk lima tahun ke depan.

Namun, pasca pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU, 21 Mei 2019 dini hari. Situasi pun mulai berubah. Prabowo-Sandi menolak hasil Pemilu. Politik menjadi panas. Prabowo meminta pendukungnya, untuk menggunakan cara-cara konstitusional, dalam menghadapi hasil Pilpres tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat dari kubu 02 pun, dilakukan dengan cara demonstrasi. Tapi sayang, demonstrasi memprotes kecurangan Pemilu menjadi anarkis. Terjadi kerusuhan, dan memakan korban 6 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Berdemonstrasi sah-sah saja. Silakan dilakukan. Karena setiap warga negara, dijamin oleh konstitusi, untuk menyatakan pendapat dimuka umum. Namun demonstrasi tak boleh anarki. Tak boleh ribut. Tak boleh ricuh. Dan tak boleh mengganggu ketertiban umum. Apalagi sampai mengganggu perekonomian nasional.

Kita bangsa Timur. Bangsa yang beradab. Bangsa yang beragama. Bangsa yang selalu menjunjung nilai-nilai moralitas, dalam berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, perbuatan perusakan, yang dilakukan oleh para demonstran, tak patut untuk dilakukan.

Kita tentu berduka cita dan berbela sungkawa, atas meninggalnya para demonstran. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Namun negara, tidak boleh mentorerir tindakan-tindakan anarkis. Dan harus menindak tegas, siapapun yang telah berbuat kerusuhan. Karena jika dibiarkan, maka akan bisa memicu tindakan anarkis di daerah-daerah lain.

Indonesia terluka. Luka yang semestinya tidak perlu terjadi. Jangan korbankan anak-anak bangsa hanya karena Pilpres. Jangan biarkan putra-putra Indonesia, berguguran hanya gara-gara Pemilu.

Awalnya saya cukup senang, pagi tanggal 21 Mei 2019, saya mendapat WA dari sahabat saya, Mr. Tsunoda Katsunori, Sekretrais I Kedutaan Besar Jepang, yang mengucapkan selamat kepada saya, atas pengumuman hasil Pemilu oleh KPU, yang berjalan aman, lancar, dan damai.

Namun tak disangka dan tak dinyana, ucapan selamat tersebut tak berarti. Karena beberapa waktu kemudian, masih dihari yang sama, meletus demonstrasi yang memakan korban jiwa dan luka-luka.

Indonesia terluka. Dan kita semua pun terluka. Bahkan hari Rabu, 22 Mei 2019 kemarin, banyak sekolah, yang murid-muridnya dipulangkan lebih cepat, mahasiswi-mahasiswi yang tak berani kekampus, dan orang takut keluar rumah.

Masyarakat Indonesia trauma dengan tragedi 1998. Trauma yang masih belum sirna dari pelupuk mata, dan ingatan kita semua. Demi Indonesia. Jangan sampai tragedi kerusuhan 1998 terulang kembali.

Indonesia harus dijaga. Dan kita semua yang harus menjaganya. Jangan biarkan Indonesia terluka dan menangis. Bangsa ini bangsa besar. Jangan dikerdilkan dengan cara-cara yang diluar kewajaran.

Kapan lagi kita bisa menjaga Indonesia. Kapan lagi kita bisa memajukan Indonesia. Kapan lagi kita bisa melindungi NKRI. Sekarang lah waktunya. Sekarang lah saatnya. Kalau bukan kita yang menjaga, memajukan, dan melindungi Indonesia. Lalu siapa yang akan menjaga. Dan jika tidak kita jaga sekarang, kapan lagi.

Masing-masing kita memiliki obligasi moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Tak peduli siapapun kita. Tak peduli apapun latar belakang kita. Dan tak peduli profesi apapun kita. (Komarudin, 2017).

Tak perlu marah-marah dalam berdemonstrasi. Tak perlu berbuat onar, keributan, dan kericuhan. Tak perlu berbuat anarkis. Tak perlu memprovokasi. Tak perlu saling menyalahkan. Dan tak perlu saling serang dan mengalahkan.

Negeri indah ini jangan dirusak. Jangan dinodai. Jangan dilukai. Jangan dikebiri. Jangan dikecilkan. Jangan dilemahkan. Jangan dilumuri oleh perbuatan-perbuatan, dan tindakan-tindakan yang dapat memecah belas persatuan dan kesatuan.

Pascapilpres harusnya rekonsiliasi. Protes boleh saja. Demonstrasi silakan saja. Namun jangan membuat kerusuhan, keributan, dan keonaran.

Demokrasi memiliki saluran, jika ada tuduhan kecurangan, silakan bertarung di MK. MK merupakan jalan akhir pertarungan, dalam kontestasi Pilpres. Seorang negarawan akan bertarung di MK. Bukan bertarung di jalanan.

Jalanan hanya sebagai aspirasi, untuk mengungkapkan protes-protes. Itu pun tak boleh melanggar aturan. Demonstrasi boleh besar-besaran. Asalkan berjalan dengan tertib dan aman. Demonstrasi boleh dilakukan. Asalkan tak memakan korban.

Republik ini perlu kestabilan politik. Jika politiknya tak stabil, maka akan berimbas ke ekonomi dan lain-lainnya. Stop demonstrasi-demonstrasi anarkis. Hentikan pengerahan massa, yang akan bisa memancing keributan dan kerusuhan.

Indonesia juga sedang berduka, salah satu ulama besar Indonesia, Ustad Arifin Ilham (UAI) meninggal dunia. Duka bagi kita semua. Ulama yang kokoh dengan perjuangan keumatan dan ke Indonesiaan. Dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Cintai Indonesia, seperti kita mencintai diri kita. Jangan lukai Indonesia, seperti kita yang tak ingin dilukai. Perjalanan panjang bangsa ini, akan ditentukan sekarang. Akan ditentukan saat ini. Jika hari ini kita ribut, rusuh, dan anarkis. Kapan bangsa ini akan bisa membangun.

Mari jaga bangsa ini, dengan sepenuh jiwa. Lawan segala bentuk kekerasan, atas nama apapun. Jangan pernah lelah, untuk menjaga bangsa ini, agar tetap kokoh berdiri dan jaya. Dan jangan pernah mau diadu domba. Kita ingin Indonesia tersenyum. Kita ingin Indonesia jaya. Dan kita ingin Indonesia tidak terluka.

Menunggu Rekonsiliasi Pasca Pilpres

Pemilu 17 April 2019 telah berlalu. Dan alhamdulillah, Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyak negara lain, yang mengapresiasi, atas suksesnya Pemilu di Indonesia. Namun tidak sedikit, yang mempertanyakan kecurangan Pemilu. Bahkan secara khusus, Prabowo di depan media-media asing, menjelaskan kecurangan-kecurangan tersebut.

Kita bangga dan bersyukur, Pemilu telah berjalan dengan lancar. Semua atas dasar kesadaran yang tinggi, dari masyarakat untuk menjadikan Pemilu, sebagai pintu masuk perjuangan dan penentuan nasib bangsa, untuk lima tahun ke depan.

Namun, pasca pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU, 21 Mei 2019 dini hari. Situasi pun mulai berubah. Prabowo-Sandi menolak hasil Pemilu. Politik menjadi panas. Prabowo meminta pendukungnya, untuk menggunakan cara-cara konstitusional, dalam menghadapi hasil Pilpres tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat dari kubu 02 pun, dilakukan dengan cara demonstrasi. Tapi sayang, demonstrasi memprotes kecurangan Pemilu menjadi anarkis. Terjadi kerusuhan, dan memakan korban 6 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Berdemonstrasi sah-sah saja. Silakan dilakukan. Karena setiap warga negara, dijamin oleh konstitusi, untuk menyatakan pendapat dimuka umum. Namun demonstrasi tak boleh anarki. Tak boleh ribut. Tak boleh ricuh. Dan tak boleh mengganggu ketertiban umum. Apalagi sampai mengganggu perekonomian nasional.

Kita bangsa Timur. Bangsa yang beradab. Bangsa yang beragama. Bangsa yang selalu menjunjung nilai-nilai moralitas, dalam berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, perbuatan perusakan, yang dilakukan oleh para demonstran, tak patut untuk dilakukan.

Kita tentu berduka cita dan berbela sungkawa, atas meninggalnya para demonstran. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Namun negara, tidak boleh mentorerir tindakan-tindakan anarkis. Dan harus menindak tegas, siapapun yang telah berbuat kerusuhan. Karena jika dibiarkan, maka akan bisa memicu tindakan anarkis di daerah-daerah lain.

Indonesia terluka. Luka yang semestinya tidak perlu terjadi. Jangan korbankan anak-anak bangsa hanya karena Pilpres. Jangan biarkan putra-putra Indonesia, berguguran hanya gara-gara Pemilu.

Awalnya saya cukup senang, pagi tanggal 21 Mei 2019, saya mendapat WA dari sahabat saya, Mr. Tsunoda Katsunori, Sekretrais I Kedutaan Besar Jepang, yang mengucapkan selamat kepada saya, atas pengumuman hasil Pemilu oleh KPU, yang berjalan aman, lancar, dan damai.

Namun tak disangka dan tak dinyana, ucapan selamat tersebut tak berarti. Karena beberapa waktu kemudian, masih di hari yang sama, meletus demonstrasi yang memakan korban jiwa dan luka-luka.

Indonesia terluka. Dan kita semua pun terluka. Bahkan hari Rabu, 22 Mei 2019 kemarin, banyak sekolah, yang murid-muridnya dipulangkan lebih cepat, mahasiswi-mahasiswi yang tak berani kekampus, dan orang takut keluar rumah.

Masyarakat Indonesia trauma dengan tragedi 1998. Trauma yang masih belum sirna dari pelupuk mata, dan ingatan kita semua. Demi Indonesia. Jangan sampai tragedi kerusuhan 1998 terulang kembali.

Indonesia harus dijaga. Dan kita semua yang harus menjaganya. Jangan biarkan Indonesia terluka dan menangis. Bangsa ini bangsa besar. Jangan dikerdilkan dengan cara-cara yang diluar kewajaran.

Kapan lagi kita bisa menjaga Indonesia. Kapan lagi kita bisa memajukan Indonesia. Kapan lagi kita bisa melindungi NKRI. Sekarang lah waktunya. Sekarang lah saatnya. Kalau bukan kita yang menjaga, memajukan, dan melindungi Indonesia. Lalu siapa yang akan menjaga. Dan jika tidak kita jaga sekarang, kapan lagi.

Masing-masing kita memiliki obligasi moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Tak peduli siapapun kita. Tak peduli apapun latar belakang kita. Dan tak peduli profesi apapun kita. (Komarudin, 2017).

Tak perlu marah-marah dalam berdemonstrasi. Tak perlu berbuat onar, keributan, dan kericuhan. Tak perlu berbuat anarkis. Tak perlu memprovokasi. Tak perlu saling menyalahkan. Dan tak perlu saling serang dan mengalahkan.

Negeri indah ini jangan dirusak. Jangan dinodai. Jangan dilukai. Jangan dikebiri. Jangan dikecilkan. Jangan dilemahkan. Jangan dilumuri oleh perbuatan-perbuatan, dan tindakan-tindakan yang dapat memecah belas persatuan dan kesatuan.

Pascapilpres harusnya rekonsiliasi. Protes boleh saja. Demonstrasi silakan saja. Namun jangan membuat kerusuhan, keributan, dan keonaran.

Demokrasi memiliki saluran, jika ada tuduhan kecurangan, silakan bertarung di MK. MK merupakan jalan akhir pertarungan, dalam kontestasi Pilpres. Seorang negarawan akan bertarung di MK. Bukan bertarung di jalanan.

Jalanan hanya sebagai aspirasi, untuk mengungkapkan protes-protes. Itu pun tak boleh melanggar aturan. Demonstrasi boleh besar-besaran. Asalkan berjalan dengan tertib dan aman. Demonstrasi boleh dilakukan. Asalkan tak memakan korban.

Republik ini perlu kestabilan politik. Jika politiknya tak stabil, maka akan berimbas ke ekonomi dan lain-lainnya. Stop demonstrasi-demonstrasi anarkis. Hentikan pengerahan massa, yang akan bisa memancing keributan dan kerusuhan.

Indonesia juga sedang berduka, salah satu ulama besar Indonesia, Ustad Arifin Ilham (UAI) meninggal dunia. Duka bagi kita semua. Ulama yang kokoh dengan perjuangan keumatan dan ke Indonesiaan. Dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Cintai Indonesia, seperti kita mencintai diri kita. Jangan lukai Indonesia, seperti kita yang tak ingin dilukai. Perjalanan panjang bangsa ini, akan ditentukan sekarang. Akan ditentukan saat ini. Jika hari ini kita ribut, rusuh, dan anarkis. Kapan bangsa ini akan bisa membangun.

Mari jaga bangsa ini, dengan sepenuh jiwa. Lawan segala bentuk kekerasan, atas nama apapun. Jangan pernah lelah, untuk menjaga bangsa ini, agar tetap kokoh berdiri dan jaya. Dan jangan pernah mau diadu domba. Kita ingin Indonesia tersenyum. Kita ingin Indonesia jaya. Dan kita ingin Indonesia tidak terluka.

Bersatu Pasca Pilpres

Pilpres telah beres. Pilpres telah kita lewati dengan penuh kegembiraan, dan sekaligus juga kekhawatiran. Meskipun sempat terjadi demonstrasi, yang telah memakan 8 korban jiwa. Namun republik ini masih sangat stabil, dalam bidang politik maupun ekonomi.

Pilpres 2019, memang menjadi Pilpres, yang telah menjadikan masyarakat terbelah, ulama terpecah, pengusaha wait and see, elit terkotak, ilmuwan tak berkawan, dan kebenaran dikesampingkan.

Ada yang terlupakan, sebelum dan pasca Pilpres, yaitu persatuan. Ya, persatuan. Persatuan seolah-olah susah didapatkan. Padahal masyarakat Indonesia terkenal sangat guyub dan rukun. Mudah bersatu dan senang bersatu.

Entah mengapa, Pilpres menjadi penghalang, dan menjadi benteng tebal, dalam merajut kembali persatuan.

Sepertinya, persatuan merupakan “kata” yang mudah dikatakan. Namun sulit untuk dilaksanakan. Mudah diucapkan. Tapi sulit diimplementasikan. Persatuan, seolah-olah menjadi barang yang mahal di republik ini.

Namun saya memiliki keyakinan dan impian. Saya optimis, bangsa ini akan kembali bersatu. Kuncinya ada pada, kebesaran jiwa

dari Prabowo dan Jokowi, untuk saling menjaga, menghormati, dan menghargai.

Jika Prabowo dan Jokowi bertemu. Lalu berikrar untuk bersatu, maka tak akan ada lagi pembelahan di masyarakat.

Dan momentum Idul Fitri 1440 H, harus menjadi momentum terbaik, untuk saling memaafkan diantara keduanya. Lebaran juga harus menjadi sarana, menjaga silaturahmi dan menjaga persatuan bangsa.

Tanpa persatuan, tak mungkin bangsa ini bisa membangun. Tanpa kebesaran hati dan jiwa Prabowo dan Jokowi, republik ini tak akan bersatu. Lupakan segala bentuk perbedaan. Lupakan segala bentuk dendam dan kekecewaan. Saatnya bangsa ini bersatu kembali.

Bukan saatnya lagi, kita melanggengkan permusuhan, mempertebal kebencian, memperuncing perseteruan, dan meningkatkan kekecewaan.

Namun yang harus kita lakukan saat ini, adalah menjaga persatuan. Persatuan lebih berharga dari apapun. Persatuan lebih penting, dari semua kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan persatuan lebih indah, jika dapat direalisasikan.

Makna persatuan yang paling dasar adalah, kita bersatu bagaikan satu tubuh. Jika ada tubuh kita yang terluka, maka seluruh organ tubuh yang lain merasa terluka. Persatuan juga, bagaikan satu keluarga, jika ada keluarga kita yang tersakiti, maka seluruh keluarga merasa tersakiti.

Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ada anak bangsa yang terdzolimi, maka sejatinya semua rakyat Indonesia merasa terdzolimi.

Konflik yang memuncak di Pilpres harus segera diakhiri dengan cara melakukan konsensus (Rauf, 2000). Karena konflik

politik hanya bisa diselesaikan melalui konsensus. Konsensus harus berskala nasional dan menyeluruh.

Tak ada yang lebih indah di dunia ini, selain menjaga persatuan. Tiada yang lebih menyenangkan di republik ini, selain memelihara persaudaraan. Dan tidak ada yang lebih mengasyikan di negara tercinta ini, selain kita dapat melestarikan silaturahmi.

Dengan silaturahmi, bangsa ini akan tetap bersatu. Dengan silaturahmi, nasib ibu pertiwi tak akan bercerai berai. Dan dengan silaturahmi, Indonesia akan tetap ada dan terjaga.

Silaturahmi Idul Fitri 1440 H, harus menjadi sarana dan momentum untuk bersatu. Bersatunya dua tokoh, yang sempat berseteru dalam kontestasi Pilpres 2019. Prabowo dan Jokowi, harus menggunakan momentum lebaran, untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Banyak negara di Timur Tengah yang hancur. Karena pemimpin dan rakyatnya tidak bisa bersatu. Dan banyak negara di dunia ini yang gagal. Karena miskinnya jiwa bersatu, di antara elit-elitnya.

Tentu, kita tidak mau melihat, bangsa ini menjadi bangsa yang gagal, apalagi hancur. Dan modal dasar, agar republik ini ada dan jaya, adalah modal persatuan. Ya, modal persatuan. Dengan bersatu, yang sulit akan mudah di atasi. Dengan bersatu, pembangunan bisa bergerak. Dan dengan bersatu, kita bisa menjadi bangsa yang hebat dan jaya.

Modal dasar persatuan itu sudah kita miliki. Pancasila menjadi pemersatu. Dan masyarakat Indonesia, tak pernah neko-neko, tak pernah berbuat aneh-aneh, dan macam-macam. Yang aneh dan macam-macam, hanya segelintir elit, yang sering memprovokasi masyarakat untuk saling berseteru.

Bahasa, budaya, adat, agama, suku, dan etnis kita banyak. Kita masih bisa bertoleransi, dan saling bersatu. Mengapa hanya gara-gara Pilpres, kita saling melukai dan menyakiti. Kita sama-sama sebagai anak bangsa Indonesia. Mengapa gara-gara Pilpres, kita berseteru.

Andai saja elit-elit politik kita bijaksana. Berperilaku gentlemen, siap kalah dan siap menang. Dan siap mengakui kekalahan diri sendiri, dan mengakui kemenangan lawan, maka konflik politik yang menelan korban jiwa, tak akan terjadi.

Akar konflik terjadi, karena jiwa kenegarawanan para politisi kita masih rendah. Bahkan mungkin masih tertutup, oleh tebalnya jiwa keangkuhan dan keserakahan. Namun yang paling penting dari Pilpres adalah, jangan lupakan persatuan.

Bersatu pasca Pilpres menjadi suatu keniscayaan. Dan Prabowo sendiri sudah mengatakan, bahwa pertemuan dengan Jokowi ada waktunya, ada saatnya. Mungkin saat ini, masih ada sengketa di MK. Jadi, bisa saja pasca MK memutuskan siapa yang menang, maka persatuan itu akan semakin terlihat, dan akan semakin terang.

Jangan lah kita menjadi bangsa yang rapuh. Karena hilangnya budaya silaturahmi, dan tak mau bersatu. Ada yang lebih penting dari sekedar Pilpres, yaitu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan.

Percuma ada Pilpres, jika kita tidak bersatu. Percuma ada Pemilu, jika kita bercerai berai. Momentum Pilpres, bukanlah momentum untuk melanggengkan permusuhan dan konflik. Tapi Pilpres, harus menjadi momentum untuk saling menjaga persatuan.

Tak perlu ragu untuk bersatu. Tak perlu malu untuk saling menyapa. Tak perlu gengsi untuk saling menyambangi. Dan tak

perlu angkuh untuk saling bersikukuh. Buka hati dan pikiran. Jalinlah persatuan tanpa syarat. Agar Indonesia tidak sekarat. Dan demi Indonesia yang lebih bermartabat.

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah hiruk pikuk perdebatan sengketa Pilpres di MK. Dan kontroversi apakah Ma'ruf Amin, menjabat komisaris di BUMN atau bukan. Kita jangan juga, melupakan persoalan bangsa yang maha penting. Yaitu, korupsi.

Saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) KPK sudah terbentuk. Dan sedang road show, meminta masukan ke berbagai kalangan. Bertemu pimpinan KPK. Akan bertemu Wadah Pegawai (WP) KPK, bertemu tokoh, LSM, dan semua stakeholder, dalam pemberantasan korupsi.

Walaupun Pansel KPK, banyak dikritik oleh aktivis anti korupsi. Namun Pansel KPK, terus berjalan, ingin mencari pimpinan KPK yang ideal.

Persoalan korupsi, dari hulu ke hilir, harus bisa diselesaikan. Dari mulai Presiden yang membentuk Pansel, anggota Pansel, proses rekrutmen, hingga menghasilkan pimpinan KPK yang ideal, harus dilakukan. Siapapun yang terpilih nanti, road map pemberantasan korupsi, penindakan, pencegahan, serta membersihkan Indonesia dari korupsi, harus dijalankan.

Persoalan politik jangan dilupakan. Persoalan ekonomi, juga jangan ditinggalkan. Dan persoalan pemberantasan korupsi, harus

diutamakan. Karena tak ada bangsa di dunia ini yang maju, jika di negara tersebut banyak korupsi.

Kita tahu, korupsi merupakan musuh utama, di republik yang kita cintai ini. Bagaikan kanker ganas. Korupsi sudah menjalar ke seluruh tubuh pengidapnya. Dan bagaikan virus, korupsi sudah menjelajah dan menginfeksi ke seluruh tubuh bangsa ini. Tak ada organ tubuh di negara ini, yang tak terjangkau korupsi.

Tidak ada lembaga negara, birokrasi, atau pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Yang tidak melakukan korupsi. Di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, oknum-oknum pejabatnya banyak yang ditangkap KPK.

Saya tidak akan menampilkan data-data, terkait indeks korupsi di Indonesia. Dan lembaga-lembaga mana saja yang paling korup.

Saya juga tidak sedang mengada-ada. Karena yang saya tahu, bangsa ini tidak maju-maju, karena salah satu faktornya adalah korupsi. Ya, korupsi.

Kita semua prihatin atas persoalan korupsi di Indonesia, Gemes, geli, jijik, dan kotor. Namun kita juga yang mentolerir, perilaku pejabat yang melakukan korupsi.

Berapa banyak caleg-caleg DPR dan DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih, yang melakukan *money politics*. Para caleg menebar uang, masyarakat juga menerima. Jika sudah begini, siapa yang salah. Calegkah atau masyarakatkah. Semua tak ada yang mau disalahkan.

Yang aneh adalah, korupsi semakin diberantas, semakin subur. Semakin banyak yang ditangkap, korupsi semakin merajalela. Seolah tidak ada efek jera. Mereka para koruptor, tak tahu malu, seenaknya menjarah uang negara.

Bak cendawan di musim hujan, perilaku korupsi makin tumbuh subur di masyarakat. Bangsa ini harus diselamatkan, dari para koruptor yang terkutuk. Republik ini harus dijaga, dari para penjarah uang rakyat. Jangan biarkan negara ini sekarat, karena pejabatnya korup.

Nah, di sinilah pentingnya pimpinan KPK yang baru. Orang baru. Tenaga baru. Pikiran baru. Dan harus memiliki konsep yang baru, dalam memburu para koruptor.

Dicari pimpinan KPK yang bukan titipan. Apalagi pesanan. Pimpinan KPK nanti, harus terhindar juga dari tekanan. Oleh karena itu, pimpinan KPK yang baru, harus berintegritas. Tak boleh punya masalah. Tak boleh punya kasus. Dan tak boleh menghamba pada istana atau kekuasaan.

Jika pimpinan KPK yang terpilih nanti, bukanlah orang yang clean, tentu kita akan was-was akan arah pemberantasan korupsi ke depan. Karena pimpinan KPK yang memiliki masalah, akan menjadi alat sandera, dan barter kepentingan dengan para koruptor.

Tidak mudah bagi Pansel KPK untuk mencari calon pimpinan KPK yang betul-betul ideal. Berintegritas, independen, dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terpenting lagi, harus “berani mati” untuk berjihad, dalam pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini.

Sederhana saja untuk dapat menilai, para calon pimpinan KPK yang akan dipilih. Hanya butuh empat kriteria untuk mendapatkan pimpinan KPK yang ideal. Cukup dengan mengikuti sifat Rasulullah, yaitu: *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*.

Shiddiq memiliki arti benar. Bukan hanya lisannya, yang harus benar, tetapi juga tindakannya. Jadi antara perkataan, dan perbuatan harus sejalan dan seirama. Tak boleh berwajah dua.

Tabligh berarti menyampaikan. Menyampaikan yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Hukum yang harus dihukum. Dan bebaskan bagi yang tidak bersalah. Menyampaikan kebenaran itu harus dilakukan. Walaupun banyak yang mengancam.

Amanah berarti dapat dipercaya. Jadi pimpinan KPK nanti, haruslah orang-orang yang bisa dipercaya. Jika diserahkan kepadanya amanah untuk memberantas korupsi, maka tugas itu akan dijalankannya, apapun risikonya. Tak boleh pimpinan KPK berbuat khianat. Menyembunyikan kasus, mempetieskan kasus, atau mempermaikan kasus orang lain.

Fathonah artinya cerdas. Pimpinan KPK haruslah orang yang cerdas. Mengerti hukum dan menjalankannya. Cerdas bukan hanya secara intelektual. Namun cerdas pula, dalam membaca keinginan masyarakat, yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi.

Indonesia bebas dari korupsi memang masih mimpi. Masih banyak permainan yang melibatkan penyelenggara negara. Namun paling tidak, korupsi yang sudah parah ini, dapat diminimalisir. Dapat dikendalikan. Dan dapat dibatasi. Korupsi di Indonesia memiliki jaringan dan pola. Oleh karena itu, terjadi secara sistemik (Indriati, 2014).

Bagaimanapun, kita harus optimis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Negeri yang indah ini. Yang kaya ini. Jangan hanya dihuni, dan dinikmati oleh para koruptor. Negeri yang cantik ini, jangan diperas, hanya untuk menghidupi, para perampok uang negara.

Pansel memiliki tugas yang berat. Pimpinan KPK yang terpilih nanti, juga memiliki tugas yang tidak ringan. Namun dengan integritas dan dengan keikhlasan, untuk mengabdikan demi kemajuan bangsa dan negara, tugas berat itu akan terasa ringan.

Jangan sampai pimpinan KPK nanti seperti macan ompong. Tersandera oleh kepentingan penguasa dan pengusaha yang korup. Buktikan, bahwa Anda merupakan pimpinan KPK yang ideal. Yang siap bekerja, untuk membersihkan Indonesia. Dan siap mati, demi pemberantasan korupsi.

MK dan Narasi Kecurangan

Saat ini, seluruh mata rakyat Indonesia, sedang menatap ke arah Mahkamah Konstitusi (MK). Karena di gedung itulah, sedang terjadi sengketa Pilpres 2019. Ada yang optimis hakim-hakim MK, akan memutus dengan adil. Ada yang pesimis. Bahkan ada juga yang tak percaya pada MK.

MK lahir dari rahim reformasi. MK hadir, bukan hanya untuk menegakkan keadilan dalam menangani sengketa Pilpres. Namun MK ada, juga untuk menjaga dan mengawal konstitusi. Ya, untuk menjaga dan mengawal konstitusi.

Namun, MK juga bukan merupakan lembaga yang suci. Bukan pula lembaga, yang tanpa cacat. Dan bukan juga institusi yang tanpa cela.

Kita sama-sama tahu, hakim-hakim MK, di periode sebelum-sebelumnya, ada yang ditangkap KPK. Walaupun itu perbuatan oknum hakim. Tetap saja, MK menjadi pertarungan. MK telah kehilangan kredibilitas di mata masyarakat.

MK kini tentu berbeda. Kita berharap pada hakim-hakim MK, untuk memutus perkara sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya. Menangkan, yang harus dimenangkan. Dan kalahkan,

siapapun yang harus dikalahkan. Demi mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, MK tak boleh main mata dan MK harus adil dalam memutus perkara (Latif, 2019).

Jangan pernah ada niatan, untuk memutarbalikan keadilan dan melukai kebenaran. Jangan memutus, berdasarkan pesanan. Jangan memutus, karena tekanan. Jangan mengetok palu, berdasarkan balas budi. Dan jangan pula, memainkan perasaan, dan kebatinan rakyat Indonesia, yang sedang mencari dan mendambakan keadilan.

Kita harus yakin, dengan para hakim-hakim MK. Kepada merekalah, keadilan sedang digantungkan. Kepada merekalah, demokrasi sedang dipertaruhkan. Dan kepada merekalah, hukum sedang dipertaruhkan.

Hakim-hakim MK, adalah manusia-manusia biasa. Tak lepas dari salah dan dosa. Bukan malaikat, yang selalu baik dan benar. Dan bukan pula iblis, yang selalu jahat. Manusia biasa, yang sedang dinanti keputusan hukumnya.

Mari kita percayakan, seluruh keputusan sengketa Pilpres 2019, pada hakim-hakim MK. Jangan ada yang mengintervensi dan mengintimidasi mereka. Biarkan mereka bekerja, dengan profesional dan memutus sengketa dengan seadil-adilnya.

Jangan juga, kita membuat kesimpulan sendiri-sendiri, menafsirkan sendiri-sendiri, mereka-reka sendiri-sendiri, atas jalannya sidang di MK. Menyaksikan sidang di televisi merupakan keharusan. Agar kita objektif dalam membuat penilaian.

Keadilan, sedang dipetaruhkan. Kebijakan, sedang digaungkan. Profesionalitas, sedang dinanti. Perdebatan sedang, kita saksikan. Kebenaran sedang menjadi andalan. Apapun yang terjadi dengan keputusan MK nanti. Kita semua harus menerima.

Menerima kekalahan, dengan lapang dada. Dan menerima kemenangan, bukan dengan membusungkan dada. Yang menang, harus merangkul yang kalah. Dan yang kalah, harus siap membantu yang menang.

Itulah esensi berdemokrasi. Kalah dan menang dalam kontestasi Pilpres, adalah hal biasa. Namanya juga berkontestasi, ada yang menang, dan pasti juga ada yang kalah.

Ada yang menarik dari gugatan kubu 02, yaitu terkait tuduhan kecurangan kepada kubu 01. Di mana kubu Prabowo-Sandi, telah menuding kubu Jokowi-Ma'ruf Amin berbuat curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam negara demokrasi, menuduh curang boleh-boleh saja. Namun tuduhan-tuduhan tersebut harus bisa dibuktikan. Terlebih-lebih, bukti kecurangan itu harus diungkap di depan persidangan.

Narasi kecurangan yang dituduhkan kubu 02, telah membuat “seolah-olah” kubu 01 berlaku dan berbuat curang. Narasi kecurangan, bukan hanya terjadi saat ini saja. Tapi sudah terjadi sejak Pilpres 2014 yang lalu.

Masyarakat Indonesia, tentu akan berterima kasih. Dan memberi rasa hormat, kepada kubu 02. Jika kubu 02 tersebut, bisa membuktikan kecurangan kubu 01, secara gamblang di depan para hakim MK. Kita sedang menunggu bukti-bukti kuat itu.

Namun sebaliknya, jika kubu Prabowo-Sandi, tidak bisa membuktikan kecurangan-kecurangan di persidangan, maka masyarakat akan menilai, bahwa apa yang selama ini dituduhkan, hanya opini dan asumsi semata.

Agar tuduhan, tidak hanya menjadi opini dan asumsi, maka pembuktian adalah menjadi keniscayaan. Karena bagi para

MK, yang paling penting adalah bukti-bukti. Bukan pernyataan, tuduhan, apalagi opini dan asumsi.

Asalkan kubu 02 bisa membuktikan kecurangan-kecurangan, maka hakim-hakim juga akan memenangkannya.

Namun jika bukti-buktinya lemah, tentu yang akan diuntungkan kubu 01. Karena bagaimanapun, hakim akan memutus perkara berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan, diperlihatkan, dan diperdengarkan.

Narasi kecurangan yang dituduhkan kubu 01, masih menggema di sidang MK. Dari awal sidang hingga saat ini, narasi itu masih terus berkembang. Namun narasi kecurangan perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian. Nah dalam pembuktian itulah tidak mudah. Perlu kerja keras dan kecerdikan.

Apapun yang terjadi dalam sidang di MK. Kebenaran harus diungkap secara gamblang, dan komprehensif. Kebenaran harus diungkap, siapapun yang terlibat. Jangan ada yang menutup-nutupi kebenaran.

Dan kita semua yakin. Bahwa kebenaran akan menemukannya. Ya, kebenaran akan menemukan jalannya. Siapapun yang menjunjung kebenaran, merekalah sesungguhnya yang menang.

Yang mahal di republik ini, adalah keadilan. Entah di mana, rasa keadilan itu ada. Entah kepada siapa, keadilan itu akan memihak.

Namun saya yakin. MK akan memutus sengketa Pilpres 2019, dengan adil. Keadilan harus ditegakkan dengan sempurna, tidak memihak, dan jujur.

Keadilan adalah matahari keindahan. Rembulan kecantikan. Bintang keabadian. Pelangi keutamaan. Ombak kegagahan. Angin kehidupan. Cahaya kemenangan. Dan wajah kebahagiaan.

Negara yang menanamkan, prinsip-prinsip keadilan. Akan menjadi negara yang hebat, kuat, gagah, dan jaya. Namun negara yang mengabadikan kemunafikan. Bersiap-siaplah untuk hancur berantakan.

Tentu kita ingin, republik ini menjadi maju, maka tegakkanlah keadilan. Tegakkan keadilan pada siapapun. Tak boleh pandang bulu. Keadilan juga merupakan mercusuar kehidupan, yang akan terlihat gagah jika ditegakkan.

Kita semua berharap pada para hakim MK, untuk berbuat, bertindak, dan memutus dengan seadil-adilnya. Jangan kecewakan kami, rakyat Indonesia. Kami semua sedang menunggu keputusan darimu.

Mari Kita Bersatu

Hari ini, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK), akan memutuskan siapa pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf Amin ataukah Prabowo-Sandi. Apapun keputusan MK nanti, harus dihargai. Tak boleh ada yang mencaci dan memaki. Apalagi sampai dendam dan membenci.

Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Terima atau tidak terima. Keputusan MK, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), bersifat final dan mengikat. Juga tak bisa digugat.

Siapun yang dimenangkan MK, kita harus terima. Terima dengan lapang dada. Dalam kontestasi politik, pasti ada yang menang. Dan ada juga yang kalah. Sikap yang tidak mengakui kekalahan, merupakan sikap pengecut, yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi.

Hari ini juga, semua rakyat Indonesia, sedang berharap pada MK. Berharap keadilan akan direalisasikan dan ditegakkan. Berharap para hakim, memutus dengan bijaksana. Berharap memutus dengan hati nurani, dan berdasarkan bukti-bukti.

Hakim-hakim MK, tak boleh memutus berdasarkan asumsi dan opini. Apalagi berdasarkan hawa nafsu. Jiwa ikhlas dan tulus

dari para hakim MK, akan membuat putusan menjadi objektif. Dan hakim MK, tidak boleh memutus sengketa Pilpres, berdasarkan kepentingan.

Ini bukan hanya persoalan, persaingan Pilpres antara Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandi. Ini persoalan nasib bangsa, dalam lima tahun ke depan. Ini persoalan masyarakat, yang sudah terkotak dan terpolarisasi. Dan ini persoalan, rasa persatuan dan kesatuan yang hampir memudar.

Pasca putusan MK nanti. Semua harus terima. Semua harus legowo. Semua harus bersatu. Siapapun yang dimenangkan. Ya, siapapun yang dimenangkan.

Bangsa ini sudah lelah. Republik ini sudah capek. Jika yang kita pikirkan, hanya persoalan electoral. Jika yang kita pikirkan, sebatas Pilpres. Dan jika yang kita pikirkan, sebatas kekuasaan.

Bangsa lain sudah lari. Kita masih diam berdiri. Kita masih ribut-ribut, soal sengketa Pilpres. Menunggu keputusan MK memang penting. Namun ada yang lebih penting yaitu persatuan. Pepatah lama mengatakan, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".

Konstruksi bangsa ini heterogen. Warna partainya banyak, pilihan politiknya beragam, pendapatnya berbeda-beda, isi kepalanya macam-macam, dan dukungan Pilpresnya tak sama. Itu semua, bukan berarti kita harus bermusuhan. Bukan berarti, kita harus saling menyalahkan. Dan bukan pula, untuk kita saling bercerai-berai.

Pasca Pilpres dan pasca putusan MK, sudah saatnya kita bersatu. Bersatu untuk menatap masa depan Indonesia, yang gemilang. Bersatu dalam membangun Indonesia, yang sejahtera. Dan bersatu dan bahu-membahu, dalam membawa Indonesia, ke arah yang lebih baik.

Tak ada kemajuan, tanpa persatuan. Tak akan ada pembangunan, tanpa persatuan. Tak ada kekuatan, tanpa persatuan. Tak ada kemenangan, tanpa persatuan. Tak ada kejayaan, tanpa persatuan. Dan tak akan ada kemuliaan, tanpa persatuan.

Persatuan adalah kunci. Kunci dalam membawa Indonesia, menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Persatuan juga menjadi kunci, bagi kebesaran dan kehebatan suatu bangsa. Tanpa persatuan, tak akan ada kemajuan (Komarudin, 2018).

Tak mungkin bangsa ini ada tanpa persatuan. Persatuan menjadi mata air bagi kehidupan. Persatuan dapat memepererat persaudaraan. Persatuan bagai embun pagi harapan. Persatuan bagai pelangi, yang indah di taman.

Kita tentu tidak mau republik ini, terpecah belah. Kita juga pasti tidak mau, bangsa ini hancur. Kita juga tidak mau, jika tanah air dan tumpah darah ini, berkonflik. Kita juga tidak mau, jika tanah tempat kita lahir dan mati, luluh lantah.

Jangan hanya gara-gara kalah di MK, kita bermusuhan. Jangan hanya gara-gara Pilpres, kita bercerai berai. Jangan hanya gara-gara Pilpres, bangsa ini ikut stres. Dan jangan gara-gara Pilpres, kita tak bertegur sapa.

Silakan tidak puas dengan keputusan MK. Silakan mengkritik keputusan MK. Silakan menilai keputusan MK. Dan silakan berkomentar atas putusan MK nanti. Namun kita tidak boleh menghakimi.

Dan yang paling penting. Apapun yang diputuskan MK, kita harus terima. Walaupun memang, keputusan tersebut akan menyayat hati, membuat pilu, melukai, dan menyakiti bagi yang kalah.

Bagi saya, tak penting siapa yang akan dimenangkan MK. Yang terpenting itu, bagaimana pasca putusan MK, kita masih bisa

bersatu. Kita masih bisa bersaudara. Kita masih bisa bertegur sapa antarsesama. Dan kita masih bisa menjaga bangsa ini, dari konflik dan kehancuran.

Mari kita rawat dan jaga bangsa ini, dengan persatuan. Bukan dihancurkan dengan perselisihan, yang berkepanjangan. Dan mari kita lindungi republik ini, dari pihak-pihak yang ingin membuat bangsa ini bercerai-berai.

Persatuan yang tak dijaga dan dirawat, akan menjadi berkarat. Persatuan yang tak dilestarikan, akan mati. Persatuan yang didiamkan, akan terpendam. Dan persatuan yang dikhianati, akan hilang.

Mari kita bersatu demi bangsa ini. Bersatu demi bangsa dan negara. Bersatu demi kesetiaan kita, pada tanah air. Bersatu demi cinta pada tanah leluhur. Dan bersatu demi terciptanya, negara yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Jangan rusak Indonesia. Jangan hanya gara-gara kalah Pilpres. Persatuan dihancurkan. Dendam dikembangkan. Kebenciaan diteriakkan. Kebenaran dinafikan. Kemenangan ditolak. Dan kemunafikan dipertontonkan.

Bersatulah wahai rakyat Indonesia. Biarlah hakim-hakim MK, siang ini memutuskan siapa yang menang Pilpres 2019. Kita terima saja apapun keputusannya. Menerima keputusan MK adalah jalan terakhir. Dan merupakan jalan terbaik, untuk menyelesaikan konflik.

Persatuan lebih penting dari apapun. Lebih penting dari sekedar putusan MK. Lebih penting dari siapa pemenang Pilpres. Persatuan adalah segalanya. Tak usah ada Pilpres, jika kita tidak bersatu. Untuk apa ada Pilpres, jika kita masih berseteru. Selamat menunggu keputusan MK. Semoga pihak Anda yang menang. Dan ingat, jangan membuat kegaduhan.

BAB 7

PENUTUP

Penutup

Menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah semata. Tetapi juga harus menjadi tugas kita semua rakyat Indonesia. Menjaga Indonesia juga harus selaras dengan menggagas Indonesia hebat, dan Indonesia hebat sejatinya harus bertransformasi menjadi Indonesia emas di tahun 2045.

Partai politik, para elite, pejabat negara, dan para tokoh bangsa harus mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat miskin. Menjaga Indonesia dan menjadikan Indonesia hebat, adalah salah satu jalannya. Menjadikan Indonesia emas di tahun 2045, harus menjadi perjuangannya. Dan menjadikan Indonesia berperadaban adalah niat baiknya. Niat itu harus kita dukung. Termasuk niat kita semua untuk menjadikan Indonesia besar dan jaya.

Partai-partai juga harus sudah mempersiapkan konsep, ide, dan gagasan, untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Partai yang diam, tak bergerak, akan mati terkubur. Partai yang progresif, kreatif, dan inovatif, serta mempersiapkan gagasan terbaiknya, akan menjadi partai yang unggul.

Partai-partai politik harus menjadi garda terdepan, dalam mempersiapkan diri menuju Indonesia emas 2045. Dengan

cara mempersiapkan kader-kader terbaiknya, untuk menempati jabatan-jabatan strategis, baik di eksekutif maupun legislatif. Jika partainya loyo, maka loyolah bangsa ini. Jika partainya rusak, maka rusaklah bangsa ini. Dan jika partainya hebat, maka hebatlah bangsa ini.

Bukan sesuatu yang mustahil menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Asalkan kita mau. Pasti kita mampu. Semua bergantung kepada kita, sebagai rakyat Indonesia. Kuncinya kerja keras. Ya, kerja keras. Tak mungkin bangsa ini dibangun dengan malas-malasan dan kecurangan. Indonesia emas 2045 akan menemukan jalannya. Ya, akan menemukan jalannya. Jalan bagi kita yang sungguh-sungguh untuk meraihnya.

Menjaga Indonesia adalah keniscayaan. Menjaga Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita semua. Indonesia ada bukan untuk dirusak dan dihancurkan dengan perilaku koruptif dan jahat. Tapi Indonesia ada, untuk kita jaga, agar Indonesia tetap lestari, hingga mentari tak bersinar lagi.

Daftar Pustaka

- Alatas, Hussain Syed. (1987). *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Crossant, Aurel, dkk. (2003). *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Dahl, Robert A. (1971). *Poliarchy: Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Feith, Herbert dan Castle, Lance. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Ghazali, Al. (2016). *Ihya Ulumuddin* (terj). Yogyakarta: Marja.
- Huff, Darel. (2002). *Berbohong dengan Statistik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huntington, Samuel P. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imran dan Hidayati, Festy Rahma. (2019). *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Indriati, Etty. (2014). *Pola dan Akar Korupsi (Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komarudin, Ujang. (2016). *Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*. Jakarta: RM Books.
- Latif, Abdul. (2019). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya*

- Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Latif, Yudi. (2017). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Lay, Cornelis. (2010). *Melawan Negara: PDI 1973-1986*. Yogyakarta: Pol Gov Research Centre for Politics and Government, FISIPOL UGM.
- Linz, Juan J. et al. (2001). *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*. Bandung: Mizan.
- Pahlevi, Indra. (2001). *Sistem Multi Partai Pada Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap DPR RI (Periode 1998-1999)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Jenderal DPR-RI.
- Purba, Daniel P. Dan Sumiharti Yati. (2006). *Pidato-pidato Yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-pidato Bersejarah*. Jakarta: Esensi Airlangga Group.
- Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rocamora, J. Eliseo. (1991). *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan. (2004). *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Steinberg, Arnold. (1981). *Kampanye Politik dalam Praktik*. Jakarta: Intermedia.
- Stiftung, Friderich Naumann. (2002). *Strategi Politik dan Penerapannya Contoh Kasus Kampanye Pemilu Jerman 2002, bagian I dari III "Persiapan Pemilu – Sebuah Pengantar*. Jakarta: Friderich Naumann Stiftung.

- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Syafie, Inu Kencana. (1997). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Venus, Antar. (2004). *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Jurnal

- Agustino, Leo. (2005). "Pilkada Langsung: Beberapa Catatan dalam Analisis CSIS, Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal". Jakarta, Vol. 34, No. 2.
- Noor, Firman. (2016). "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia". Jurnal LIPI, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.

Media

- Menggagas Indonesia Emas 2045, Kamis, 22 November 2018
www.akurat.co
- Pileg Yes Pilpres No, Senin, 26 November 2018, www.monitor.co.id
- Pilpres Yang Membuat Stres, Kamis, 29 November 2018, www.akurat.co
- Siapakah Pemenang Pileg 2019?, Sabtu, 1 Desember 2018 www.kabarakyat.com
- Ulama, Rakyat, dan Demokrasi Lima Tahunan, Senin, 03 Desember 2018, www.monitor.co.id
- Adu Kuat Jokowi versus Prabowo, Kamis, 06 Desember 2018, www.akurat.co

- Isu PKI Serang Jokowi, Kamis, 13 Desember 2018, www.akurat.co
- Politik Poligami PSI, Kamis, 20 Desember 2018, www.akurat.co
- Gaya Baru Kampanye Pilpres, Kamis, 27 Desember 2018, www.akurat.co
- Pilpres Pasca Reuni 212, Senin, 31 Desember 2018, www.monitor.co.id
- Politisasi Ngaji Menebar Politik Identitas, Kamis, 03 Januari 2019, www.akurat.co
- Republik Darurat Hoaks, Kamis, 10 Januari 2019, www.akurat.co
- Hantu Debat Perdana, Kamis, 17 Januari 2019, www.akurat.co
- Kritik JK dan Nasib Bangsa, Kamis, 24 Januari 2019, www.akurat.co
- Jebakan Demokrasi, Kamis, 31 Januari 2019, www.akurat.co
- Kampanye Ofensif, Kamis, 07 Februari 2019, www.akurat.co
- Menanti Kejutan Debat Kedua, Kamis, 14 Februari 2019, www.akurat.co
- Saling Serang Pasca Debat, Kamis, 21 Februari 2019, www.akurat.co
- Kartu Sakti Jokowi, Kamis, 28 Februari 2019, www.akurat.co
- Narkoba Menyasar Andi Arief, Kamis, 07 Maret 2019, www.akurat.co
- Menanti Debat Ketiga, Kamis, 14 Maret 2019, www.akurat.co
- Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas, Kamis, 21 Maret 2019, www.akurat.co
- Beban Ideologi Debat Keempat, Kamis, 28 Maret 2019, www.akurat.co
- Demokrasi dalam Ancaman, Kamis, 04 April 2019, www.akurat.co
- Menanti Debat Pamungkas Capres dan Cawapres, Kamis, 11 April 2019, www.akurat.co

Pilpres Kita, Kamis 18 April 2019, www.akurat.co

Saatnya Rekonsiliasi, Kamis, 25 April 2019, www.akurat.co

Ulama Terpecah, Umat Terbelah, Kamis, 02 Mei 2019, www.akurat.co

Menjaga Indonesia, Kamis, 09 Mei 2019, www.akurat.co

Menolak Hasil Pemilu, Kamis 16 Mei 2019, www.akurat.co

Indonesia Terluka, Kamis, 23 Mei 2019, www.akurat.co

Menunggu Rekonsiliasi Pasca Pilpres, Kamis, 30 Mei 2019, www.akurat.co

Bersatu Pasca Pilpres, Kamis, 06 Juni 2019, www.akurat.co

Mencari Pimpinan KPK yang Ideal, Kamis, 13 Juni 2019, www.akurat.co

MK dan Narasi Kecurangan, Kamis, 20 Juni 2019, www.akurat.co

Mari Kita Bersatu, Kamis, 27 Juni 2019, www.akurat.co

Pilpres 2019 sebagai Katalis Ekonomi, Detik.com, Selasa, 09 April 2019

Tentang Penulis

Dr. Ujang Komarudin, M.Si adalah Dosen dan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Staf Ahli DPR RI tahun 2011-2015. Dan Staf Khusus Ketua DPR RI tahun 2016. Ditetapkan menjadi Doktor Ilmu Politik ke-50 di Universitas Indonesia (UI), di usia sangat muda.



Beliau aktif menulis di berbagai media dan sering menjadi narasumber di beberapa TV Nasional seperti TVRI, Metro TV, TV ONE, Trans7, CNN TV Indonesia, iNews TV, MNC TV, Astro Awani TV Malaysia, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Dakta, Radio PRFM Bandung dan lain-lain. Menjadi Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023. Keliling Indonesia dan dunia mengisi seminar dan pelatihan. Kini sedang menikmati menjadi penulis dan pengamat politik.

Beberapa buku yang sudah terbit di antaranya:

1. Dinamika Politik Nasional: Pasang Surut Hubungan Kekuatan Politik di Indonesia;
2. Membangun Indonesia: Sebuah Ikhtiar Membangun Bangsa yang Hampir Tenggelam;

3. Mencintai Indonesia: Catatan dan Harapan Seorang Dosen;
4. Pertarungan Politik di Indonesia: Dinamika Pertarungan Politik dalam Pilkada dan Politik Nasional;
5. Menjadi Indonesia: Pikiran-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia;
6. Strategi PKS Putihkan Jakarta;
7. Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik;
8. Perspektif Indonesia: Catatan Politik di Tahun Politik;
9. Drama Politik Indonesia: Pikiran-Pikiran Politik Anak Bangsa;
10. Catatan Kaki;
11. Catatan Ujang Komarudin;
12. Demokrasi di Persimpangan: Intrik-intrik Politik di Tahun Politik;
13. Up and Down Politik Indonesia;
14. Memotret Politik Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan;
15. Refleksi Politik Indonesia,
16. Kaleidoskop Politik Indonesia 2018
17. Menyambut Usia 38 Tahun Dr. Ujang Komarudin, M.Si
18. Menjaga Indonesia: Pikiran-pikiran Konstruktif untuk Bangsa

Buku di tangan pembaca ini merupakan buku referensi, buku sederhana, yang lahir dari ucapan dan pikirannya.

Beliau bisa dihubungi di alamat email: ujang81@uai.ac.id
ukom.ui@gmail.com atau via WhatsApp di 081-33-782-6674.